

# **ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

Pengantar dan Konsep Dasar



# **ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

**Pengantar dan Konsep Dasar**

Penulis:

Muhammad Kaulan Karima, M.Pd  
Toni Nasution, M.Pd  
Ramadhani, M.Pd

Editor:

Dr. Deny Setiawan, M.Si

Perdana Publishing

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL:  
Pengantar dan Konsep Dasar

Penulis:

Muhammad Kaulan Karima,  
Toni Nasution, Ramadhani

Editor:

Dr. Deny Setiawan, M.Si

Copyright © 2019, Pada Penulis.  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Tim Pracetak Perdana  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

**PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana  
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756  
E-mail: perdanapublishing@gmail.com  
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Maret 2019

**ISBN 978-623-7160-14-4**

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian  
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun  
tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat-Nya atas izin-Nya, sehingga penyusunan Buku “Ilmu Pengetahuan Sosial: Pengantar dan Konsep Dasar” ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditargetkan. Sehingga hal ini merupakan upaya untuk memaksimalkan fungsi khalifah di alam semesta

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca terkhusus kalangan mahasiswa perguruan tinggi, dikarenakan mata kuliah Konsep Dasar IPS merupakan mata kuliah bidang keahlian pada Program Studi PGSD/PGMI, Pendidikan IPS dan mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial. Sebagaimana diketahui literatur atau buku pegangan mahasiswa pada mata kuliah ini masih tergolong sedikit.

Buku ini membahas tentang Hakikat, Sejarah lahir dan berkembangnya IPS, hubungan IPS dengan Ilmu Sosial, IPS sebagai Ilmu Sosial dan Kajian Sosial, Pengembangan Materi IPS, serta mengungkap masalah yang terjadi pada IPS serta solusinya, sehingga membahas mengenai berbagai tradisi dalam IPS termasuk konsep, struktur, aspek metode, maupun aspek nilai yang dikembangkan dalam ilmu IPS di kemas secara psikologis, paedagogis dan sosial budaya untuk kepentingan pendidikan serta disajikan secara ilmiah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung hingga buku ini rampung dan layak untuk diterbitkan.

Selanjutnya disadari bahwa buku ini, tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini lebih tersempurnakan.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat untuk semua, dan sebagai amal jariyah penulis dalam memanfaatkan diri bagi sesame.

Medan, Pebruari 2019

Penulis

# KATA SAMBUTAN

**Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd**

(Wakil Rektor I UIN SU Medan)

Belajar dalam Islam menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Muslim. Belajar dari berbagai negara yang tergolong maju setidaknya ada dua pelajaran penting yang harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia yaitu, menciptakan pemerintahan yang bersih dan pendidikan yang bagus (*clean governance and good education*). Tantangan di era globalisasi tentunya memberikan semangat baru bagi dunia pendidikan. Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, harusnya para praktisi pendidikan semakin menunjukkan integritasnya dengan menghasilkan beberapa karya tulis yang dapat menjadi acuan dalam dunia pendidikan.

Perubahan kurikulum yang semakin berkembang hingga kini lahirnya kurikulum berbasis kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan untuk menciptakan generasi-generasi emas yang berkompeten bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi keterampilan dan karakter yang dapat ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Berkembangnya kurikulum harusnya dapat mengembangkan kreatifitas tenaga pendidik dalam memajukan pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal dari negara-negara maju dan berkembang lainnya.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diharapkan mampu untuk mengembangkan kemampuan bersosial pada setiap individu, kesadaran akan bermasyarakat dan tentunya kemampuan berbangsa dan bernegara dengan baik. Faktanya kesadaran individu dalam memaknai kehidupan bersosial sangat disayangkan dapat dilihat dari

merosotnya karakter warga negara yang tidak mempunyai kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Sikap acuh tak acuh menjadi hal yang biasa dalam bermasyarakat. Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara penyampaian konsep dan teori ilmu pengetahuan sosial pada lembaga pendidikan.

Menyikapi era globalisasi dalam dunia pendidikan, diharapkan para pendidik harus lebih bekerja keras untuk mengemas program pembelajaran yang tidak hanya mengedapankan ilmu pengetahuan, melainkan meningkatnya sikap dan keterampilan yang dapat menunjang perubahan yang lebih baik lagi pada setiap diri peserta didik untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter. Pembentukan karakter harus dimulai sejak sekolah dasar, karena pada dasarnya anak-anak yang duduk dibangku sekolah dasar lebih mudah untuk dibentuk karakternya karena mereka belum terlalu banyak terkontaminasi oleh arus globalisasi. Pengintegrasian nilai-nilai kehidupan dapat ditunjukkan dengan keterampilan-keterampilan pada proses pembelajaran.

Melalui keterampilan-keterampilan yang ditunjukkan, diharapkan dapat mengembangkan sikap yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan lulusan-lulusan terbaik pada perguruan tinggi. Karena pada dasarnya, kemajuan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh semangat kebangsaan para pemuda/i yang memiliki intelektual dan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam dirinya.

Untuk itu pemahaman konsep, teori, teknik, metode, model dan evaluasi dalam pembelajaran IPS harus lebih ditingkatkan lagi melalui pengalaman belajar yang dapat diaplikasikan pada penelitian berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat. Dua hal tersebut dapat memberikan wawasan dibidang ilmu pengetahuan sosial.

Terbitnya buku dengan judul “Ilmu Pengetahuan Sosial: Pengantar dan Konsep Dasar” yang ditulis oleh dosen muda yang kreatif dan inovatif memberikan pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya dasar dari pengetahuan IPS.

Buku ini dapat menjadi sumber yang relevan untuk meningkatkan kemampuan bersosial di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Selain menjadi sumber bacaan yang menarik, buku ini dapat menjadi referensi serta menambah wawasan terhadap para pembaca mengenai bagaimana dasar pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial.

Melalui buku ini diharapkan memberikan manfaat yang sangat berpengaruh besar dalam dunia pendidikan, tentunya salah satu yang diharapkan dalam dunia pendidikan yaitu memberikan perubahan bagi para peserta didik, mahasiswa/i dan seluruh pendidik untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Menjalani kehidupan bersosial dengan baik dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku di Indonesia.

Medan. Pebruari 2019

**Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b>	
<b>Pendahuluan</b> .....	3
<b>BAB II</b>	
<b>Hakikat Ilmu Pendidikan Sosial (IPS)</b> .....	11
A. Latar Belakang Lahirnya IPS .....	11
B. Pengertian IPS .....	15
C. Ruang Lingkup Kajian IPS.....	18
D. Tujuan IPS .....	23
E. Landasan Pengembangan IPS .....	26
<b>BAB III</b>	
<b>Perkembangan IPS pada Kurikulum Nasional</b> .....	33
A. Perkembangan IPS di Indonesia .....	33
B. IPS pada Kurikulum 1945-1964 .....	35
C. IPS pada Kurikulum 1964-1968 .....	36
D. IPS pada Kurikulum 1975 dan 1984.....	37
E. IPS pada Kurikulum 1994 .....	38
F. IPS dalam Kurikulum 2004 (KBK) .....	40
G. IPS pada Kurikulum 2006 (KTSP) .....	43
H. IPS pada Kurikulum 2013 (K 13) .....	43
<b>BAB IV</b>	
<b>IPS sebagai Ilmu Sosial dan Kajian Sosial</b> .....	47
A. IPS Sebagai Ilmu Sosial .....	47

B. IPS Sebagai Kajian Sosial .....	52
C. Persamaan dan Perbedaan IPS sebagai Ilmu Sosial dan Kajian Sosial .....	53

## **BAB V**

<b>Hubungan IPS dengan Ilmu Sosial</b> .....	59
A. Hubungan IPS dan Ilmu Sosial.....	59
B. Hubungan IPS dengan Ilmu Sosiologi.....	64
C. Hubungan IPS dengan Geografi .....	66
D. Hubungan IPS dengan Ekonomi .....	67
E. Hubungan IPS dengan Ilmu Politik .....	70
F. Hubungan IPS dengan Antropologi .....	72
G. Hubungan IPS dengan Sejarah.....	73
H. Hubungan IPS dengan Psikologi Sosial .....	75
I. Hubungan IPS dengan Ilmu Hukum .....	77

## **BAB VI**

<b>Konsep Dasar Ilmu Sosial pada IPS</b> .....	81
A. Konsep Dasar Sosiologi .....	81
B. Konsep Dasar Geografi .....	92
C. Konsep Dasar Ekonomi .....	98
D. Konsep Dasar Ilmu Politik .....	103
E. Konsep Dasar Antropologi .....	111
F. Konsep Dasar Sejarah .....	120
G. Konsep Dasar Psikologi Sosial .....	127

## **BAB VII**

<b>Pengembangan Materi Ajar IPS</b> .....	137
A. Materi IPS .....	137
B. Pengorganisasi Materi IPS .....	142
C. Struktur IPS .....	147

**BAB VIII**

**IPS dalam Membangun Karakter Bangsa** ..... 161

- A. IPS dan Karakter ..... 161
- B. Pengertian Nilai, Norma, Moral dan Karakter ..... 164
- C. Hubungan Nilai, Norma, Moral dan Karakter ..... 177
- D. Perbedaan Kepribadian dengan Karakter ..... 183

**BAB IX**

**Permasalahan pada IPS dan Solusinya** ..... 189

- A. Permasalahan Pada Kurikulum IPS ..... 189
- B. Solusi atas Masalah pada IPS ..... 193

**Daftar Pustaka**..... 196

**Riwayat Penulis**..... 200

**Tentang Editor**..... 204

# PENDAHULUAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

Era globalisasi telah mengantarkan kita pada perubahan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman yang dibarengi bertambahnya tingkat pemahaman dan juga pengetahuan manusia di bidang sains dan teknologi yang akhirnya membawa banyak dampak bagi kehidupan manusia secara umum baik positif maupun negatif.

Untuk mengiringi kemajuan yang berjalan sangat cepat sampai saat ini kita masih menggantungkan harapan pada pendidikan untuk tetap mengawal dan menjaga kehidupan sosial masyarakat yang terus berubah. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Selanjutnya fungsi dan tujuan pendidikan yang tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 adalah “*berfungsi* mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, *bertujuan* untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Bab II Pasal 3).

Namun fungsi dan tujuan yang sangat mulia ini belum secara maksimal dapat dipenuhi, karena saat ini pendidikan kita yang masih belum bisa mengejar cepatnya arus perubahan itu perlu disesuaikan dan juga dijaga sehingga tetap mampu menjawab tantangan dari perubahan dan kemajuan yang terus terjadi.

Melihat begitu mulia dan luhurnya fungsi dan tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam Undang-Undang diatas seharusnya dapat mengantarkan Indonesia menjadi sebuah Negara yang maju dan bermartabat. Akan tetapi, sebaliknya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat rendah dan memprihatinkan. Berdasarkan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Melihat kondisi yang dihadapi, maka Pendidikan Ilmu Sosial (IPS) sepantasnya mulai membenahi diri baik dari bergeser dari tatanan epistemologi ke arah pengembangan inovasi dan juga solusi bagi perkembangan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kedepannya. Dimana hal ini sesuai dengan tujuan utama pendidikan IPS yaitu *mempersiapkan warga negara yang dapat membuat keputusan reflektif dan berpartisipasi dengan sukses dalam kehidupan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.*

Selanjutnya Hamalik (1992: 40-41) menjelaskan Tujuan Pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu: 1) pengetahuan dan pemahaman, 2) sikap hidup belajar, 3) nilai-nilai sosial dan sikap, 4) keterampilan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari IPS pada hakikatnya adalah membekali anak didik

dengan pengetahuan sosial yang berguna, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosialnya sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam merealisasikan tujuan nasional.

Dipertegas bahwa IPS memiliki tujuan yang sangat berguna yaitu sebagai:

1. Pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat.
2. Laju perkembangan kehidupan, teknologi, dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan yang seirama dengan laju itu.
2. Agar *output* persekolahan benar-benar lebih cocok dan sesuai serta bermanfaat.
3. Setiap orang akan dan harus terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu disiapkan ilmu khusus, yaitu IPS.

Dilihat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dunia pendidikan selalu tertinggal dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka IPS diperlukan sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mengharmonisasikan laju perkembangan ilmu dan kehidupan dalam dunia pengajaran. Sebab IPS mampu melakukan lompatan-lompatan ilmu secara konseptual untuk kepentingan praktis kehidupan yang baru, sesuai dengan perkembangan jaman. IPS oleh para ahli secara sengaja diciptakan dan dibina ke arah menuntun generasi muda mampu hidup dalam alamnya (zaman dan lingkungannya) dengan bekal pengetahuan yang baru.

Karena IPS diarahkan demikian, maka susunan konsep-konsep

dalam IPS sungguh sangat kompleks dan bervariasi dari berbagai cabang ilmu sosial. Tuntutan dan persoalan kehidupan praktis adalah buah dari lajunya pengetahuan dan teknologi yang menarik lajunya kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, IPS mau tak mau harus berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

IPS merupakan fusi/gabungan dari berbagai ilmu sosial, antara lain; sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, ekonomi, dll. Untuk itu, dengan adanya IPS, konsep-konsep ilmu sosial tersebut dapat dipahami secara sederhana selanjutnya diimplementasikan yaitu dengan menemukan solusi dari permasalahan sosial yang terjadi.

Pada dasarnya esensi kajian Pendidikan IPS apabila diambil kesimpulan dari tujuan Pendidikan IPS pada jenjang diantaranya, *Pertama*, memberikan bekal pengetahuan untuk menambah khasanah keilmuan tentang manusia dan kehidupan sosial dimana manusia hidup dalam kehidupan beragama serta lingkungannya sebagai insan mandiri, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, membina kesadaran, keyakinan dan sikap akan pentingnya hidup bermasyarakat dengan penuh kebersamaan, bertanggungjawab dan kemanusiaan. *Ketiga*, membina keterampilan hidup bermasyarakat dalam negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. *Keempat*, menunjang terpenuhinya bekal kemampuan dasar peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota manusia. *Kelima*, membina perbekalan dan kesiapan untuk belajar lebih lanjut atau melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi.

Kesimpulannya adalah tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang *konstruktif* dan *produktif* yaitu warga negara yang memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya, mampu merasa

sebagai warga negara, berpikir sebagai warga negara, bertindak sebagai warga negara, dan jika mungkin juga mampu hidup sebagaimana layaknya warga negara.

Dengan mempelajari konsep dasar IPS ini diharapkan mampu membantu dalam memahami konsep-konsep yang mendasar pada kajian IPS yang berpengaruh terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang secara kritis dan kreatif. Dimana kajian pada buku ini mengungkapkan hakikat dari IPS itu sendiri atau disini disebut dengan “pengantar”, selanjutnya mengungkapkan konsep dasar ilmu sosial yang diintegrasikan dan dikaji pada IPS, serta pengimplementasiannya dalam membangun karakter siswa.

Untuk itu, sehebat apapun kajian IPS yang dibahas, tidak akan dapat dikuasai secara maksimal tanpa didukung oleh guru yang kreatif dalam pembelajaran, karena konsep-konsep dasar IPS yang disampaikan harus diringi dengan *transfer of value* (internalisasi nilai-nilai kebaikan) sehingga menghasilkan siswa-siswa yang memahami konsep dan memiliki karakter yang unggul dan bisa menjadi warga Negara yang baik.



# **HAKIKAT ILMU PENDIDIKAN SOSIAL**





## BAB II

# HAKIKAT ILMU PENDIDIKAN SOSIAL

### A. Latar Belakang Lahirnya IPS

Rumusan tentang pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dimana istilah IPS dikenal pertama kali di Inggris dan Amerika yang dikenal dengan *social studies*. Jadi, istilah IPS merupakan terjemahan *social studies*. *Social studies* dapat diartikan kajian sosial, dan sehingga dapat pula diartikan dengan “penelaahan atau kajian tentang masyarakat”. Dalam mengkaji masyarakat, maka dapat digunakan kajian dari berbagai perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik-pemerintahan, dan aspek psikologi sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran

*Social Studies* merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi antropologi, psikologi, ilmu geografi dan filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Bila dianalisis dengan cermat bahwa pengertian *social studies* mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. *Social Studies* merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial
2. Disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan

pada tingkat persekolahan maupun tingkat perguruan tinggi.

3. Aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut.

Untuk itu, IPS pada dasarnya bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri, dimana IPS merupakan sebuah kajian gejala sosial dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. IPS pada awalnya berkembang di Inggris dan Amerika dikarenakan saat itu melihat kondisi sosial masyarakat yang sudah kacau, sehingga para ahli melakukan kajian untuk memecahkan masalah sosial tersebut dengan menggunakan pendekatan atau konsep-konsep ilmu sosial.

Ilmu Pengetahuan Sosial (*social studies*) pertama kali dimasukkan dalam kurikulum sekolah dilakukan di Inggris pada tahun 1827, atau setengah abad setelah terjadinya Revolusi Industri pada abad ke-18.

Masyarakat Inggris pada waktu itu yang tengah mengalami kekacauan akibat revolusi industri yang melanda negara itu. Masyarakat dan peradaban Inggris terancam dekadensi, karena mekanisasi industri telah menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat Inggris, terutama kaum buruh. Kaum kapitalis dan pemerintah yang kurang memperhatikan nasib kaum buruh yang mengakibatkan terjadinya pemerasan dan penindasan. Selain itu, di Inggris juga terjadi persaingan di kalangan buruh sendiri, yang menyebabkan hidup kaum tidak punya (*the haves not*) menjadi sangat menderita. Kehidupan antar kaum buruh dan antara buruh dengan majikan digambarkan oleh filsuf Inggris Thomas Hobbes sebagai *homo homini lupus bellum omnium contra omnes* (manusia adalah srigala bagi yang lain, mereka saling berperang).

Singkatnya, manusia menjadi kehilangan kemanusiaannya (dehumanisasi). Sebagai respon terhadap keadaan yang demikian

ironis, sehingga Arnold memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolahnya. Upayanya kemudian ditiru oleh banyak sekolah lainnya, dan sekaligus menjadi awal berkembangnya IPS sebagai matapelajaran di sekolah.

Berbeda halnya dengan di Inggris, *social studies* dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah Amerika Serikat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsanya. Karena di Amerika Serikat pada saat itu terjadi konflik sosial yaitu perbudakan, yang pada akhirnya terjadi perlawanan dan peperangan pada tahun 1861-1865, sehingga kondisi bangsa di Amerika Serikat terpecah belah, dan perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam.

Sebagai respon atas keadaan masyarakat tersebut, para ahli kemasyarakatan Amerika Serikat mencari upaya untuk membantu proses pembentukan bangsa Amerika Serikat, antara lain dengan mengembangkan IPS sebagai jawaban atas situasi sosial. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, yang dipelopori oleh sekolah-sekolah di negara bagian Wisconsin sejak 1892.

Setelah dipelajari secara terus menerus sampai awal dasa wara abad ke-20, pada tahun 1916 panitia nasional untuk pendidikan menengah Amerika Serikat menyetujui pengembangan dan pemasukan IPS ke dalam kurikulum sekolah.

Istilah IPS yang digunakan di Amerika Serikat adalah "*social studies*", istilah tersebut dipergunakan sebagai nama sebuah komite yaitu "*Committee of Social Studies*" yang didirikan pada tahun 1913 dengan tujuan sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah dan ahli-ahli ilmu-ilmu sosial yang mempunyai minat sama.

Pada abad ke-20, sebuah Komisi Nasional dari *The National Education Association* memberikan rekomendasi tentang perlunya

*social studies* dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah Amerika Serikat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Setiawan (2015: 6-7) dalam dunia pengajaran, ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan, sehingga timbullah *social studies* atau di Indonesia disebut Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Ahmadi (1991: 2) menegaskan, bahwa awalnya, *social studies* merupakan ramuan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan *civics*. *Social studies* berkembang dan berpengaruh terhadap program kurikulum pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat sejak tahun 1940-an sampai sekarang.

Sedangkan perkembangan IPS di Indonesia banyak mengambil ide-ide dasar dari pendapat-pendapat yang dikembangkan di Amerika Serikat. Sedangkan tujuan, materi, dan penanganannya dikembangkan sendiri sesuai dengan tujuan nasional dan aspirasi masyarakat Indonesia. Hal ini didasarkan pada realitas, gejala, dan masalah sosial yang menjadi kajian IPS yang tidak sama dengan negara-negara lain. Karena, setiap negara memiliki perkembangan dan model pengembangan *social studies* yang berbeda.

Amerika Serikat merupakan negara yang sangat plural, terdiri dari berbagai ras, bangsa, agama dan kebudayaan sehingga masyarakatnya bersifat multikultural. Kondisi ini memiliki sejumlah persamaan dengan negara Indonesia.

Keadaan masyarakat yang demikian mengingatkan pada betapa pentingnya pembentukan jiwa sosial yang humanis sedini mungkin melalui pembelajaran IPS di sekolah-sekolah.

Di Indonesia latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah Indonesia juga tidak terlepas adanya masalah sosial yang terjadi, yaitu situasi kacau termasuk dalam

bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI. Pada Replita 1 (1969-1974) Tim Peneliti Nasional di bidang pendidikan menemukan lima masalah nasional dalam bidang pendidikan. Kelima masalah tersebut antara lain: (1) kuantitas (berkenaan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar), (2) kualitas (menyangkut peningkatan mutu lulusan), (3) relevansi (kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan), (4) efektifitas sistem pendidikan, dan (5) efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, pembinaan generasi muda untuk menyiapkan tenaga produktif.

Menurut Fatimah (2015: 4), penggunaan istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia baru dimulai dengan ditetapkannya Kurikulum Nasional pada tahun 1975 yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Sebelum berlakunya kurikulum 1975 istilah IPS belum ada, walaupun beberapa mata pelajaran yang tergolong ke dalamnya telah diberikan di sekolah-sekolah yang mencakup Sejarah, Ilmu Bumi, Tata Negara dan Ekonomi. Kurikulum 1975 mengelompokkan semua mata pelajaran tersebut ke dalam IPS.

## **B. Pengertian IPS**

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas tentang IPS, maka penting untuk dikemukakan beberapa pengertian *social studies* dan IPS menurut para ahli. Berikut pengertian IPS yang dikemukakan oleh beberapa ahli pendidikan dan IPS di Indonesia (Tanwif dkk, 2009: 1-9):

1. Moeljono Cokrodikardjo mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan ekologi manusia, yang

diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari;

2. Nu'man Soemantri menyatakan bahwa IPS merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Penyederhanaan mengandung arti: a) menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari di universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berfikir siswa siswi sekolah dasar dan lanjutan, b) mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah dicerna;
3. S. Nasution mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial;
4. Tim IKIP Surabaya mengemukakan bahwa IPS merupakan bidang studi yang menghormati, mempelajari, mengolah, dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah *human relationship* hingga benar-benar dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan bentuk yang terpadu dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, kemudian disederhanakan sesuai dengan kepentingan sekolah-sekolah.

Dengan demikian, IPS bukan ilmu sosial dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah,

mengkaji gejala, dan masalah sosial masyarakat, yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.

Sedangkan Ahmadi (1991: 2-3) menambahkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat. Ia juga menjelaskan bahwa IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Menurutnya IPS ialah bidang studi yang merupakan paduan (fusi) dari sejumlah disiplin ilmu sosial.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa materi IPS diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang dijadikan sebagai bahan baku bagi pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah.

Selanjutnya Barr, dkk (1987: 193) menjelaskan, *The committee on the social of the national education on asociation's and reorganisation of secondary education in 1916*, memberi definisi sebagai berikut: *"theose (studies) whose subject matter relates to the orgaisation and development of human society and to man as member of sosial group"*. Maksudnya, studi sosial ialah mata pelajaran yang menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hubungan manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai anggota masyarakat.

Paul Mathis, dalam bukunya *"The Teacher Handbook for Social Studies*, mengartikan IPS sebagai: *"the study of man in society in the past, present and future. Social studies emerges as a subject of prime importance for study in school"*. Artinya, studi sosial ialah mata pelajaran di sekolah untuk mempelajari manusia dalam masyarakat pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Ilmu-ilmu sosial merupakan dasar dari IPS. Akan tetapi, tidak semua ilmu-ilmu sosial secara otomatis dapat menjadi bahan atau pokok bahasan dalam IPS. Tingkat usia, jenjang pendidikan, dan perkembangan pengetahuan siswa sangat menentukan materi-materi ilmu-ilmu sosial mana yang tepat menjadi bahan atau pokok bahasan dalam IPS.

Di Indonesia IPS menjadi salah satu mata pelajaran dalam pembaharuan kurikulum SD, SMP, SMA sejak 1975 dan masih berlangsung hingga sekarang. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ini sangat penting diajarkan kepada peserta didik, sebab setiap individu ialah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Agar setiap individu menjadi warga negara yang baik maka ia perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang konsep dan kaidah-kaidah sosial, menentukan sikap sesuai dengan pengetahuan tersebut dan memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disiplin ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dalam *social studies* di Indonesia meliputi ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam *social studies* di Amerika Serikat lebih beragam bila dibandingkan dengan tradisi pengembangan IPS di Indonesia. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam *social studies* di Amerika Serikat meliputi antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, religi dan sosiologi.

### **C. Ruang Lingkup Kajian IPS**

Secara mendasar, dalam mengajarkan IPS pasti berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi

kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya, memanfaatkan sumberdaya yang ada dipermukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia (Tanwif dkk, 2009: 1-11). Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik MI/SD. Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian diperluas.

Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi: bobot dan keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan. Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan pendekatan sistem menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar mahasiswa secara berkesinambungan.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, ruang lingkup kajian IPS meliputi (a) substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat

dan (b) gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup pengajaran IPS tersebut harus diajarkan secara terpadu karena pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya.

Secara spesifik kalau diuraikan dari setiap ilmu sosial yang dimasukkan pada pelajaran IPS, seperti Geografi, Sejarah, Antropologi, Politik dan Ekonomi, Sosiologi dan Psikologi Sosial, sebagai berikut: (1) Pembelajaran Geografi memberikan kebulatan wawasan berkenaan dengan wilayah-wilayah. Sedangkan sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. (2) Antropologi meliputi studi-studi komparatif mengenai nilai-nilai kepercayaan, struktur sosial, aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spritual, teknologi dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. (3) Ilmu Politik dan Ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. (4) Sosiologi dan Psikologi Sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. Konsep-konsep tersebut secara intensif digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan studi-studi sosial.

Secara akademik, karakteristik mata pelajaran IPS dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, kewarganegaraan,

sosiologi bahkan juga humaniora, pendidikan dan agama.

2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau tema.

Ruang lingkup kajian pada IPS inilah yang akhirnya dapat membedakannya dengan Ilmu-ilmu Sosial (*social sciences*). Sebagaimana Sumaatmadja (1986: 22) menjelaskan, bahwa terdapat perbedaan yang esensial antara ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dengan ilmu pengetahuan sosial (*social studies*).

Menurut Norman Maz Kenzie ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dapat diartikan sebagai semua bidang ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Sedangkan *The committee on the social of the national education on asociation's and reorganisation of secondary education in 1916* menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial (*social studies*) ialah mata pelajaran yang menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hubungan manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai anggota masyarakat.

Menurut Somantri (2001: 198), ilmu yang disajikan dalam pendidikan IPS merupakan *Synthetic* antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pendidikan untuk tujuan pendidikan. Ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan IPS merupakan hasil seleksi, adaptasi, dan modifikasi dari hubungan antar disiplin ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.

Mengenai karakteristik pendidikan IPS sebagai *syhthetic discipline* disebabkan pendidikan IPS bukan hanya harus mampu mensintesis konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, melainkan juga tujuan pendidikan

dan pembangunan serta masalah-masalah sosial dalam hidup bermasyarakatpun akan menjadi pertimbangan bahan pendidikan IPS.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu sosial berbeda dengan ilmu pengetahuan sosial, beberapa perbedaan tersebut yaitu:

1. Aspek kehidupan manusia yang menjadi objek studi ilmu-ilmu sosial terpisah, misalnya sosiologi objek studinya interaksi sosial, antropologi objek studinya kebudayaan, ekonomi objek studinya kebutuhan manusia, geografi objek studinya ruang atau interelasi manusia dengan faktor alam pada ruang, ilmu politik objek studinya kekuasaan, sejarah objek studinya waktu atau riwayat masa lampau, psikologi sosial objek studinya proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan, IPS bukan disiplin ilmu mandiri seperti ilmu-ilmu sosial lainnya. IPS juga mengkaji manusia dalam konteks sosialnya, namun, IPS mengkaji aspek kehidupan sosial manusia sebagai satu kebulatan atau unidimensional.
2. Ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) lebih dipusatkan pada pengkajian ilmu murni. Kerangka kerja ilmu-ilmu sosial lebih diarahkan kepada pengembangan teori dan prinsip ilmiahnya. Setiap disiplin ilmu-ilmu sosial (sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ilmu politik, ekonomi, dan lain-lain) berusaha untuk mengembangkan kajiannya sesuai dengan alur keilmuannya. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu sosial tidak menekankan aspek pendidikan, namun ilmu-ilmu sosial dirumuskan sebagai disiplin akademik mengenai manusia dan konteks sosialnya yakni berusaha mengetahui apa dan menjelaskan mengapa (*to describe and to explain*). Sedangkan ilmu pengetahuan sosial (*social studies*) lebih menekankan

pada aspek pendidikannya. Oleh sebab itu, IPS disebut juga Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.

#### **D. Tujuan IPS**

Tujuan mempelajari IPS bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi yaitu dimulai dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang telah dijabarkan terdahulu. Secara hirarki, tujuan pendidikan nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan institusional tiap jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya pencapaian tujuan institusional ini secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan mata pelajaran pada setiap bidang studi dalam kurikulum, termasuk bidang studi IPS. Akhirnya tujuan kurikuler secara praktis operasional dijabarkan dalam tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran.

Barr (1987: 197) tujuan pendidikan nasional menjadi acuan dalam pengembangan tujuan pendidikan IPS. Tujuan pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), secara umum dikemukakan oleh Fenton adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, Clark dalam bukunya "*Social Studies in Secondary School*": *A Hand Book*, menyatakan bahwa IPS menitikberatkan pada perkembangan individu yang dapat memahami lingkungan sosialnya, manusia dengan segala kegiatannya dan interaksi antarmereka. Peserta didik diharapkan dapat menjadi anggota yang produktif, berpartisipasi dalam masyarakat yang merdeka, mempunyai rasa tanggung jawab, tolong menolong dengan sesamanya, dan dapat mengembangkan nilai-nilai dan ide-ide dari masyarakatnya. Menurut Hartono dan

Aziz (1990: 3) IPS bertujuan untuk pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual peserta didik.

IPS sebagai komponen kurikulum sekolah merupakan kesempatan yang baik untuk membina afeksi, kognisi, dan psikomotor pada anak didik untuk menjadi manusia pembangunan Indonesia. Bahan kajian IPS bukanlah hal yang bersifat hafalan belaka, melainkan konsep dan generalisasi yang diambil dari analisis tentang manusia dan lingkungannya. Pengetahuan yang diperoleh dengan pengertian dan pemahaman akan lebih fungsional. Perolehan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki siswa diharapkan dapat mendorong tindakan yang berdasarkan nalar, selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupannya.

Nilai dan sikap merupakan hal yang penting dalam ranah afektif, terutama nilai dan sikap terhadap masyarakat dan kemanusiaan. Sebagai contohnya menghargai martabat manusia dan peka terhadap perasaan orang lain, lebih-lebih lagi nilai dan sikap terhadap negara dan bangsa. Tujuan keterampilan yang dapat diraih dalam pengajaran IPS sangatlah luas. Keterampilan-keterampilan yang dikembangkan sudah barang tentu juga meliputi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh pengetahuan, nilai, dan sikap.

Menurut Bruce Joyce dalam Cheppy (tt: 14-15), ada 3 (tiga) tujuan IPS, yaitu:

1. *Humanistic education*: diharapkan IPS mampu membentuk anak didik untuk memahami segala pengalamannya serta diharapkan lebih mengerti tentang arti kehidupan ini.
2. *Citizenship education*: setiap anak didik harus dipersiapkan untuk mampu berpartisipasi secara efektif di dalam dinamika kehidupan masyarakatnya. masyarakat diliputi segala aktivitas yang menyandarkan setiap warganegara

untuk bekerja secara benar dan penuh tanggungjawab demi kemajuannya.

3. *Intellectual education*: tiap anak didik ingin memperoleh cara dan sarana untuk mengadakan analisis terhadap gagasan-gagasan serta mengadakan pemecahan masalah seperti yang telah dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu sosial. Bersamaan dengan pertumbuhan kemampuannya, anak didik seharusnya belajar untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan serta menguji data secara kritis dalam berbagai situasi sosial.

Dapat disimpulkan bahwa mempelajari IPS di tingkat sekolah yaitu untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang baik (*Good Citizenship*). Warga negara yang baik harus menguasai pengetahuan (*knowledge*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) dan keterampilan (*skill*) yang membantunya untuk memahami lingkungan sosialnya dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pribadi dan masalah sosial, mampu mengambil keputusan serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ditambahkan (Tanwif dkk, 2009: 1-12), tujuan kurikuler IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut:

1. membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat;
2. membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat;
3. membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian;
4. membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental

yang positif, dan keterampilan terhadap lingkungan hidup yang menjadi bagian kehidupannya yang tidak terpisahkan; dan

5. membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Kelima tujuan di atas harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum IPS di berbagai lembaga pendidikan dengan keluasan, kedalaman dan bobot yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.

Menurut Astawa (2017:42), bahwa IPS dirumuskan berlandaskan pada realitas dan fenomena sosial yang diwujudkan dengan pendekatan interdisipliner dari cabang-cabang Ilmu-ilmu sosial. Maka disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran IPS ialah mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri maupun masyarakat.

## **E. Landasan Pengembangan IPS**

Menurut Sapriya (2017: 15-17), IPS sebagai mata pelajaran seyogianya mempunyai landasan dalam pengembangan baik sebagai mata pelajaran maupun pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan pemanfaatan PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Bagaimana dan mengapa struktur dan disiplin ilmu tersebut dibangun dan dikembangkan ke arah,

tujuan, dan sasaran pengembangan dilakukan oleh masyarakat ilmiahnya.

Landasan-landasan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu meliputi landasan filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, pedagogis dan religius.

1. Landasan filosofis

Memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian dan domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu (aspek ontologis). Bagaimana cara, proses dan metode mengembangkan IPS sehingga menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah, valid, terpercaya dan benar. Apa tujuan IPS sebagai disiplin ilmu ini dibangun dan dikembangkan serta digunakan atau apakah manfaat dari IPS ini telah dan akan memperkokoh *body of knowledge* IPS untuk eksis dan berkembang lebih luas lagi. Selama ini dikenal ada empat filsafat pendidikan yang meliputi perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme.

2. Landasan ideologis

Dimaksudkan dengan sistem gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan:

- a. Bagaimana keterkaitan antara *das sein* IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dan *das solen* IPS
- b. Bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan dengan hakikat dan praksis etika, moral, politik dan norma-norma perilaku dalam membangun dan mengembangkan IPS. Menurut O'Neil, ideologi dalam landasan ini telah dan akan memberikan sistem gagasan yang bersifat ideologis

terhadap IPS yang tidak cukup diatasi hanya oleh filsafat yang bersifat umum.

3. Landasan sosiologis

Memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan kepentingan, kekuatan, aspirasi serta pola kehidupan masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori dan prinsip-prinsip IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini akan dan telah memberikan dasar-dasar sosiologis terhadap pranata dan institusi pendidikan dalam proses perubahan sosial yang konstruktif.

4. Landasan antropologis

Memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga relevan dengan pola, sistem dan struktur kebudayaan bahkan pola, sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks. Landasan ini telah dan akan memberikan dasar-dasar sosio-kultural masyarakat terhadap struktur IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial yang konstruktif.

5. Landasan kemanusiaan

Menurunkan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan ialah proses memanusiakan manusia.

6. Landasan politis

Memberikan arah gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan IPS. Peran dan keterlibatan pihak pemerintah dalam landasan ini sangat besar sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari

campur tangan unsur birokrasi.

7. Landasan psikologis

Memberikan gagasan-gagasan mendasar untuk membentuk cara-cara IPS membangun struktur tubuh disiplin pengetahuan, baik dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan entitas-entitas psikologisnya. Hal ini sejalan dengan hakikat dan struktur yang dapat dipelajari, dialami dan didiversifikasi, diklasifikasikan oleh anggota komunitas PIPS berdasarkan kapasitas psikologis dan pengalamannya.

8. Landasan religius

Memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar tentang nilai-nilai, norma, etika, dan moral yang menjadi jiwa pendidikan di Indonesia. Landasan ini telah berlaku sejak zaman Plato hingga Kant yang kemudian diakomodasi oleh Brameld melalui karya-karya khususnya dalam filsafat rekonstruksionisme. Landasan religius ini telah dan akan menolak segala sesuatu yang bersifat relatif semata yang tidak menempatkan agama sebagai landasan berfikir atau kelompok manusia yang merasa menjadi pemenang dalam mengembangkan peradaban manusia. Landasan religius yang diterapkan di Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara pengembangan materi yang berkembang dari *interpretative knowledge*.



# **PERKEMBANGAN IPS PADA KURIKULUM NASIONAL**





# **BAB III**

## **PERKEMBANGAN IPS PADA KURIKULUM NASIONAL**

### **A. Perkembangan IPS di Indonesia**

Lahirnya IPS di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan IPS di Amerika, sehingga IPS di Indonesia banyak memiliki kesamaan dengan Amerika. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriya (2017: 39-46), bahwa perkembangan IPS di dunia khususnya di Amerika Serikat telah banyak memenuhi pemikiran Pendidikan IPS di Indonesia.

Menurut Fatimah (2015:4), penggunaan istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia baru dimulai dengan ditetapkannya Kurikulum Nasional pada tahun 1975 yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Sebelum berlakunya kurikulum 1975 istilah IPS belum ada, walaupun beberapa mata pelajaran yang tergolong ke dalamnya telah diberikan di sekolah-sekolah yang mencakup Sejarah, Ilmu Bumi, Tata Negara dan Ekonomi. Kurikulum 1975 mengelompokkan semua mata pelajaran tersebut ke dalam IPS.

Keberadaan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Sebelum kurikulum 1975, istilah IPS belum lahir, akan tetapi embrio-embrionya sudah ada tapi masih berdiri sendiri-sendiri. Yaitu pada kurikulum tahun 1964 sampai kurikulum 1968,

program pengajaran ilmu-ilmu sosial masih menggunakan cara-cara (pendekatan) tradisional. Ilmu sosial seperti sejarah, geografi (ilmu bumi) dan ekonomi masih disajikan secara terpisah. Sejumlah ahli menyadari bahwa sebenarnya sistem tersebut telah usang dan tidak relevan.

Seperti telah dikemukakan oleh sejumlah pakar bahwa secara embrionik kurikuler, IPS di lembaga pendidikan formal atau sekolah di Indonesia pernah dimuat dalam kurikulum tahun 1947, kurikulum berpusat mata pelajaran terurai tahun 1952, kurikulum 1964, dan kurikulum 1968. Baru dalam kurikulum tahun 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum tahun 1994, IPS telah menjadi salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik.

IPS sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis, karena mempelajari tentang keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya, tidak lepas dari perkembangan. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut:

IPS sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis, karena mempelajari tentang keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya, tidak lepas dari perkembangan. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut:

1. Pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat.
2. Laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia

memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut.

3. Agar *output* pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntutan masyarakat yang ia akan menjadi bagiannya dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat.
4. Segi lain yang menyebabkan dikembangkannya kurikulum IPS sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap anak didik adalah menyiapkan mereka kelak apabila terjun ke dalam kehidupan masyarakat.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka tidak ada lagi kurikulum yang bersifat terpusat (kurikulum nasional). Penyusunan kurikulum menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum saat ini tidak lagi bersifat sentralistik akan tetapi sudah desentralisasi. Dimana Pemerintah pusat menugaskan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) itupun hanya berkewajiban menyusun standar nasional termasuk dalam membuat Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan selanjutnya dikembangkan oleh pihak di bawahnya.

## **B. IPS pada Kurikulum 1945-1964**

Pada kurun waktu tahun 1945-1964 istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi *social studies* menurut Edgar Wesley yang menyatakan bahwa pendidikan IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, *civics*, koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, antropologi di sekolah menengah.

### **C. IPS pada Kurikulum 1964-1968**

Dalam kurikulum 1964, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal. Dimiyati menamakan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial. Dalam kurikulum tersebut, ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah dan *civics*. Pada tahun 1968, terjadi perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat ini mulai diperkenalkan nama pendidikan kewarganegaraan sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan.

Ketika kurikulum 1968 masih berlaku, istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) mulai muncul dalam seminar nasional tentang *Civics Education* tahun 1972 di Tawang Manggu Solo. Menurut Winataputra, dalam laporan seminar tersebut ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar-pakai, yakni pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial, yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa.

IPS sebagai mata pelajaran pertama sekali masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972-1973 yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Pada saat itu, mata pelajaran IPS belum masuk ke dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA. Menurut Winataputra dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum SD PPSP tersebut, IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

## **D. IPS pada Kurikulum 1975 dan 1984**

Sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam sistem kurikulum di Indonesia, IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang ada di tiap jenjang tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran. Ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini ialah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Winataputra kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dalam empat profil sebagai berikut:

1. Pendidikan moral pancasila menggantikan pendidikan kewarganegara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi *citizenship transmision*.
2. Pendidikan IPS terpadu (*integrated*) untuk sekolah dasar.
3. Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi koperasi.
4. Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Dalam kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan tersendiri secara terpisah. Pada hakikatnya, model kurikulum 1984 untuk jenjang SMP dan SMA tidak banyak mengalami perubahan

karena sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Demikian pula untuk jenjang SD, mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan artinya kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 1975.

## **E. IPS pada Kurikulum 1994**

Pada Kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan UU tersebut muncul kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedudukan PPKn ini masih tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkup IPS khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang (SD, SMP, dan SMA). Untuk mata pelajaran IPS, kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut:

1. Mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu (*integrated*) dan berlaku untuk kelas III s.d kelas VI sedangkan untuk kelas I dan II tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri
2. Mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencakup geografi, sejarah dan ekonomi koperasi
3. Mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah (*saparated*) atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk kelas I dan II, ekonomi dan geografi untuk kelas I dan II, sosiologi kelas II, sejarah budaya untuk kelas III program bahasa, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi untuk kelas III program IPS.

Khusus untuk IPS SD, materi pelajaran dibagi atas dua bagian, yakni materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Materi

pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi dan politik atau pemerintahan sedangkan cakupan materi sejarah meliputi sejarah lokal dan sejarah nasional. Tujuannya ialah untuk mengembangkan pengetahuan siswa dan keterampilan dasar yang akan digunakan dalam kehidupannya serta meningkatkan rasa nasionalisme dari peristiwa masa lalu hingga masa sekarang agar para siswa memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Karena IPS untuk SMP dan SMA menganut pendekatan konfederasi dan terpisah-pisah maka tujuannya disesuaikan dengan karakteristik tiap mata pelajaran yang terpisah-pisah. Tujuan mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk SMA, misalnya adalah untuk menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia.

Mata pelajaran ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan objektif. Mata pelajaran sosiologi memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul sehubungan dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Mata pelajaran geografi bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul sebagai akibat interaksi antara

manusia dengan lingkungannya. Adapun mata pelajaran tata negara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peralihan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistem pemerintahan Negara RI maupun negara lain.

## **F. IPS dalam Kurikulum 2004 (KBK)**

Memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setelah perubahan kurikulum 1994 secara tambal sulam yakni melalui perubahan dengan diberlakukannya Kurikulum Suplemen ternyata dirasakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh pusat pengembangan kurikulum Depdiknas mengadakan berbagai uji coba model kurikulum. Pada saat itu digulirkan pula gagasan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sempat mendapat tanggapan pro kontra tetapi nama KBK menjadi sangat populer karena gemanya bukan hanya terjadi di jenjang sekolah melainkan hingga ke berbagai jenjang dan jenis pendidikan bahkan tingkat perguruan tinggi.

Pada tahun 2003 disahkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut ialah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional

Pendidikan (SNP).

Peraturan Pemerintah di atas, menjelaskan bahwa standar nasional ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. menurut pasal 35 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya Standar Nasional Pendidikan telah berimplikasi terhadap sejumlah kebijakan bidang pendidikan yang lebih rendah.

Sementara itu dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup standar nasional meliputi:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian pendidikan

Dalam pasal 37 Undang-undang Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dikemukakan pada bagian penjelasan UU Sisdiknas Pasal 37 bahwa bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dengan adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan

IPS sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia telah menjadikan kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh. Hal ini sekaligus menjawab berbagai keraguan dan kekhawatiran yang pernah dialami oleh akademisi dan praktisi IPS di berbagai lembaga pendidikan pada saat sebelum lahirnya undang-undang.

Pada saat itu, yakni sebelum lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 muncul sejumlah gagasan yang dilontarkan tentang perlunya perubahan nama sejumlah mata pelajaran sekolah dengan alasan jumlah mata pelajaran sekolah agar lebih ramping. Salah satu target perubahan tersebut ialah mata pelajaran IPS dan PPKn terutama di jenjang SD dan SMP.

Nama yang ditawarkan antara lain mata pelajaran Pengetahuan Sosial (PS) yang isi di dalamnya memuat materi pendidikan kewarganegaraan dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sementara mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PPKn) dihilangkan. Dalam gagasan lain, memunculkan nama Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial (PKPS) yang mengandung muatan sama dengan Pengetahuan Sosial di atas. Pada jenjang SMP dan SMA nama mata pelajaran PPKn diubah menjadi mata pelajaran Kewarganegaraan.

Perubahan nama mata pelajaran ini bahkan sudah diuji coba di berbagai daerah dan LPTK serta divalidasi oleh para guru dan ahli terkait. Hasilnya ialah dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan mata pelajaran yang ada disebut Pengetahuan Sosial, ada yang dinamakan mata pelajaran Kewarganegaraan, dan ada yang berlabel Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial untuk SD dan SMP bahkan telah dicetak, diedarkan dan dilaksanakan pada sejumlah sekolah padahal tidak pernah disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas RI).

## **G. IPS pada Kurikulum 2006 (KTSP)**

Setelah disahkan UU No. 20/2003 yang diakui oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengamanatkan perlu adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka pengembangan kurikulum mata pelajaran sekolah umumnya dan khususnya untuk mata pelajaran IPS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi dan Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

## **H. IPS pada Kurikulum 2013 (K 13)**

Kurikulum 2013 disusun dengan maksud antara lain untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif dalam penyelesaian masalah sosial di masyarakat. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Pola pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang semula satu arah, menjadi pembelajaran interaktif.

Dalam kurikulum 2013 terdapat empat perubahan penting dibanding kurikulum sebelumnya. Perubahan tersebut meliputi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan Standar penilaian.

Kurikulum 2013, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tetap diberlakukan, walaupun kurikulum ini sempat direvisi kembali sehingga pemakaian kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah/madrasah.

Berdasarkan kurikulum 2013 IPS untuk Pendidikan Dasar (SD)

IPS disajikan secara tematik, untuk tingkat SMP IPS disajikan secara terpadu, sedangkan untuk tingkat SMA IPS diberikan sebagai mata pelajaran yang terpisah yang terdiri dari Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi.

# **IPS SEBAGAI ILMU SOSIAL DAN KAJIAN SOSIAL**





# BAB IV

## IPS SEBAGAI ILMU SOSIAL DAN KAJIAN SOSIAL

### A. IPS Sebagai Ilmu Sosial

Sebelum dijelaskan IPS sebagai ilmu sosial (*social science*), maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang ilmu sosial (*social science*).

Dari sisi bahasa, ilmu sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu *social science*. Kata *social* berarti sosial sedang kata *science* bermakana ilmu. Dengan demikian, secara literal *social science* mempunyai makna ilmu sosial. Dari sisi istilah, sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat dan rumusan yang jelas di antara para ahli berkenaan dengan batasan atau pengertian *social science* (ilmu-ilmu sosial) (Tanwif, dkk, 2009: 4-8).

Mukmina (2008 : 7) mendefinisikan ilmu sosial sebagai ilmu yang bidang kajiannya berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya. Termasuk dalam ilmu sosial adalah geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikolog, dan ilmu politik, yang pada umumnya merupakan hasil kebudayaan manusia.

Dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat, problem-problem dalam masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Senada dengan kesimpulan tersebut.

Supardan (2011:30) mendefinisikan ilmu sosial ialah suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk tunggal ilmu sosial menunjukkan sebuah komunitas dan pendekatan yang saat ini hanya diklaim oleh beberapa orang saja, sedangkan bentuk jamaknya. Ilmu-ilmu sosial mungkin istilah tersebut merupakan bentuk yang lebih tepat. Ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah walaupun di satu sisi ia termasuk ilmu hamania.

Menurut Astawa (2017: 23-25), ilmu sosial ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat.

Dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Ilmu Sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai masyarakat, dan bagaimana seharusnya menjadi anggota masyarakat.

Hingga saat ini sebenarnya definisi dari ilmu sosial sampai belum terdapat kesatuan pendapat dan rumusan yang jelas di antara para ahli berkenaan dengan batasan atau pengertian *social science* (ilmu-ilmu sosial). Berikut beberapa pendapat ahli, diantaranya:

1. *Nursid Sumaatnadja*, menyatakan bahwa ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat.
2. *Achmad Sanusi*, Memberikan batasan tentang Ilmu Sosial adalah sebagai berikut: Ilmu Sosial terdiri disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya

dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah.

3. *Gross*, Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk.
4. *Peter Herman*, Sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan.
5. *Ralf Dahrendorf*, seorang ahli sosiologi Jerman merupakan suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk tunggal ilmu sosial menunjukkan sebuah komunitas dan pendekatan yang saat ini hanya diklaim oleh beberapa orang saja, sedangkan bentuk jamaknya, ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial mencakup Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Ekonomi, Geografi Sosial, Politik, bahkan Sejarah walaupun di satu sisi ia termasuk ilmu humaniora.

Dapat disimpulkan bahwa semua materi IPS berasal dari fusi dan integrasi Ilmu-ilmu Sosial yang disesuaikan, disederhanakan, dan dipilih sesuai tujuan intruksional disekolah. *Social science* merupakan sumber IPS, sebab materi-materi IPS berasal dari Ilmu-ilmu Sosial atau *Social Science*. Dengan demikian, IPS bukan Ilmu Sosial, tetapi IPS merupakan mata pelajaran yang menggunakan bagian-bagian tertentu dari Ilmu-ilmu Sosial.

Somantri (2001: 20) mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari ilmu-ilmu sosial sebagai berikut:

1. Berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah

2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya.
3. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan fundamental ide.
4. Teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan *syntactis* yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data (observasi dan eksperimen).
5. Setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini dan masa depan serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik.

Selain mengkaji perilaku manusia, disiplin ilmu-ilmu sosial memandang situasi peristiwa umat manusia dari perspektif yang agak berbeda dan unik. Karena ada perbedaan persepsi maka metodologi dan teknik penelitiannya pun berbeda. Setiap disiplin ilmu sosial memiliki konsep-konsep, generalisasi dan teori yang dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan desain maupun dalam pelaksanaan proses belajar mengajar IPS pada sekolah dasar dan menengah.

Para ahli ilmu-ilmu sosial telah memerinci sekitar 8 disiplin ilmu sosial yang mendukung untuk pengembangan program *social studies* yang meliputi: antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi dan sosiologi. Pada hakikatnya, semua disiplin ilmu sosial tersebut memiliki objek kajian yang sama yakni manusia.

Kontribusi ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan pendidikan IPS dalam kurikulum sekolah tidak diragukan lagi sebagaimana pentingnya teori dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial. Namun, perlu ada klarifikasi tentang teori, khususnya teori ilmu sosial dalam konteks IPS. Banyak ahli yang menyarankan agar para pengembang kurikulum melakukan identifikasi terhadap teori-teori ilmu sosial yang dapat membantu para siswa dalam mengambil keputusan dan belajar konsep dan generalisasi.

Selanjutnya dijabarkan pengertian IPS sebagaimana pendapat Sapriya (2017: 19-20), istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah *social studies* dalam kurikulum persekolahan di negara lain seperti Amerika Serikat. Nama IPS merupakan istilah hasil kesepakatan dari para ahli atau pakar di Indonesia tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. IPS sebagai mata pelajaran di persekolahan, pertama kali digunakan dalam kurikulum 1975. Pada Kurikulum 1975 IPS didefinisikan sebagai bidang studi merupakan paduan atau fusi dari sejumlah mata pelajaran sosial.

IPS adalah bidang studi yang menghormati, mempelajari, mengolah dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah *human relationship* (hubungan antar manusia) hingga benar-benar dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan bentuk terpadu dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, dan disederhanakan sesuai dengan kepentingan sekolah-sekolah. (Pedoman IPS-IKIP Surabaya). Dapat juga dikatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu sosial.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa IPS adalah pelajaran atau bidang studi yang merupakan fusi

(paduan) dan integrasi ilmu sosial. Ilmu sosial yang dikemas dengan materi yang sederhana, menarik, mudah dimengerti dan dipelajari untuk tujuan instruksional di sekolah.

Namun, pengertian IPS di tingkat persekolahan itu sendiri mempunyai perbedaan makna, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik khususnya antara IPS untuk Sekolah Dasar (SD) dengan IPS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan IPS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengertian IPS di persekolahan tersebut ada yang berarti nama mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada yang berarti gabungan (*integrated*) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu, dan ada yang berarti program pengajaran. Perbedaan ini dapat pula diidentifikasi dari perbedaan pendekatan yang diterapkan pada masing-masing jenjang persekolahan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa IPS sebagai ilmu sosial (*social science*) karena materi IPS berasal dari fusi dan integrasi ilmu-ilmu sosial yang disesuaikan, disederhanakan, dan dipilih sesuai tujuan intruksional di sekolah. *Social science* merupakan sumber IPS, sebab materi-materi IPS berasal dari ilmu-ilmu sosial (*social science*).

## **B. IPS Sebagai Kajian Sosial**

Kajian sosial (*social studies*) pada dasarnya sama dengan ilmu pengetahuan sosial. Dalam sejarahnya, *social studies* berasal dari Amerika, yang berpenduduk multiras dan multibudaya, sama halnya dengan Indonesia. Beberapa pendapat tentang definisi *social studies* adalah sebagai berikut.

1. Leonard S. Keaworthe mengatakan bahwa *social studies are the study of people carried on in order to help student understand themselves and others in a varieties of societies in different places and at different times as individual and group seek to meet the*

*need through many institutions as those human beings search for a satisfying a personal philosophy and the good society;*

2. U.S. Bureau of Education dalam *The Social Studies in Secondary Education* menyatakan: *the social studies are understand to be those whose subject matter relative directly to the organization and development of human society and to man as a member of social group;*
3. Edgar B Wesley (1962 : 9) mengatakan bahwa *the social studies are the social sciences simplified for paedagogical purposes in school. The social studies consist of geography, history, economic, sociology, civics and various combination of these subjects.*
4. Menurut kurikulum 1975, ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang merupakan paduan (fusi) dari sejumlah mata pelajaran sosial. Di sekolah lanjutan, mata pelajaran sosial sebagian terpisah ke dalam mata pelajaran yang mandiri seperti geografi dan kependudukan, sejarah, ekonomi dan koperasi, antropologi, serta tata buku dan hitung dagang.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *social studies* atau ilmu pengetahuan sosial adalah kajian tentang konsep ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk terwujudnya warga negara yang baik dan bermartabat.

Akhirnya dapat dikatakan IPS bukan sekadar pengetahuan, tetapi merupakan kajian yang disusun dan diorganisasikan secara baik menurut kepentingan pendidikan dan pengajaran. IPS berada di tengah-tengah antara ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan sosial.

### **C. Persamaan dan Perbedaan IPS sebagai Ilmu Sosial dan Kajian Sosial**

Menurut Edgar B Wesley (Mukmina dkk. 2002 : 17), persamaan

antara *social studies* dengan *social sciences* terletak pada sasaran yang diselidiki yaitu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya membahas masalah yang timbul akibat hubungan (*interrelationship*) manusia. Dengan kata lain, keduanya mempelajari masyarakat manusia.

Perbedaan penting antara ilmu-ilmu sosial dengan pengetahuan sosial terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah, dengan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Sementara itu, tujuan ilmu pengetahuan sosial bersifat pendidikan, bukan penemuan teori ilmu sosial. Orientasi utama studi ini adalah keberhasilannya mendidik dan membuat siswa mampu mengerjakan ilmu pengetahuan sosial, berupa tercapainya tujuan intruksional.

Dari uraian tersebut, ilmu pengetahuan sosial menggunakan bagian-bagian ilmu sosial guna kepentingan pengajaran. Untuk itu, berbagai konsep dan generalisasi ilmu sosial harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami murid-murid yang umumnya belum matang untuk mempelajari ilmu-ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan *social sciences* dan *social studies* terletak pada sasaran yang diselidiki yaitu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi, sedangkan *social studies* bersifat pendidikan.

Secara singkat disini dikemukakan bahwa letak perbedaan antara Ilmu Sosial (IS) dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari *level*-nya, Ilmu Sosial (IS) diberikan di tingkat Perguruan Tinggi, sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diberikan di tingkat sekolah.

2. Dilihat dari *scope dan size*-nya Ilmu Sosial jauh lebih luas dibanding Ilmu Pengetahuan Sosial.
3. Dilihat dari *level of difficulty*-nya, Ilmu Sosial menyelidiki anekaragam *human relationship* yang serba kompleks dan seringkali berhubungan dengan hal-hal yang abstrak dan data-data, konsep-konsep, dan generalisasi yang serba sulit, sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial konsep dan generalisasi perlu di sedehanakan agar lebih muda di pahami oleh siswa.
4. Dilihat dari *purepose*-nya, Ilmu sosial menetapkan kebenaran Ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada Ilmu Pengetahuan Sosial mengarah pada penanaman BASK (*Behavior, Attitude, Skill, dan Knowledge*).
5. Dilihat dari *approach*, pendekatan Ilmu Sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi obyek studi berdasarkan bidang Ilmu masing-masing, sedangkan pada pendekatan Ilmu Pengetahuan Sosial bersifat interdisipliner.
6. Kerangka kerja Ilmu Sosial diarahkan kepada pengembangan teori dan prinsip ilmiah, sedangkan kerangka kerja IPS lebih diarahkan kepada arti praktisnya dalam mencari alternatif pemecahan masalah Sosial dan dalam menyusun alternatif pengembangan kehidupan ke taraf yang lebih tinggi.



# **HUBUNGAN IPS DAN ILMU SOSIAL**





# BAB V

## HUBUNGAN IPS DENGAN ILMU SOSIAL

### A. Hubungan IPS dan Ilmu Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah bidang studi yang merupakan paduan (fusi) dari sejumlah mata pelajaran sosial, IPS juga dikatakan sebagai suatu sarana mata pelajaran yang menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu-ilmu sosial. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti: 1) Ilmu-ilmu sosial manakah yang dapat dipadukan, dan mempunyai keterkaitan dalam proses pembelajaran?, dan 2) Bagaimana cara memadukannya?, sebab tidak semua materi ilmu sosial dapat dipadukan, 3) Bagian-bagian apa sajakah yang perlu bagi pembelajaran IPS?.

Secara konseptual hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, disiplin ilmu-ilmu sosial dijadikan kerangka utama berfikir dalam mengembangkan kurikulum. *Kedua*, bahan IPS dikembangkan terlebih dahulu, serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial untuk kemudian diidentifikasi konsep-konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik.

Setiap disiplin ilmu memiliki struktur menurut Jarome S. struktur ilmu menyangkut saling berhubungan antara ide-ide dasar dari disiplin ilmu yang bersangkutan, yang memiliki dua dimensi yaitu:

1. Dimensi konsepsional, meliputi konsep-konsep tertentu prinsip-prinsip generalisasi, pengertian dan ide-ide yang mendasari disiplin ilmu yang bersangkutan.
2. Dimensi metodologis meliputi perorganisasian, metode penelitian, pendekatan yang ditentukan oleh disiplin ilmu yang bersangkutan.

Hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial sangat berkaitan, keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian kebutuhan dasar tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Kegiatan dasar manusia meliputi produksi dan konsumsi, pemeliharaan dan perlindungan, konsumsi dan transport, estetika, pemerintahan dan organisasi, dan pendidikan dan rekreasi.

Ilmu Pengetahuan Sosial dapat memegang peranan yang penting dalam pendidikan sosial, karena memberi kesempatan untuk memahami hubungan antar manusia secara lebih sistematis dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan sosial lebih luas dari pada Ilmu Pengetahuan Sosial dan tidak terbatas pada salah satu bidang kurikulum, atau pada pendidikan didalam sekolah.

Ilmu-ilmu sosial yang banyak memberi sumbangan kepada Ilmu Pengetahuan Sosial adalah Geografi, Sejarah, dan Pendidikan Moral Pancasila. Disamping itu banyak diperlukan bahan dari Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, Ekonomi, Psikologi, Filsafat bahkan adakalanya juga Ilmu Pengetahuan Alam.

Untuk memberi gambaran yang lebih sederhana, di bawah ini disajikan berbagai ilmu sosial dengan berbagai obyek penyelidikannya yang digunakan dan dikaji dalam IPS. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Ilmu Sosial dan Objek Kajiannya pada IPS**

No	Nama Ilmu	Obyek Penyelidikan
1	Sosiologi	Mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota kelompok; sosiologi mempelajari pola tingkah laku manusia dalam hubungannya individu lain dan dengan kelompok, konsep utamanya interaksi.
2	Antropologi	Mempelajari budi daya manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Konsep utamanya adalah kebudayaan.
3	Sejarah	Mempelajari berbagai segi kehidupan manusia dalam tahapan waktu. (dari masa ke masa). Konsep utamanya adalah kronologi (urutan berdasarkan waktu: zaman, tahun, periode).
4	Geografi	Mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan ruang, tempat, dan lingkungan fisiknya. Konsep utamanya wilayah ( <i>region</i> )
5	Ekonomi	Mempelajari kegiatan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhannya, khususnya yang menyangkut pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan teknologi yang tersedia. Konsep utamanya kelangkaan ( <i>scarcity</i> ).

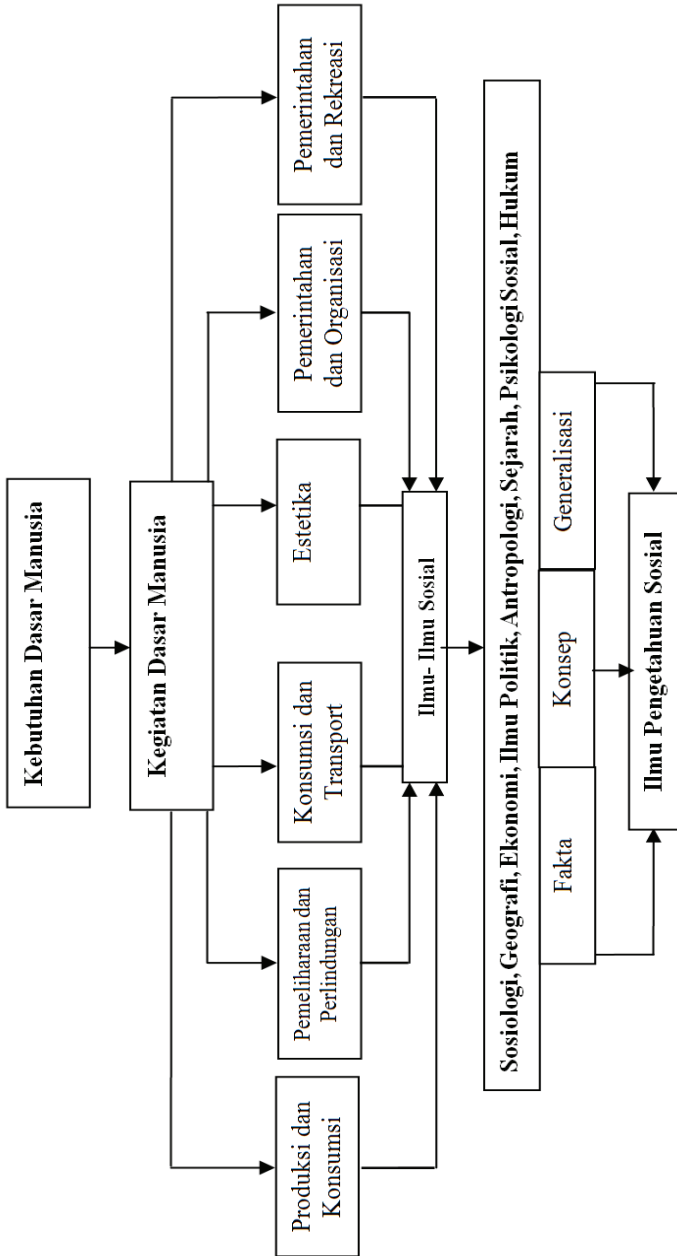
6	Ilmu politik	Mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mendapatkan pengaruh dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil, maupun kelompok yang lebih luas (nasional dan internasional). Konsep utamanya kekuasaan ( <i>power</i> ).
7	Psikologi	Mempelajari segi kejiwaan manusia sebagai individu. Konsep utamanya jiwa.

Maka IPS dapat diartikan sebagai program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan. Pada dasarnya mempersoalkan manusia dalam lingkungan fisik dan dalam lingkungan sosialnya. Bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial, seperti Geografi, Sejarah, Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Politik, dan Psikologi serta dari realita masyarakat.

Dengan kata lain, IPS merupakan cabang dari Ilmu-ilmu Sosial. IPS dirumuskan berdasarkan realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan *interdisipliner* dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, hukum, politik dan budaya.

Untuk itu guru pada bidang IPS harus dapat memanfaatkan materi-materi dari ilmu sosial di atas. Guru harus menaruh perhatian yang penuh kepada apa yang diuraikan dan disajikan pada mata pelajaran yang termasuk ilmu sosial. Jika guru telah menaruh minat yang besar terhadap materi yang diajarkan, maka peserta didik akan menaruh minat yang besar. Oleh sebab itu, buku-buku ilmu sosial harus diminati dan dijadikan sumber pengajaran oleh guru dan murid.

Untuk melihat bagaimana akhirnya IPS disusun dari Ilmu Sosial, yang kemudian dapat kita simpulkan hubungan antara keduanya, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1: Hubungan IPS dan Ilmu Sosial (Mukmina dkk, 2002: 38)

## **B. Hubungan IPS dengan Ilmu Sosiologi**

Sosiologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “logos, *socius* berarti kawan, sekutu, sahabat, rukun, masyarakat atau anggota persekutuan sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Objek sosiologi dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek segala proses kehidupan manusia dalam kelompoknya, proses pembentukan, perkembangan dan keruntuhan sistem hidup manusia dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan antar manusia.

Tujuan sosiologi yaitu untuk mengenal konsep-konsep dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerja sama. Dalam masyarakat yang majemuk.

Jadi hubungan IPS dengan Ilmu Sosial adalah IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan IPS dan sosiologi dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS. Sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2: Hubungan IPS dan Sosiologi**

<b>Konsep Dasar Disiplin Ilmu</b>	<b>Generalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosiologi</li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Peran</li> <li>- Norma</li> <li>- Saksi</li> <li>- Nilai</li> <li>- Status Kebudayaan</li> <li>- Lembaga</li> <li>- Komunitas</li> <li>- Interaksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sosiologi adalah studi tentang masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antara individu dan masyarakat, serta mempelajari hubungan sosial, pranata dan masyarakat.</li> <li>➤ Semua perilaku manusia dipelajari dari orang ke orang melalui transaksi kelompok.</li> <li>➤ Setiap masyarakat mengembangkan kebudayaan masing-masing.</li> <li>➤ Kebudayaan menyediakan aturan main dalam kehidupan bermasyarakat dan kekuasaan yang disebut kelas-kelas sosial.</li> <li>➤ Setiap masyarakat mengembangkan pranata untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.</li> <li>➤ Masyarakat selalu berubah.</li> </ul>

Diadopsi dari Mukmina dkk. (2002: 62-77).

### **C. Hubungan IPS dengan Geografi**

Geografi berasal kata “Geo” yaitu bumi, dan “Grhapien” yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Secara keseluruhan geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer mencakup objek permukaan bumi dan bagian-bagian bumi. Dapat diketahui bahwa geografi senantiasa memberikan uraian ilmiah mengenai sifat-sifat bumi dan gejala yang ada, termasuk sebab dan gejala alam yang ada serta akibatnya bagi kehidupan manusia. Di samping itu juga berusaha menganalisa berbagai kondisi yang terjadi di muka bumi untuk disesuaikan dengan kebutuhan manusia.

Konsep dasar Geografi dalam IPS diartikan pada penelaahan geografi selalu ditinjau dari kaitan faktor-faktor geografi dengan kepentingan kehidupan sosial manusia dipermukaan bumi. Menelaah sesuatu gejala dan masalah sosial dengan tidak dihubungkan aspek serta ruang geografisnya, tidak akan dapat mengungkapkan gejala dan masalah itu lebih jauh. Metode dan pendekatan geografi membantu untuk lebih mengerti gejala dan masalah yang sedang dipelajari.

Singkatnya, IPS mengambil materi geografi yang berkaitan dengan ruang bumi, garis lintang, bujur, arah, jarak, lokasi ruang, kondisi alam, tata lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi antar bangsa dan manusia dengan lingkungan.

Geografi yang mengungkapkan kesuburan tanah, jenis dan penyebaran tanah jenis mata pencaharian penduduk, jenis dan penyebaran sumber daya, transportasi-komunikasi, iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan, pemukiman, tenaga air, globe, peta dan lain-lain harus menjadi sumber dari materi IPS.

Hubungan IPS dan Geografi dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS. Sebagaimana terlihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3: Hubungan IPS dan Geografi**

<b>Konsep Dasar Disiplin Ilmu</b>	<b>Generalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geografi</li> <li>- Lokasi Wilayah</li> <li>- Interaksi Keruangan</li> <li>- Pola keruangan</li> <li>- Lingkungan manusia</li> <li>- Struktur internal kota</li> <li>- Dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sosilogi adalah studi tentang penyebaran gejala-gejala pada ruang bumi</li> <li>➤ Garis lintang, bujur, arah, skala, dan jarak digunakan untuk memberikan gambaran tentang lokasi ruang</li> <li>➤ Lokasi dipermukaan bumi ditentukan oleh kondisi alam, tata lingkungan, sumber daya.</li> <li>➤ Interaksi antar bangsa dapat terjadi bila gagasan, prilaku, dan objek penyebab dapat menyebar dalam masyarakat.</li> <li>➤ Manusia dan lingkungan saling tergantung.</li> </ul>

Diadopsi dari Mukmina dkk. (2002: 62-77).

#### **D. Hubungan IPS dengan Ekonomi**

Ekonomi adalah tindakan manusia yang di tunjukkan untuk mencari kemakmurannya. Alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi, yaitu berusaha mencapai hasil yang sebenar-benarnya. Ekonomi mengungkapkan usaha memenuhi kebutuhan materi dari sumber daya dan modal

yang terbatas, produksi bahan kebutuhan, pengangkutannya, distribusi dan lain-lain.

Adapun hubungannya dengan IPS mengambil materi ilmu ekonomi terkait dengan usaha manusia mencapai kemakmuran dan gejala-gejala serta hubungan yang timbul dari usaha tersebut, kemudian materi pelajaran IPS itu digunakan untuk mengembangkan pengertian kepada anak didik bahwa hubungan dasar sistem ekonomi dengan cara hidup manusia yang selanjutnya juga dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang wajar bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Mata pelajaran ekonomi yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan materi dari sumber daya dengan modal yang terbatas, produksi bahan kebutuhan, pengangkutannya, distribusinya dan lain-lain kegiatan usaha saling memenuhi kebutuhan antara berbagai kelompok manusia di antara berbagai daerah menjadi sumber dan materi IPS. Ilmu ekonomi dan mata pelajaran ekonomi mendidik para siswa dapat memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang terbatas, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Proses produksi dengan distribusinya yang menggunakan berbagai cara menjadi materi yang berharga bagi pengajaran IPS. Perdagangan, pengangguran, kelaparan dan lain-lain ialah peristiwa-peristiwa ekonomi sehari-hari yang dapat dijadikan sumber dan materi pelajaran IPS untuk mengembangkan pengertian anak didik kepada hubungan dasar sistem ekonomi dengan cara hidup manusia yang selanjutnya juga dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang wajar bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Hubungan IPS dan Ekonomi dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS. Sebagaimana terlihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4: Hubungan IPS dan Ekonomi**

<b>Konsep Dasar Disiplin Ilmu</b>	<b>Generalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi</li> <li>- Kelangkaan produksi</li> <li>- Jasa</li> <li>- Saling Ketergantungan</li> <li>- Pembagian kerja</li> <li>- Pertukaran sirkulasi</li> <li>- Pendapatan</li> <li>- Efisiensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ekonomi adalah studi tentang usaha manusia untuk mencapai kemakmuran serta gejala-gejala dan hubungan yang timbul dari usaha tersebut.</li> <li>➤ Sumber daya terbatas, kebutuhan tidak terbatas.</li> <li>➤ Setiap orang terikat antara yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan.</li> <li>➤ Harus ada prioritas dan pilihan dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa.</li> <li>➤ Ada persaingan sehat dan bebas dalam usaha mewujudkan sistem ekonomi yang bebas</li> <li>➤ Kerjasama antar Negara penting.</li> </ul>

Diadopsi dari Mukmina dkk. (2002: 62-77).

## **E. Hubungan IPS dengan Ilmu Politik**

Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Semua ilmu sosial memiliki objek yang sama yaitu manusia sebagai makhluk individu maupun kelompok. Dengan hal tersebut sangat membuktikan bahwa ilmu politik juga mempunyai hubungan erat dengan IPS yang sasaran yang diselidiki manusia dalam kehidupan masyarakat.

Adapun hubungan IPS dengan materi ilmu politik yang membahas usaha manusia mengorganisasikan kekuasaan dalam mengatur manusia, serta mengatur dan menyelenggarakan kepentingan rakyat bangsa.

Hubungan IPS dan Ilmu Politik dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS. Sebagaimana terlihat pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5: Hubungan IPS dan Ilmu Politik**

<b>Konsep Dasar Disiplin Ilmu</b>	<b>Generalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik</li> <li>- Politik dan hukum publik</li> <li>- Hukum dan perilaku politik</li> <li>- Kontrol sosial</li> <li>- Negara</li> <li>- Kekuasaan</li> <li>- Otoritas</li> <li>- Kelompok peminat</li> <li>- Sosialisasi politik</li> <li>- Budaya politik</li> <li>- dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ilmu Politik adalah studi tentang usaha manusia untuk mengorganisasikan kekuasaan untuk mengatur manusia dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat dan bangsa, serta pembentukan dan pembagian kekuasaan.</li> <li>➤ Undang-undang dan hukum menjamin stabilitas dan kontrol sosial, kebersamaan, kemerdekaan individu, dan membatasi tingkah laku yang membahayakan kehidupan.</li> <li>➤ Pemerintah dibutuhkan karena manusia saling tergantung.</li> <li>➤ Politik bisa terjadi di masyarakat, sekolah, dan pemerintah.</li> <li>➤ Kekuasaan merupakan energi dari sistem politik</li> <li>➤ Otoritas adalah kekuasaan yang sah.</li> <li>➤ Standar etika penting dalam sistem politik</li> <li>➤ Hukum adalah alat tanpa kekerasan untuk mengendalikan dan menyelesaikan masalah-masalah politik.</li> </ul>

Diadopsi dari Mukmina dkk. (2002: 62-77).

## F. Hubungan IPS dengan Antropologi

Antropologi yang mengungkapkan bagaimana kemampuan manusia menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangannya dari keadaan yang sederhana kepada keadaan yang makin maju, merupakan sumber dan materi yang harus dipelajari pada pengajaran IPS. Adapun hubungannya dengan IPS ialah IPS mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil budidaya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha meningkatkan kehidupan baik aspek lahiriah maupun batiniah.

Hubungan IPS dan Antropologi dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS. Sebagaimana terlihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6: Hubungan IPS dan Antropologi**

<b>Konsep Dasar Disiplin Ilmu</b>	<b>Generalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antropologi</li> <li>- Ruang kegiatan manusia</li> <li>- Interaksi manusia</li> <li>- Antropologi budaya</li> <li>- Kebudayaan</li> <li>- Unsur kebudayaan</li> <li>- Wilayah budaya</li> <li>- Alkulturasasi</li> <li>- Tradisi</li> <li>- Benda-benda budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala wujud hasil budi daya manusia dalam menjaga eksistensinya dan usaha meningkatkan kehidupan, baik dalam aspek lahiriah maupun bathiniah, serta mempelajari kebudayaan umat manusia dalam hubungan kelompok dan ruang.</li> <li>➤ Tokoh manusia dapat mengubah manusia.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manusia</li> <li>- Manusia dan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kebudayaan merupakan keseluruhan dari tata kehidupan yang dibentuk oleh kelompok-kelompok manusia.</li> <li>➤ Keluarga adalah unit dasar masyarakat dalam penyebaran kebudayaan.</li> <li>➤ Kebudayaan manusia merupakan dari hasil faktor keturunan dan lingkungan.</li> <li>➤ Kebudayaan berubah karena penyesuaian manusia pada lingkungan.</li> </ul>
--	--

Diadopsi dari Mukmina dkk. (2002: 62-77).

## **G. Hubungan IPS dengan Sejarah**

Sejarah dengan proses sejarah yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa kehidupan berdasarkan kurun waktunya merupakan sumber dan materi IPS yang sangat berharga. Melalui materi dan pengungkapan sejarah kita dapat memupuk aspirasi anak didik tentang kesenian, kebudayaan dan kehidupan pada umumnya. Melalui materi sejarah anak didik akan dapat menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk kita membela kebenaran dan hak asasi manusia. Melalui proses sejarah ini kita tidak hanya dapat mengerti peristiwa-peristiwa kehidupan masa yang lampau dan masa kini yang sedang kita alami, melainkan kita juga mampu memperhitungkan kejadian-kejadian di masa yang datang.

Sejarah termasuk ilmu-ilmu sosial. Sejarah menempati ke-

dudukan yang khas, fokus kajian sejarah adalah manusia (individu atau kelompok masyarakat) yang hidup disuatu tempat tertentu pada suatu waktu (temporal) tertentu. Faktor inilah yang paling membedakan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hubungan IPS dengan sejarah yaitu IPS mengambil materi dari ilmu sejarah yang terkait dengan cara hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lalu.

Hubungan IPS dan Sejarah dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS. Sebagaimana terlihat pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7: Hubungan IPS dan Sejarah**

<b>Konsep Dasar Disiplin Ilmu</b>	<b>Generalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejarah</li> <li>- Perubahan kontinuitas</li> <li>- Manusia</li> <li>- Ruang</li> <li>- Waktu</li> <li>- Ada konflik</li> <li>- Revolusi</li> <li>- Kehidupan Negara</li> <li>- Nasionalisme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sejarah adalah studi tentang cara penduduk, kelompok manusia, memperoleh dan mengorganisir kepentingan di masa lampau.</li> <li>➤ Masyarakat/manusia selalu mengalami perubahan terus-menerus.</li> <li>➤ Pengalaman manusia selalu berlanjut dan saling berhubungan. Kejadian-kejadian dipengaruhi oleh situasi yang mendahului.</li> <li>➤ Umat manusia adalah hasil dari masa lalu.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Analogi antara manusia masa lalu dan masa kini merupakan pemahaman yang berharga bagi perubahan masyarakat.</li> <li>➤ Setiap kejadian bersifat hanya sekali dan tidak mungkin terjadi lagi.</li> <li>➤ Perubahan peristiwa merupakan sebab akibat.</li> </ul>
--	---

Diadopsi dari Mukmina dkk. (2002: 62-77).

## H. Hubungan IPS dengan Psikologi Sosial

Psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Objek studi psikologi ini adalah tingkah laku manusia di masyarakat sebagai ungkapan proses mental, kejiwaan yang meliputi kemauan, minat, aksi emosional, kecerdasan dan seterusnya, termasuk pembentukan kepribadiannya. Kalau sosiologi lebih memperhatikan peranan seseorang dalam kehidupannya di masyarakat sebagai hasil adanya interaksi sosial, sedangkan perhatian psikologi sosial lebih terarah pada tingkah lakunya yang merupakan ungkapan perpaduan proses kejiwaan dengan rangsangan dari lingkungannya sebagai makhluk sosial. Hubungan IPS dengan Psikologi sosial yaitu IPS mengambil materi psikologi sosial yang mempelajari perilaku individu, kelompok, dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan dan spekulasi.

Hubungan IPS dan Psikologi Sosial dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS. Sebagaimana terlihat pada tabel 8 berikut:

**Tabel 8: Hubungan IPS dan Psikologi Sosial**

<b>Konsep Dasar Disiplin Ilmu</b>	<b>Generalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikologi</li> <li>- Psikologi sosial</li> <li>- Kejiwaan manusia</li> <li>- Konsep diri/ individu</li> <li>- Persepsi</li> <li>- Motivasi</li> <li>- Frustrasi</li> <li>- Perkembangan norma dan sikap sosial</li> <li>- Hubungan antar manusia dan kelompok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Psikologi adalah studi tentang perilaku individu, kelompok dan masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pemikiran, pengetahuan, tanggapan, spekulasi, serta pengalaman dan tingkah laku individu manusia yang dipengaruhi atau yang dibutuhkan oleh situasi sosial.</li> <li>➤ Setiap manusia berkembang dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia.</li> <li>➤ Manusia selaku individu dan sosial mampu melihat dan menyimpan dalam alam pikirannya kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman,</li> <li>➤ Ada proses individu dan individualisme, sosial dan sosialisme.</li> <li>➤ Ada interaksi kelompok.</li> <li>➤ Ada kerjasama, persaingan, dan kekuasaan.</li> <li>➤ Tingkah laku ada karena pengaruh keadaan jiwa dan lingkungan.</li> </ul>

Diadopsi dari Mukmina dkk. (2002: 62-77).

## I. Hubungan IPS dengan Ilmu Hukum

Hubungan IPS dan ilmu hukum IPS mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hubungan IPS dan Ilmu Hukum dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS. Sebagaimana terlihat pada tabel 9 berikut:

**Tabel 9: Hubungan IPS dan Hukum**

<b>Konsep Dasar Disiplin Ilmu</b>	<b>Generalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukum</li> <li>- Sumber kekuasaan</li> <li>- Perintah</li> <li>- Peraturan</li> <li>- Larangan</li> <li>- Perlindungan</li> <li>- Peradilan</li> <li>- Sanksi</li> <li>- Norma kesusilaan</li> <li>- Etika</li> <li>- Manusia</li> <li>- Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Psikologi adalah studi tentang peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah.</li> <li>➤ Keteraturan hidup tercipta melalui ketaatan.</li> <li>➤ Ada peraturan bertingkah laku.</li> <li>➤ Ada perlindungan hukum terhadap individu dan masyarakat.</li> </ul>

Diadopsi dari Mukmina dkk. (2002: 62-77).

Penjelasan di atas berkaitan dengan hubungan IPS dan Ilmu Sosial, maka dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan konsep yang digeneralisasikan dari konsep ilmu sosial yang diperuntukkan sebagai pemecahan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat

dan lingkungannya.

Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial dapat diterapkan gagasan mengenai pusat-pusat utama kegiatan manusia, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Memelihara dan melindungi hidup, kesehatan, milik dan sumber;
2. Mendirikan dan membina rumah tangga;
3. Memelihara dan memperbaiki kondisi material;
4. Bekerjasama dalam kegiatan sosial;
5. Turut serta dalam pemerintahan;
6. Berusaha mendapatkan mata pencarian dan mencari nafkah;
7. Berusaha memberi dan memperoleh pendidikan;
8. Menyatakan impuls atau rasa keagamaan;
9. Menyatakan impuls atau rasa estetis atau keindahan
10. Berekreasi
11. Menjalankan produksi, distribusi, dan konsumsi makanan, pakaian, barang, serta jasa.
12. Mentransfer manusia dan barang.

Pada dasarnya manusia hidup saling membutuhkan, saling ketergantungan dengan manusia yang lainnya yang dapat juga dikatakan sebagai hubungan sosial. Tujuan utama IPS adalah menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga-negara yang baik serta memberi dasar pengetahuan sosial untuk kelanjutan jenjang di atasnya.

Ilmu pengetahuan sosial adalah bidang pengetahuan yang digali dari kehidupan yang praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang pengetahuan yang tidak berpijak pada kenyataan.

# **KONSEP DASAR ILMU SOSIAL PADA IPS**





# BAB VI

## KONSEP DASAR ILMU SOSIAL PADA IPS

### A. Konsep Dasar Sosiologi

#### 1. Pengertian Sosiologi

Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi merupakan ilmu yang berkembang pesat dalam era globalisasi dewasa ini. Pertama kali dirintis oleh seorang Filosof Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1843, selanjutnya Emile Durkheim melanjutkan istilah tersebut dan menerapkannya menjadi sebuah ilmu disiplin ilmu.

Sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu lahir dari tradisi intelektual bertumpu pada kerangka pemikiran Eropa Barat dan Amerika. Begitu pun sosiologi sebagai disiplin ilmu bukanlah dilahirkan dari para ahli sosiologi melainkan berasal dari ahli hukum, ahli ekonomi, dan filsuf (Robinson, 1986:3).

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda usianya, walaupun telah mengalami perjalanan zaman cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia. Awal mudanya orang-orang meninjau masyarakat, hanya berkenaan dengan masalah-masalah yang menarik perhatian; seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan dan lain sebagainya

Kata sosiologi berasal dari dua kata dalam bahasa latin yaitu,

*socius* yang artinya teman, keluarga, masyarakat dan logos yang berarti ilmu. Secara keseluruhan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.

Dipertegas oleh Gunawan (2010: 3), sosiologi secara harfiah atau etimologis berasal dari bahasa Latin: *Socius*= teman, kawan, sahabat dan *Logos*= ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara berteman/ berkawan/ bersahabat secara baik, atau lebih luas lagi adalah ilmu tentang cara berinteraksi yang baik terhadap masyarakat.

Setiadi (2013: 1), menjelaskan bahwa kata sosiologi berasal dari kata latin "*socius*" artinya teman, dan dari bahasa Yunani "*logos*" artinya ilmu, diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul "*Cours De Philosophie Positive*" karangan August Comte.

Selain itu Brinkerhot dan White dalam Damsar (2015: 2) berpendapat bahwa sosiologi adalah studi sistematis tentang interaksi sosial manusia. Sedangkan penekannya terletak pada hubungan dan pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola ini tumbuh kembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga mereka berubah.

Sampai saat ini tidak ada batasan yang pasti dan baku tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi tersebut. Akan tetapi, hal ini bukan berarti para pembelajar sosiologi tidak memiliki kepastian dalam membatasi sosiologi. Sebab ada titik temu dari berbagai definisi sosiologi yang dikemukakan para ahli.

Berikut definisi sosiologi menurut beberapa ahli dalam Ahmadi (1975: 9), sebagai berikut:

- 1) W.F. Ogburn dan M.F. Nimkoffe, dalam buku mereka berjudul "*A Handbook of Sociology*" memberikan definisi sosiologi sebagai studi secara ilmiah terhadap kehidupan sosial.

- 2) George A. Lundberg, dkk., dalam buku mereka "*sosiology*" mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari tingkah laku sosial dari orang-orang dan kelompok-kelompok.
- 3) Ginsberg dalam bukunya "*The Study of Society*", menjelaskan bahwa sosiologi ialah studi terhadap masyarakat, yaitu mempelajari antar aksi dan antar relasi manusia serta syarat dan akibatnya.
- 4) Max Weber dalam bukunya "*Wirtschaft und Gesellschaft*" memberi batasan sosiologi sebagai ilmu yang memberikan interpretasi dan pengertian-pengertian tentang perbuatan sosial.
- 5) Cuber dalam bukunya "*Sosiologi A. Synopsi of Principles*" memberikan batasan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara manusia.
- 6) Bierens De Haan dalam bukunya "*Sociologie, ontwikkeling en methode*" memberi batasan sosiologi sebagai ilmu tentang pergaulan hidup.
- 7) Kimball Young menjelaskan bahwa sosiologi ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia di dalam kelompok.
- 8) Sorokin dalam bukunya "*Culture and Personality*" mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari gejala sosial kebudayaan dari sudut umum, mempelajari sifa essensiil gejala tersebut, serta hubungan antara gejala itu yang amat banyak.
- 9) P.J. Bouman mengemukakan bahwa sosiologi ialah ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok.

Berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi ialah salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang pola-pola hubungan antara manusia dan manusia, baik seara individu, maupun seara kelompok yang berakibat pada lahirnya pola-

pola sosial, di antaranya: nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang dianut oleh manusia di dalam kelompok tersebut.

## **2. Objek Kajian Sosiologi**

Priyono (2006:6), menjelaskan bahwa objek studi sosiologi ialah masyarakat yaitu hubungan antar manusia dan proses yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan antar manusia tersebut. Oleh karena itu Sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat.

Sosiologi sebagai disiplin ilmu maka sosiologi harus memiliki objek kajian antara lain masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan timbal balik antarmanusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

Henslin (2002:10) menjelaskan bahwa Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek antara lain:

- Objek Material : Kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang memengaruhi kesatuan manusia itu sendiri.
- Objek Formal : Lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian objek formal sosiologi adalah hubungan manusia antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.
- Objek budaya : Merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan satu dengan yang lain.
- Objek Agama : Pengaruh dari objek dari agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial masyarakat, dan banyak juga hal-hal ataupun dampak yang mempengaruhi hubungan manusia.

Dapat disimpulkan objek kajian dari sosiologi adalah gejala-gejala yang terjadi atau yang ditimbulkan dari interaksi manusia itu sendiri.

### **3. Ruang Lingkup Sosiologi**

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki cakupan luas dan banyak cabang yang dipersatukan. Menurut Supardan (2011: 78), secara tematis ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa sub disiplin ilmu sosiologi, seperti sosiologi pedesaan, sosiologi industri, sosiologi perkotaan, sosiologi medis, sosiologi wanita, sosiologi militer, sosiologi keluarga, sosiologi pendidikan, dan sosiologi seni. Berikut penjelasan ruang lingkup sosiologi tersebut.

Sedangkan Vine sebagai dikutip oleh Susanto (1999) bahwa ruang lingkup sosiologi, memperlihatkan bahwa aspek-aspek yang diteliti oleh sosiologi adalah:

1. hubungan manusia sebagai satuan sosial;
2. proses sosial dan ketentuan sosial pembentukan masyarakat;
3. struktur sosial masyarakat;
4. unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup kelompok sosial masyarakat;
5. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat; dan
6. dasar penelitian dan metodologi sosiologi.

Dari berbagai objek yang diteliti menghasilkan berbagai konsep sosial, perubahan sosial, proses sosial, konflik sosial, pranata sosial, status sosial, struktur sosial, masyarakat kota, masyarakat desa, peranan sosial, dan sebagainya.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Sosiologi**

Sosiologi merupakan ilmu murni atau “*pure sciene*” bukan ilmu terapan “*applied sciene*”. Ini berarti ilmu sosiologi bermanfaat untuk membentuk dan mengembangkan ilmu secara abstrak untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam hal ini, tujuan sosiologi adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat.

Selain itu, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial-budayanya. Caranya adalah dengan mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala-gejala masyarakat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Berpijak pada apa yang menjadi tujuan sosiologi tersebut, dapat dikemukakan nilai guna sosiologi, sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat tertentu, di antaranya: petani, pedagang, buruh, pegawai, komunitas keagamaan, militer, dan sebagainya.
2. Sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta stratifikasi sosial.
3. Hasil studi sosiologi terhadap kondisi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan, baik dari pemerintah, perusahaan, badan dunia, atau yang lainnya.
4. Hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
5. Data tentang masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai

dengan evaluasi hasil-hasilnya.

Selanjutnya Tanwifi (2009: 7) menegaskan bahwa kehadiran sosiologi sebagai kajian keilmuan bertujuan:

1. meningkatkan kehidupan yang serasi di masyarakat;
2. meningkatkan pengertian terhadap lingkungan sosial manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
3. meningkatkan kerjasama antarmanusia;
4. perencanaan dan peningkatan pembangunan masyarakat;
5. perencanaan pembaharuan sosial;
6. peningkatan perencanaan pendidikan; dan
7. peningkatan pengendalian dampak sosial.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan sosiologi adalah untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk.

## **5. Konsep Dasar Sosiologi pada IPS**

Setelah kita mengetahui tentang pengertian, ruang lingkup dan tujuan sosiologi, Williams (1969) menunjuk tiga konsep utama dalam studi sosiologi tahap awal, yaitu : budaya, norma, kelembagaan, status, dan peranan.

### **a. Budaya**

Budaya adalah seluruh warisan dari masa lampau berupa perilaku umat manusia yang sekarang berfungsi efektif dalam keturunan secara sosial (*social heredity*). Di dalamnya terdapat artefakta, keterampilan, pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai. Keseluruhan cara manusia hidup di dunia disebut budaya. Ada empat hal yang berkaitan dengan hal ini.

1. Budaya telah berkembang sepanjang sejarah-sejarah umat manusia.
2. Budaya dari masa ke masa mengalami berbagai perubahan.
3. Budaya harus diajarkan bagian demi bagian, karena sifatnya yang rumit dan kompleks.
4. Budaya akan berlangsung berkelanjutan, tak terbatas pada panjang usia generasi pemakainya, dengan atau tanpa harus memberikan sumbangan yang bermanfaat.

William (1969) berpendapat bahwa mempelajari masyarakat sendiri secara sistematis merupakan cara yang paling tepat untuk memahami makna budaya. Keyakinan ini membawa kita ke arah konsekuensi berikut. Siswa yang mempelajari sosiologi pertama kali membutuhkan perhatian serius dalam membantu mereka mencari dan menemukan aspek normatif dari budaya. Mereka perlu menguji dan meyakini secara pribadi pentingnya aturanaturan dari perilaku yang ada di dalam masyarakat. Singkatnya, mereka harus mempelajari norma-norma budaya.

## **b. Norma**

Ada tujuh gagasan penting yang tersimpan dalam pengertian norma budaya dan ini harus diuji pula oleh para siswa-siswi. Menurut Williams, rincian norma-norma tersebut harus dikaji mendetail dengan menguji tujuh sifat berikut.

1. Cakupan pengetahuan yang berkaitan dengan norma budaya, dengan pertanyaan, berapa banyak orang di dalam kelompok yang menyadari hal tersebut?
2. Penerimaan atau persetujuan terhadap norma budaya.
3. Mengetahui tidak secara otomatis menyetujui, dengan pertanyaan berapa banyak orang yang di samping mengetahui

juga sekaligus menerimanya?

4. Jumlah serta tipe-tipe orang yang dipengaruhi oleh norma tersebut, dengan pertanyaan siapa saja yang memedulikannya?
5. Hakikat dan jauhnya penyimpangan norma, dengan pertanyaan, berapa banyak orang yang melanggar norma?
6. Hakikat dari prosedur-prosedur pemaksaan norma. Hukum atau hadiah apakah yang dipakai untuk memaksakan berlakunya peraturan? Siapakah yang bertanggung jawab atas terjadinya pemaksaan tersebut dan bagaimanakah pribadi atau kelompok mendapatkan kewenangannya? Sejauh manakah konsekuensi dari praktek pemaksaan tadi? Sampai taraf apakah pemaksaan itu diinternalisasikan oleh pihak pelanggar peraturan? Proses-proses dalam mengizinkan berlakunya norma. Bagaimanakah norma diperoleh? Di mana? Siapakah yang berhak mengajarkan norma sehingga ia dapat mempertanggungjawabkannya? Mengapa demikian?
7. Hakikat dan bentuk norma. Apa wujud norma dalam penerapannya, kekhasannya, kekuatannya, atau fleksibilitasnya? Adakah itu tertulis? Di mana? Memahami norma norma kultural dengan ciri-ciri krusial tadi mendasar.

### **c. Kelembagaan**

Konsep ketiga yang utama adalah kelembagaan (pranata). Tujuan sentral dan fundamental dari masyarakat adalah memiliki norma dan peranan, serta proses dan mekanisme yang mengelilinginya dan mengembangkannya demi tercapai tujuan. Adapun wujudnya adalah lembaga (*institution*), yang dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori.

1. Lembaga politik berkembang di sekitar adaptasi terhadap pengertian kekuasaan.
2. Lembaga ekonomi berkaitan dengan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia.
3. Lembaga ekspresif-integratif berkaitan dengan transmisi serta komunikasi gagasan, apresiasi, keyakinan, sikap dan teknologi.
4. Lembaga kekerabatan berkaitan dengan seks dan pemeliharaan anak.

Setiap lembaga tersebut memiliki norma dan harapannya yang khas. Norma-norma cultural yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga fundamental tersebut menjadi lebih ketat dan diakui oleh masyarakat secara luas. Itu semuanya disebut norma-norma lembaga. Adapun sanksi-sanksi sosial atas pelanggaran terhadapnya cukup beragam. Bagian besar dari warga masyarakat menginternalisasikan norma sesuai dengan permasalahannya.

Norma-norma lembaga dapat tertinggal dibandingkan dengan perubahan-perubahan sosial, sehingga menimbulkan berbagai ketegangan. Untuk mengatasinya orang harus dapat memahami jalinan sebab-akibat antar lembaga tersebut.

Dalam mengkaji lembaga-lembaga sosial, terdapat tiga problem yang perlu diketahui.

1. Pengkaji harus menguraikan dan menganalisa struktur norma itu sendiri, yang mencakup pola-polanya, sebab-sebab dari interelasinya, sumber dan mekanisme integrasinya, serta konsekuensinya.
2. Pengkaji harus menemukan proses perubahan yang terdapat di dalam pola lembaga, penyebab, mekanisme, dan

akibatnya.

3. Pengkaji harus mengkaji realisasi antar kepribadian secara individual, dengan struktur normatifnya.

Kesemuanya itu termasuk psikologi sosial yang menelaah problem-problem budaya dan kepribadian serta komplikasinya, kontrol sosial serta motivasinya untuk mengatur norma, inovasi dan pemilihan (*dissenting*).

#### **d. Status dan Peranan**

Ada dua gagasan lain yang fundamental untuk memahami budaya dan norma budaya dalam rangka pengkajian sosiologi, yaitu status dan peran (*role*). Para sosiolog sendiri masih juga belum mencapai kesepakatan tentang makna yang sebenarnya dari istilah-istilah itu; padahal kedudukannya dalam sosiologi amat vital.

Williams (1969) mendefinisikan status sebagai posisi, tempat dalam perangkat relasi antar orang. Menurutny, status-status itu selalu polar atau resiprokal, yakni timbal balik. Status yang satu otomatis mencakup yang lain, misalnya guru-murid, atau dokter-pasien.

Baginya *role* atau peran adalah pola perilaku yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan status yang khusus. Hak-hak tertentu, kewajiban dan tanggung jawab merupakan bagian yang terpadu dari penentuan tugas dari suatu status. Fungsi-fungsinya menjadi peran. Adapun harapan-harapan dalam makna tertentu menjadi arti suatu istilah. Misalnya, jika kita berkata atau berpikir tentang seorang ayah, biasanya yang kita bayangkan adalah peran yang kita harapkan dari seorang ayah di dalam budaya kita.

Setiap anggota masyarakat yang rumit memiliki status bermacam-macam, yang karenanya peran orang juga beraneka ragam. Batas dari berbagai peran dapat bercampur atau tumpang tindih. Akibatnya, kadang-kadang terjadi konflik peran pada diri seseorang. Studi terhadap ketegangan peran tadi di dalam sosiologi dikenal dengan istilah *role strain*. Dalam pengkajian sosiologi ditemukan alat yang berguna untuk menguji indentifikasi gagasan-gagasan struktur yang kemungkinan berupa organisasi sosial, relasi sosial, serta kelompok sosial baik yang formal ataupun informal.

## **B. Konsep Dasar Geografi**

### **1. Pengertian Geografi**

Istilah ekonomi pertama kali muncul pada abad pertama di bawah pengaruh Erasthenes. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Eratosthenes mengemukakan bahwa geografi berasal dari kata *geographika*. Kata *geo* berarti bumi dan *graphein* berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Dengan demikian Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menuliskan, melukiskan, dan mencitrakan tentang bumi beserta kehidupan yang ada di atasnya.

Menurut Supardan (2011: 227), geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *geo* yang berarti bumi dan *graphein* yang berarti lukisan atau tulisan.

Secara etimologis, Geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menggambarkan keadaan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti : penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya (Wardiyatmoko dan Bintaro, 1999). Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa geografi senantiasa memberikan uraian ilmiah mengenai sifat-sifat bumi dan gejala alam

yang ada, termasuk sebab dan segala akibatnya bagi kehidupan. Disamping itu juga berusaha menganalisa berbagai kondisi yang terjadi di muka bumi untuk disesuaikan dengan kebutuhan umat manusia (Wartoyo, 2004).

Pengertian bumi dalam geografi tersebut, tidak hanya berkenaan dengan fisik alamiah bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan proses alamnya, maupun gejala dan proses kehidupannya. Oleh karena itu, dalam hal gejala dan proses kehidupan melibatkan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia sebagai penghuni bumi tersebut.

## 2. Objek Kajian Geografi

Menurut Astawa (2011: 159-161), Menurut Ikatan Geografi Indonesia (IGI), secara umum dapat dikemukakan bahwa objek kajian geografi, yaitu:

- **Objek Material**, Objek material geografi ialah fenomena geosfer, yaitu meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi berupa semua benda baik benda mati maupun benda hidup, beserta lingkungannya. Geosfer terdiri dari lima lapisan sebagai berikut: a) Atmosfer atau udara yang menyelubungi bumi, b) Litosfer atau kulit bumi, c) Hidrosfer (air), d) Biosfer (hewan dan tumbuhan), e) Anthrosfer (manusia)
- **Objek Formal**, Objek formal ialah cara pandang, cara berfikir, atau analisis terhadap segi materialnya. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan lainnya. Cara pandang atau pendekatan ini yang digunakan geografi untuk mengkaji objek materialnya. Objek formal atau pendekatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Analisis keruangan, b) Analisis Ekologi atau kelingkungan, c) Analisis kompleks wilayah (kewilayahan).

- **Objek sosial**, merupakan kajian yang secara khusus membahas tentang kehidupan manusia, seperti jumlah penduduk, penyebaran penduduk, kepadatan penduduk, kegiatan ekonomi, dan segala aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan objek geografi sosial ini adalah : antropologi, sejarah, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai contohnya hubungan geografi dengan antropologi yang telah melahirkan ilmu baru, yakni antropogeografi (Priyadi, 2007).

### 3. Ruang Lingkup Geografi

Menurut Supardan (2011: 227), geografi secara makro dapat dikelompokkan dalam dua subdisiplin, yaitu: a) Geografi fisik, dan b) Geografi manusia.

Menurut Priyadi (2007), ruang lingkup kajian geografi meliputi:

- a. persebaran dan keterikatan penduduk di muka bumi;
- b. hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik; dan
- c. kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri tertentu.

Menurut Hagget (1979), bentuk objek ilmu Geografi meliputi:

- a. permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia;
- b. organisasi keruangan manusia dan hubungan ekologis manusia dengan lingkungannya; dan
- c. kekayaan dan keragaman bumi.

Menurut Chilson (1975), ruang lingkup kajian geografi meliputi:

- a. pencatatan dan deskripsi gejala dipermukaan bumi;
- b. studi tentang hubungan dari gejala di daerah-daerah tertentu;

dan

- c. penelitian masalah-masalah yang berdimensi keruangan khususnya identifikasi pentingnya ruang sebagai suatu variabel.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Geografi**

Setiap lapisan yang dipelajari dalam geografi baik atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer maupun antrhoposfer selalu mengandung hakikat nilai atau manfaat. Hal ini berarti bahwa keterlibatan geografi dengan aspek-aspek bidang kajiannya menjadikan cabang ilmu ini berfungsi tidak saja untuk menjelaskan, namun juga meramal, dan mengontrol yang diaplikasikan ke dalam perencanaan dan pengembangan wilayah sebagai geografi terapan.

Berkenaan dengan itu, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa nilai guna geografi menurut Alfandi dalam Astawa (2017: 161), mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Subjektivisme, yaitu kegunaannya bagi manusia. Contoh: jika seorang geografer ingin menjadikan suatu wilayah tertentu sebagai daerah pemukiman, maka terlebih dahulu melakukan pengkajian tentang jenis tanah, morfologi, aksesibilitas, kondisi air tanah dan kondisi sosial pada suatu wilayah tertentu.
- b. Objektivisme logis, yaitu yang bersifat empiris baik melalui hasil percobaan, pengukuran. atau yang lainnya. Contoh: melihat letak geografis Indonesia yang dilalui oleh jalur sirkum mediteran, seberapa tinggi tingkat kerawanan bencana alam letusan gunung api di Indonesia, dan lain-lain.

Nilai etika dan estetika yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Misalnya jika tidak beretika dalam menggunakan wilayah maka bisa saja terjadi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

## 5. Konsep Dasar Geografi pada IPS

Adapun konsep dasar geografi yang dikaji dalam IPS (Tanwifi, 2009: 11-12) yaitu:

- a. litosfer (lapisan kulit bumi),
- b. hidrosfer (lapisan air dalam bumi),
- c. biosfer (seluruh makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan),
- d. atmosfer (lapisan udara); dan
- e. antroposfer (lapisan manusia dan kehidupannya).

Sedangkan menurut Purbowati (2004) konsep dasar geografi yang dikaji dalam IPS yaitu:

- a. *spatial pattern* yang merupakan pola dari sebaran gejala tertentu dimuka bumi;
- b. *spatial system* yang merupakan keterkaitan sesama antar fenomena di muka bumi; dan
- c. *spatial process* yang merupakan perkembangan yang terjadi di muka bumi.

Sedangkan Getrude Whipple mengungkapkan lima konsep dasar, yaitu:

- a. Bumi sebagai planet.
- b. Variasi cara hidup.
- c. Variasi wilayah-wilayah alamiah.
- d. Makna wilayah (region) bagi manusia.
- e. Pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia.

Selanjutnya Henry J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar sebagai berikut.

- a. Konsep kewilayahan atau konsep regional.
- b. Konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer.

- c. Konsep manusia sebagai faktor ekologi yang dominan.
- d. Konsep globalisme atau konsep bumi sebagai planet.
- e. Konsep interaksi keruangan.
- f. Konsep hubungan areal (wilayah).
- g. Konsep persamaan areal (wilayah).
- h. Konsep perbedaan areal (wilayah).
- i. Konsep keunikan areal (wilayah).
- j. Konsep persebaran areal (wilayah).
- k. Konsep lokasi relative.
- l. Konsep keunggulan komparatif.
- m. Konsep perubahan yang terus-menerus atau perubahan abadi.
- n. Konsep sumber daya dibatasi secara budaya.
- o. Konsep bumi yang bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta.

Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan pendidikan dasar (Pendas) konsep dasar itu dapat kita mulai dari arah (mata angin), jarak, peta perbedaan waktu, sungai, gunung, dan demikian seterusnya secara bertahap serta berkesinambungan. Selanjutnya, bagaimanakah membina konsep (*concept formation*) pada diri kita masing-masing dan terutama pada diri peserta didik yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing? Karena pembinaan konsep itu tidak lain adalah mengajarkan pengertian konotatif tentang sesuatu (Womack, J.G.: 1970:32) maka kita selaku guru IPS mengajarkan pengertian yang seluas-luasnya tentang sesuatu secara bertahap berkesinambungan, sampai terjadi pola pengertian dalam benak kita dan juga dalam benak peserta didik tentang sesuatu tadi secara terurai mulai dari keadaannya yang konkrit mudah ditangkap oleh peserta didik sampai ke tahap abstrak yang mencirikan konsep tersebut.

Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang sungai sebagai suatu konsep dasar geografi. Kita selaku guru IPS bertanya kepada

peserta didik tentang sungai “apakah ada di antara mereka yang belum mengenal sungai”. Anda yakin tidak ada peserta didik yang belum mengetahui tentang sungai itu. Secara konkret kita telah menyampaikan pengertian sungai itu. Kita dapat menjelaskan arti kata sungai sesuai dengan yang diuraikan dalam kamus.

Selanjutnya dikemukakan bahwa sungai itu ada daerah sumbernya (daerah hulu), ada aliran bagian tengah, dan ada muaranya (bagian hilir). Kemudian kita sampaikan pemanfaatan sungai untuk berbagai keperluan seperti pengairan sawah, pelayaran atau perhubungan, pembangkit tenaga listrik, perikanan, dan demikian seterusnya.

Mengenai daerah sumber atau daerah hulunya, ada yang berasal dari pegunungan, ada yang berasal dari danau, dan ada pula yang berasal dari daerah es atau daerah salju. Dengan demikian, sumber airnya itu ada yang berasal dari curahan hujan dan ada pula yang berasal dari curahan salju. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan sungai itu telah mencakup pengertian yang luas dan telah tertanam dalam benak kita masing-masing termasuk dalam benak peserta didik maka pada diri siswa masing-masing telah terbina konsep. Proses pembinaan konsep ini tidak hanya berlaku untuk bidang studi geografi, melainkan berlaku juga untuk semua bidang studi dan semua bidang pendidikan. Berikutnya kita lanjutkan dengan bidang studi yang lain.

## **C. Konsep Dasar Ekonomi**

### **1. Pengertian Ekonomi**

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani *oikonamos* atau *oikonomia*, dimana *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos*, atau “peraturan, aturan, hukum”, dan secara garis besar

diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud ilmu ekonomi menurut ahli ekonomi adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

Adam Smith sebagai Bapak ilmu Ekonomi mendefinisikan yaitu sebuah penyelidikan kedalam sifat dan penyebab kekayaan bangsa-bangsa. Secara bahasa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni yang berarti manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan.

Menurut Supardan (2011: 367) istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikosnamos* atau *oikonomia* yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi, termasuk pekerja dan produksinya maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran.

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa (Tanwif, 2009: 10-6).

Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara yang paling terkenal adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Selain itu, subjek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) dan normatif, *mainstream* dan *heterodox*, dan lainnya.

Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang moneter, seperti penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia.

## **2. Objek Kajian Ekonomi**

Menurut Astawa (2017: 148), objek kajian ilmu ekonomi ialah keseluruhan kegiatan perekonomian manusia. Keluasan kajian tersebut menyebabkan ruang lingkup dalam bidang ekonomi dikenal menjadi dua yaitu bersifat mikro dan bersifat makro.

## **3. Ruang Lingkup Kajian Ekonomi**

Menurut Supardan (2011: 366), ditinjau dari ruang lingkup atau cakupannya, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) makroekonomi, dan 2) mikroekonomi.

Makroekonomi berkaitan dengan kesempatan kerja *full employment* (kondisi di mana seluruh sumber daya, khususnya tenaga kerja dapat terserap sepenuhnya) dan stabilitas harga. Sedangkan mikroekonomi berkaitan dengan unit-unit pengambilan keputusan individual dalam perekonomian, seperti rumah tangga, pekerja, dan perusahaan yang secara umum dikenal dengan sebutan mikroekonomi.

Pada pembelajaran IPS dalam kaitannya dengan ekonomi, maka ruang lingkungannya berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok.

Pembelajaran ekonomi dibatasi sampai gejala dan perilaku

manusia dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam memenuhi kehidupannya dari berbagai macam pilihan pilihan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dipelajari Ekonomi adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka ruang lingkup ekonomi adalah:

- a. Substansi materi ilmu ekonomi yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Gejala, masalah dan peristiwa sosial tentang kehidupan bermasyarakat.

Kedua hal tersebut dipelajari dalam ekonomi secara terpadu, karena pengajaran ekonomi tidak hanya sekedar penyajian materi-materi melainkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran ekonomi harus selalu menggali materi-materi yang bersumber dari potensi alam serta potensi manusia.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Ekonomi**

Case dan Fair dalam Astawa (2017: 151), mengemukakan pandangannya tentang beberapa manfaat belajar ilmu ekonomi, antara lain:

- a. Membantu cara berpikir yang tepat dalam pengambilan keputusan.
- b. Membantu memahami masyarakat.
- c. Membantu pemahaman terhadap masalah-masalah global.
- d. Membangun masyarakat yang lebih demokrasi.

Tujuan dari ekonomi adalah sekurang-kurangnya meliputi (Tanwif, 2009: 10-8) yaitu:

- a. membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang

- berguna dalam kehidupan manusia;
- b. membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan manusia; dan
  - c. membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan ilmu ekonomi sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Hal tersebut menjadi tanggungjawab yang harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran ekonomi di berbagai bidang pendidikan dengan disertai keluasan, kedalaman, dan bobot yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.

## **5. Konsep Dasar Ekonomi Pada IPS**

Konsep adalah suatu pengertian yang disimpulkan dari sekumpulan fakta yang memiliki ciri-ciri yang sama. Konsep merupakan pembedaan dan pemilikan secara sadar atas pengalaman persepsi yang pernah diperoleh.

Menurut Heilbroner, ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari bagaimana manusia memecahkan tantangan dalam memenuhi kebutuhannya. Senesh mengemukakan 5 (lima) langkah konsep dasar dari ilmu ekonomi sebagai berikut:

- a. Konsep dasar sentral adalah kelangkaan, bahwa setiap masyarakat dihadapkan pada masalah kebutuhan yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber-sumber produksi yang terbatas.
- b. Karena sumber yang langka ini, orang harus berupaya mengembangkan metode produksi yang baru hingga timbulah spesialisasi yang lebih menguntungkan.
- c. Sistem spesialisasi menyebabkan ketergantungan antara yang

satu dengan lainnya sebab itu perlu suatu sistem moneter dan sistem transportasi.

- d. Setiap masyarakat yang ingin dan memerlukan sesuatu harus ke pasar, untuk memperoleh barang dan jasa maka akan terjadi interaksi pembelian dan penjualan sehingga terbentuk harga dengan segala perubahan-perubahannya.
- e. Keputusan yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah dalam tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, konsep dasar ekonomi yang dimasukkan ke IPS adalah tentang *kelangkaan*, karena substansi materi ilmu ekonomi adalah kebutuhan manusia. Dengan adanya kelangkaan tersebut maka Fokus analisis ekonomi adalah pembuatan keputusan dalam berbagai bidang di mana orang dihadapkan pada pilihan-pilihan, seperti dalam bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama.

## **D. Konsep Dasar Ilmu Politik**

### **1. Pengertian Ilmu Politik**

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan (The Liang Gie, 1991).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Politik adalah ilmu mencari dan mempertahankan kekuasaan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan bila dikaitkan dengan urusan Negara, maka politik juga disebutkan cara negara yang digerakkan oleh suatu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional negara tersebut.

Politik juga disebutkan cara negara yang digerakkan oleh suatu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional negara tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dimock and Dimock (1983) pemerintah adalah alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, diantaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang yang dipegang oleh alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan pada waktu bersamaan.

Perilaku politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Komunitas dari suku terasing dalam mempertahankan klan-nya akan dilakukan secara politik. Para kepala suku akan mempengaruhi para pemudanya agar bersedia membela kelompoknya walaupun harus ditukar dengan nyawanya. Proses persuasif kepala suku adalah bagian dari teknik berkomunikasi tetapi tindakan kepala suku tersebut dapat pula dimaknai bahwa ia telah bertindak politik, yaitu melakukan perang dari gangguan suku lain agar ia tetap sebagai kepala suku. Karena jika kelompok suku itu kalah dalam berperang ia akan kehilangan dalam kedudukannya. Ilustrasi di atas ingin menunjukkan bahwa politik telah hidup sejak manusia eksis dipermukaan bumi (Cikusin. 2005).

Ilmu politik senantiasa berkenaan dengan: 1) Kekuasaan, sumber kekuasaan, pengaruh, pembuat dan pelaksanaan kebijakan, 2) Kewenangan dan kekuasaan berdasarkan legitimasi, 3) Konflik dan konsensus, 4) Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan.

Untuk itu, politik pada dasarnya adalah fitrah manusia dalam mempertahankan martabatnya dan bukanlah satu hal yang buruk untuk dilakukan, akan tetapi manusia sering tergelincir dalam

berpolitik yaitu melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa melihat dan memperdulikan nilai kebaikan dan kebenaran.

## **2. Objek Ilmu Politik**

Adapun objek ilmu politik adalah perilaku politik atau tindakan politik, yaitu kegiatan manusia untuk mencari, memperoleh, mempergunakan, membagi dan mempertahankan kekuasaan dalam mengejar apa yang dicita-citakan.

## **3. Ruang Lingkup Ilmu Politik**

Ruang lingkup kajian ilmu politik terbagi atas empat bidang berikut.

- a. *Teori politik*, yang meliputi politik, sejarah perkembangan dan ide-ide politik.
- b. *Lembaga-lembaga politik*, meliputi Undang-Undang Dasar, Pemerintah Pusat (nasional), Pemerintah daerah/Lokal. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga politik.
- c. *Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum*, mencakup partai politik, golongan-golongan, asosiasi-asosiasi, partisipasi warga Negara dalam pemerintahan administrasi dan pendapat umum.
- d. *Hubungan internasional*, meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi, dan hukum internasional.

Dalam konteks bernegara, politik tidak terlepas dari pemerintahan. mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diketahui dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan, yaitu: 1) Negara berdasarkan atas hukum, 2) sistem

pemerintahan berdasarkan kontitusional, 3) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara, 4) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, 5) Menteri Negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR, Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara, 6) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Selanjutnya, bila ingin memperdalam mengenai politik ini tentu saja harus banyak belajar tentang ilmu politik itu sendiri. Pada dasarnya ilmu politik mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada perjuangan manusia mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mencapai tujuannya.

#### **4. Manfaat dan Tujuan Ilmu Politik**

Politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-dalil, keabsahan, percobaan, hukum, keragaman, dan pembentukan asas-asas universal. Untuk itu, tujuan ilmu politik menurut Hayati (2007) adalah untuk mengetahui dan membahas tentang pembagian wilayah, batas negara dan masalah yang berhubungan dengan kekuasaan Negara.

Sedangkan manfaat mempelajari ilmu politik, yaitu:

- a. Memberi jalan yang lebih baik dalam hal negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat.
- b. Membahagiakan hidup manusia yang tinggal dalam wilayah yang sama.
- c. Tujuan politik ialah tindakan politik. Untuk mencapainya diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak baik secara politik. Misalnya menelaah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa dan berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan diri mereka yang dikuasai.

## 6. Konsep Dasar Ilmu Politik pada IPS

Menurut Miriam Budiardjo bahwa ontologi ilmu politik ada lima, yaitu:

- a. Negara yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
- b. Kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku
- c. Pengambilan keputusan yaitu hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
- d. Kebijakan umum yaitu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk memcapai tujuan itu.
- e. Pembagian yaitu pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai dapat bersifat abstrak dan dapat bersifat konkret.

Sedangkan menurut Tanwifi (2009: 8-15) bahwa konsep dasar ilmu politik yang dikaji dalam IPS, yaitu:

- a. *Pemerintahan yang Berdaulat*. Pemerintahan sebagai salah satu unsur negara adalah gabungan seluruh alat perlengkapan negara. Pemerintah haruslah berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Berdaulat kedalam, artinya bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur dan membina kehidupan berbangsa dan bernegara dan ditaati oleh seluruh rakyatnya. Sedangkan berdaulat keluar, artinya pemerintah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain,

baik kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya serta melindungi keselamatan dan kedaulatan negara dari segala ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ada tiga macam pengertian pemerintah yaitu:

- Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara dalam arti luas, yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Pemerintah sebagai kepala negara atau badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah-wilayah negara.
- Pemerintah sebagai badan eksekutif, presiden dibantu oleh menteri-menteri (Indonesia), kabinet (Dewan Menteri) di Inggris.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah suatu negara harus berdaulat penuh ke dalam dan keluar agar negara dapat berdiri tegak selamanya. Mengenai kedaulatan, David E. Apter (1987) mengartikan sebagai kekuasaan mutlak, abadi, dan asli. Mutlak berarti kekuasaan tertinggi tidak terbagi-bagi. Abadi berarti kekuasaan negara berlangsung menerus tanpa terputus-putus. Asli berarti tidak berasal dari kekuasaan lain.

- b. *Bentuk-Bentuk Demokrasi*. Teori kadaulatan rakyat disebut demokrasi. Demokrasi secara harfiah berasal dari kata demos berarti rakyat dan cratein atau cratos berarti pemerintahan. Menurut Presiden Amerika serikat ke-16, Abraham Lincoln (1808-1865), “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (“*Democracy is government of the people, by the people and for the people*”). Jadi, suatu pemerintahan dikatakan demokratis, apabila kekuasaan ada

di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Ditinjau dari “titik berat yang menjadi perhatiannya” demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini.

- Demokrasi formal, adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi ini secara resmi semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama, seperti hak memilih, hak mengeluarkan pendapat, hak menjadi wakil rakyat, dan berhak menjadi menteri.
- Demokrasi material, adalah demokrasi yang menitikberatkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sedangkan di bidang politik kurang mendapat perhatian. Untuk menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, maka partai yang memegang kekuasaan dengan mengatasnamakan negara akan menjadikan segala sesuatu menjadi milik negara, sehingga hak milik pribadi tidak diakui serta hak-hak politik warga negara dihilangkan.
- Demokrasi gabungan, adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan demokrasi material dengan menghilangkan keburukannya dan mengakui kebaikannya. Persamaan derajat dan setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh rakyat kadang-kadang perlu dibatasi. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat jangan sampai menghilangkan dan menekan persamaan derajat dan hak asasi manusia.

c. *Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945.* Adapun

sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).
- Sistem Konstitusional, Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tak terbatas). Hal ini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian Pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan produk konstitusional.
- Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menyatakan dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*)”.
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping Presiden ada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membuat Undang-Undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (*Staatsbegroting*). Oleh sebab itu, presiden harus bekerja sama dengan Dewan. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, namun DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden, karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- Menteri Negara ialah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara. Menteri-Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan, tetapi tergantung kepada Presiden. Menteri-Menteri ini bukan pegawai tinggi biasa dan merekalah yang bertanggungjawab menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemerintah semacam ini disebut “Kabinet Presidentil”, artinya Presiden di samping sebagai kepala negara juga merangkap menjadi “Kepala Pemerintahan.

- Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Walaupun Kepala Negara (Presiden) tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator” atau kekuasaan tidak terbatas.. Dengan demikian berarti kekuasaan Presiden tidak tak terbatas, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh ketetapan-ketetapan MPR, Undang-Undang, dan peraturan negara lainnya.

d. *Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.* Lembaga Tinggi Negara Indonesia yaitu: 1) Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 3) Dewan perwakilan Rakyat (DPR), 4) Presiden, 5) Mahkamah Agung (MA), dan 6) Mahkamah Konstitusi.

## **E. Konsep Dasar Antropologi**

### **1. Pengertian Antropologi**

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebudayaan dan peradaban, hal ini dapat dibuktikan sejak zaman manusia purba sampai manusia modern. Keunikan dalam hal peradaban ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, sehingga para ilmuan tertarik untuk mempelajari tentang manusia untuk itu ilmu yang mempelajari

tentang manusia disebut antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yakni *antrhopos* yang berarti manusia atau orang, dan *logos* yang berarti ilmu.

Menurut Astawa (2017: 132), secara harfiah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *anthropos* berarti manusia, dan *logos* artinya ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mengkaji manusia. Antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas, dengan menggabungkan humaniora, ilmu sosial, dan ilmu alam untuk menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. Jadi, antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya.

## **2. Objek Studi Antropologi**

Antropologi lahir dengan berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada sosiologi lebih menitikberatkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Antropologi menempatkan diri sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis tertentu.

Antropologi bukan satu-satunya ilmu yang mempelajari manusia, sebab obyek material semua ilmu sosial adalah manusia. Ilmu pendidikan, politik, ekonomi, fisiologi dan sebagainya menempatkan manusia sebagai obyek materialnya. Bedanya, antropologi mempelajari manusia secara menyeluruh, holistik, pada semua waktu dan tempat. Di antara pertanyaan mendasar dalam

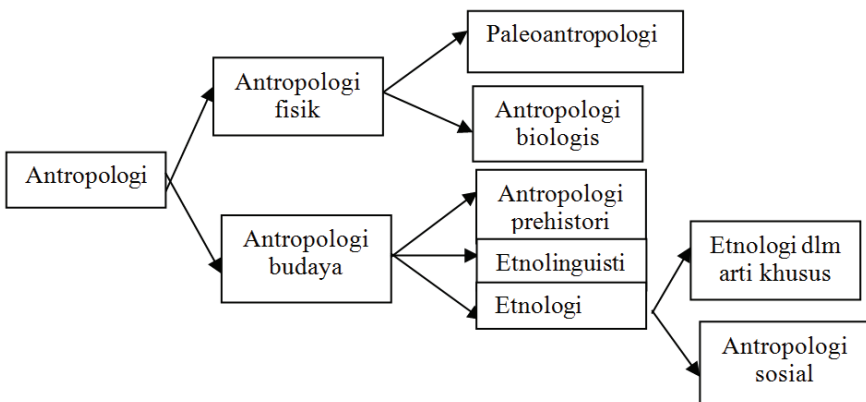
antropologi adalah apa saja yang secara umum ada pada semua manusia, apa saja perbedaan kelompok manusia satu dan lainnya dan mengapa sekelompok manusia memiliki pola perilaku atau menganut budaya tertentu. Ini memperlihatkan bahwa luasnya tinjauan antropologi terhadap manusia dan kemanusiaannya terkait pula dengan konteks ruang dan waktu yang luas.

Sehingga objek kajian antropologi sebagaimana yang diungkapkan oleh Astawa (2017: 136), adalah manusia di dalam masyarakat kebudayaan, suku bangsa, dan perilakunya.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa objek kajian Antropologi fokus kepada: 1) Masalah sejarah perkembangan manusia sebagai makhluk sosial, 2) Keanekaragaman manusia dari segi ciri tubuhnya, 3) Penyebaran warna bahasa berbagai suku bangsa, 4) Keragaman warna kebudayaan.

### 3. Ruang Lingkup Antropologi

Menurut Koendjaraningrat dalam Maryani dan Farida (1997: 2-4) bahwa antropologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu antropologi fisik dan budaya. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Wiranata (2001: 3) juga mengemukakan bahwa antropologi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

**a) Antropologi fisik**, yaitu menyelidiki manusia sebagai makhluk biologis, mempelajari manusia dari sudut jasmaninya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, yang diselidiki ialah asal usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh dan kelompok-kelompok manusia yang disebut ras. Adapun cabang-cabang antropologi fisik ialah:

1. Palaentologi primat, yaitu ilmu yang mempelajari deskripsi dari *varietas-varietas manusia yang tidak ada lagi di dunia*.
2. Evolusi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan *type-type manusia*, dimulai dari makhluk-makhluk bukan manusia.
3. Antropometri, yaitu studi tentang teknik *pengukuran tubuh manusia*.
4. Somatologi yaitu studi tentang *varietas manusia yang masih* hidup dan tentang perbedaan sex dari variasi perseorangan.
5. Antropologi rasial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang *penggolongan manusia* dalam kelompok-kelompok ras, sejarah ras manusia dan hal-hal tentang pencampuran ras.

**b) Antropologi budaya** yaitu: menyelidiki Kebudayaan manusia pada umumnya dan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai bangsa di dunia (menyelidiki seluruh cara hidup manusia). Adapun cabang-cabang antropologi budaya yaitu:

1. Prehistory: mempelajari sejarah perkembangan persebaran kebudayaan-kebudayaan manusia di muka bumi dalam zaman manusia belum mengenal huruf.
2. Etnolinguistik: mempelajari kebudayaan manusia di

dalam kehidupan masyarakat, yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya suku bangsa yang tersebar dari ucapan-ucapan dan perbendaharaan kata.

3. Etnologi: mempelajari tentang kebudayaan manusia yang di muka bumi.

Setidaknya terdapat beberapa aspek yang perlu dipelajari dalam rangka memahami antropologi, diuraikan berikut.

1. Pemahaman mengenai definisi atau pengertian antropologi sebagai sebuah istilah ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dipahami berdasarkan penelusuran pengertian antropologi dari segi bahasa dan istilah.
2. Pemahaman manfaat antropologi baik dari segi pengembangan ilmu maupun dalam perikahidupan sehari-hari. Bagian ini merupakan aspek yang ditunjukkan dalam rangka membangun motivasi pembelajar mengenai manfaat-manfaat yang dapat dipetik melalui kajian dan penelitian antropologi.
3. Sejarah antropologi yang membantu pembelajar memahami perkembangan antropologi dari periode awal hingga perkembangan mutakhirnya.
4. Aspek-aspek kajian antropologi membantu pembelajar memahami dimensi bidang garap antropologi yang membedakannya dari disiplin lain.
5. Cabang-cabang antropologi mengkaji pengkhususan-pengkhususan wilayah kajian antropologi hingga sesuai dengan lapangan kajian dan urgensitas tertentu.
6. Konsep-konsep antropologi mengaji persepsi-persepsi atau asumsi-asumsi dasar yang mendasari pola kajian antropologi, terutama terkait dengan aspek-aspek ke-budayaan yang berhasil dikembangkan para tokohnya, antropolog.

7. Metode antropologi menyajikan berbagai pendekatan yang biasa digunakan untuk menelaah antropologi sebagai sebuah lapangan kajian.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Antropologi**

Menurut Astawa (2017: 141), sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi pada hakikatnya mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

- a. Mendeskripsikan selengkap mungkin tata ara kehidupan kelompok manusia dariberbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu.
- b. Memahami manusiasebagai kelompok tertentu secara keseluruhan
- c. Menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk.

Berpijak pada tujuan dalam mempelajari antropologi tersebut, dapat dikemukakan paling tidak terdapat empat nilai guna dalam mempelajari antropologi, yaitu:

- a. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat (suku bangsa).
- b. Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang disandang.
- c. Akan memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia diseluruh dunia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi.

- d. Dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kecakapan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya.

Secara lebih luas, manfaat antropologi yaitu:

- a. Pemahaman atau penjelasan yang diberikan antropologi terhadap perkembangan manusia secara fisik dari masa lalu hingga masa kini membantu memprediksi perkembangan fisik manusia pada masa mendatang.
- b. Kajian antropologi terhadap perkembangan dan keragaman ras fisik manusia mampu memetakan potensi-potensi manusia pada ras satu dan lainnya.
- c. Penjelasan antropologi tentang asal mula dan perkembangan bahasa bangsa-bangsa akan banyak menjembatani komunikasi yang lebih intens antar bangsa satu dan lainnya. Hal ini dikarenakan perhatian antropologi tidak terletak pada penerjemahan bahasa melainkan pada konteks keterkaitan bahasa dengan budaya suatu bangsa.
- d. memberikan banyak informasi mengenai penyebaran dan keterkaitan bangsa satu dan lainnya.
- e. Manusia dapat belajar dan memperkembangkan pola hidup yang semakin inklusif dan saling bekerja sama, karena pada dasarnya budaya bukan sesuatu yang statis. Budaya yang dianut manusia terus berubah dan berkembang.

## **5. Konsep Dasar Antropologi pada IPS**

Adapun kosed dasar Antropologi yang dikaji dan dimasukkan dalam IPS, antara lain:

**a. Konsep evolusi sosial universal.**

Konsep ini diperkenalkan oleh H. Spencer. Seluruh alam baik organis, nonorganik, maupun superorganik senantiasa berevolusi. Evolusi tersebut didorong oleh kekuatan mutlak yang disebut evolusi universal. Gambaran menyeluruh tentang evolusi universal manusia memperlihatkan bahwa dalam garis besarnya perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap bangsa di dunia telah atau sedang melalui tingkat-tingkat evolusi yang sama. Meski demikian tak dapat diabaikan bahwa secara khusus tiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan bisa mengalami proses evolusi serupa. Konsep mengenai proses evolusi tersebut sama sebagaimana konsep evolusi pada umumnya. Seperti halnya proses evolusi biologi, jenis-jenis makhluk yang bisa hidup adalah jenis-jenis yang sesuai dengan persyaratan lingkungan alamnya. Dalam evolusi sosial, aturan-aturan hidup manusia serta hukum yang dapat bertahan di dalamnya adalah hukum yang melindungi kebutuhan warganya; yakni hukum yang paling cocok dengan persyaratan masyarakat di mana mereka hidup; hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling berkuasa, yang paling pandai, dan yang paling mampu. Kurang lebih pandangan ini sama dengan pandangan hukum evolusi dengan adagiumnya yang paling terkenal, *survival of the fittest*, siapa yang kuat dia yang bertahan. Jenis atau individu dapat bertahan adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan lingkungannya.

**b. Konsep *kulturkreis* dan *kulturschicht*.**

Konsep ini diperkenalkan oleh F. Graebner. Graebner menawarkan suatu cara baru untuk menyusun benda-benda kebudayaan

di museum. Biasanya benda-benda tersebut disusun menurut asalnya, tetapi oleh Graebner disusun berdasarkan persamaan dari unsur-unsur tersebut. Sekumpulan tempat di mana ditirukan benda yang sama sifatnya disebut berada dalam satu Kulturkreis.

**c. Konsep daerah kebudayaan (*culture area*).**

Konsep Culture Area dicetuskan oleh Wissler. Culture Area dikembangkan berdasarkan pembagian kebudayaan-kebudayaan Indian di Amerika ke dalam daerah-daerah yang merupakan kesatuan corak kebudayaan tertentu. Konsep Culture Area dikembangkan karena keinginan Wissler mengklasifikasikan benda-benda dari kebudayaan-kebudayaan suku bangsa Indian yang tinggal terpencar di Benua Amerika Utara ke dalam kelompok-kelompok tertentu dalam rangka pameran di museum. Dalam satu Culture Area digolongkan berpuluh-puluh kebudayaan yang berbeda satu sama lain ke dalam satu kelompok berdasarkan atas persamaan dari sejumlah ciri yang mencolok dalam kebudayaan-kebudayaan tersebut. Ciri-ciri itu tidak hanya berupa unsur kebendaan, seperti alat-alat berburu, alat-alat bertani, senjata, ornamen, bentuk dan gaya pakaian, bentuk tempat kediaman dan sebagainya, melainkan juga unsur-unsur yang lebih abstrak, seperti unsur-unsur sistem organisasi sosial, dasar-dasar mata pencaharian hidup, sistem perekonomian, upacara keagamaan, dan sebagainya.

**d. Konsep azas klasifikasi elementer.**

Konsep ini dikembangkan oleh Levi-Strauss. Menurutnya, dalam akal pikiran manusia secara universal merasakan dirinya berhubungan dengan hal-hal tertentu dalam alam

semesta sekelilingnya, atau dengan manusia-manusia tertentu dalam lingkungan sosial-budayanya. Manusia merasa dirinya ber-ototeman (dalam bahasa Ojibwa berarti “dia adalah kerabat pria saya”) dengan hal-hal itu. Dalam hubungan itu manusia mengklasifikasikan lingkungan alam serta sosial budayanya ke dalam kategori-kategori yang elementer.

## **F. Konsep Dasar Sejarah**

### **1. Pengertian sejarah**

Kajian Ilmu sejarah sangat menjadi sebuah kajian jejak dan sejarah yang terjadi memuat kehidupan manusia dimasa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Supardan (2011: 287), istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yakni *syajaratun* (dibaca *syajarah*), yang artinya pohon kayu. Pengertian pohon kayu disini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Hostori yang bersumber dari bahasa Yunani kuno *historia* yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Kata *historia* diartikan sebagai telaahan mengenai gejala-gejala (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis.

Setelah menelusuri arti sejarah yang dikaitkan dengan arti *syajarah* dan dihubungkan dengan kata *histori*, bersumber dari kata *historia* dapat disimpulkan bahwa sejarah ialah cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau.

### **2. Objek Kajian Sejarah**

Menurut Astawa (2017: 170), secara keilmuiah sejarah memiliki dua objek studi yaitu objek formal dan objek material. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia. Sementara,

objek formal digunakan untuk mengkaji objek materialnya adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau.

### **3. Ruang Lingkup Sejarah**

Dilihat dari ruang lingkungannya, terutama pembagian sejarah secara tematik, sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Sjamsuddin dan Burke dalam Supardan (2011: 293), mengelompokkan dalam belasan jenis sejarah yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi, psikologi histori, sejarah pendidikan dan sejarah medis.

### **4. Manfaat dan Tujuan Mempelajari Sejarah**

Menurut Kartodirdjo dan Kontowiyoyo dalam Astawa (2017: 175-178), pada hakikatnya sejarah memiliki dua nilai guna yang menunjukkan eksistensinya sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, yaitu nilai intrinsik dan ekstrinsik.

#### **a) Nilai intrinsik**

Setidaknya ada empat manfaat sejarah intrinsik, yaitu:

1. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka. Keterbukaan itu membuat siapapun dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah (tidak seperti profesi lain seperti dokter, guru, wartawan, dan lain-lain), asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan cara: (1) perkembangan dalam filsafat; (2) perkembangan dalam teori sejarah; (3) perkembangan dalam ilmu lain; (4) perkembangan dalam metode sejarah.

2. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Selain mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Ada setidaknya dua sikap terhadap sejarah setelah mengetahui masa lampainya, yaitu (1) melestarikan; (2) menolak. Melestarikan karena menganggap masa lampau itu penuh makna.
3. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Sebagai contoh yang berkembang di Amerika ada dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah: (1) konsensus; (2) konflik. Aliran konsensus berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus, dan para sejarawan selalu bersikap kompromistis. Sebaliknya, aliran konflik menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah.

Kartodirdjo mengemukakan bahwa secara intrinsik sejarah mempunyai kegunaan genetis dan kegunaan didaktik. Pada kegunaan genetis, nilai-nilai luhur yang terdapat pada setiap peristiwa masa lampau perlu diwariskan secara turun-menurun agar dapat membentuk watak manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sedangkan sebagai kegunaan didaktik atau pendidikan nilai-nilai luhur yang terdapat pada peristiwa masa lampau perlu diwariskan kepada generasi muda agar dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Memperhatikan kegunaan tersebut, secara intrinsik dapat dikemukakan bahwa sejarah memiliki kegunaan edukatif atau pendidikan dan kegunaan instruktif atau memberikan pengajaran.

## **b) Nilai ekstrinsik**

### **1) Kegunaan inspiratif**

Sejarah berguna untuk memberikan inspirasi atau pemikiran. Berbagai peristiwa pada masa lampau akan memberikan inspirasi pada pembentukan moral dan karakter bangsa. Misalnya semangat 45 yang memiliki nilai-nilai persatuan dan kesatuan, rela berjuang, berkorban tanpa pamrih, dan cinta tanah air. Melalui sejarah, generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa dapat memiliki inspirasi dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa melalui bidang pendidikan dengan cara menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, sejarah dapat menginspirasi munculnya ide-ide serta kreatifitas generasi muda untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan bangsa.

### **2) Kegunaan rekreatif**

Situs-situs sejarah dan prasejarah, di samping sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Melalui jejak-jejak sejarah pada situs-situs tersebut orang akan diajak kembali berekreasi menikmati keindahan masa lampau.

Fungsi rekreasi sejarah dalam hal ini dapat dinyatakan berperan sebagai pemandu atau memberikan petunjuk-petunjuk penting terhadap peninggalan sejarah. Sejarah memberikan informasi secara lengkap peninggalan-peninggalan sebagai bukti bahwa pada masa lampau manusia telah mengembangkan kebudayaannya dari berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, peristiwa

masa lampau harus disusun menjadi kisah sejarah yang menarik serta dapat menimbulkan minat orang untuk membacanya.

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan sejarah dapat dipilah pada dua kategori, yaitu 1) sejarah sebagai ilmu pengetahuan, dan 2) sejarah sebagai informasi.

Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu sejarah berperan mengeliminasi data-data dan informasi yang potensial mengurangi nilai objektifitas sejarah. Sejarah akan kehilangan nilai dan makna ilmiahnya bilamana tidak mampu mengeliminasi hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai objektivitasnya. Sedangkan sebagai informasi, sejarah dapat menjadi hiburan sekaligus ilham. Sejarah diperlukan untuk membangun pemahaman yang tepat dan porsional tentang berbagai fenomena di masa lalu, sebagai bahan pemikiran dalam memahami dan mengarifi berbagai persoalan di masa sekarang dan yang akan datang.

## **5. Konsep Dasar Sejarah pada IPS**

Secara konseptual, sejarah pada dasarnya berkenaan dengan tiga aspek konseptual yang mendasarinya, yaitu konsep tentang perubahan, konsep waktu dan kontinuitas.

### **a. Konsep Perubahan**

Sejarah adalah perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain. Meski demikian, hanya perubahan yang benar-benar memiliki makna penting bagi kehidupan manusia yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa perubahan yang bernilai sejarah. Termasuk dalam kategori ini di antaranya perubahan rejim kolonial ke nasional, dari Soekarno ke Orde Baru, atau Orde Baru ke era demokratisasi.

b. Konsep Waktu

Peristiwa sejarah bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, bukan pula terjadi begitu saja tanpa sebab apapun. Setiap peristiwa yang terjadi di suatu waktu dapat dipastikan tidak berdiri sendiri saat peristiwa terjadi. Setiap peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu pasti ada kaitannya dengan waktu sebelum dan sesudahnya. Bila dirunut melalui penelaahan sejarah, sangat mungkin ditemukan keterkaitan suatu peristiwa dengan situasi atau peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Terjadinya suatu peristiwa senantiasa dikarenakan oleh suatu sebab yang ada dalam alur waktu. Konteks hubungan sebab-akibat peristiwa yang menjadi akibat dengan peristiwa lain yang menjadi sebab ada dalam dimensi waktu. Dalam konteks tertentu waktu dapat pula menjadi sebab, meski tidak pernah benar-benar menjadi akibat.

c. Konsep Kontinuitas

Kehidupan manusia berada dalam rangkaian perubahan demi perubahan yang berkesinambungan. Perubahan demi perubahan tersebut tidak akan berhenti pada suatu titik peristiwa. Dalam konteks kekinian (postmodern) bahkan diyakini bahwa perubahan telah menjadi sesuatu yang pasti sebagaimana ungkapan ahli masa depan (futurolog), “Saat ini yang pasti adalah ketidakpastian dan yang tetap adalah perubahan (*the certain now is uncertain and the constant now is changing*)”.

Sebagian perubahan yang terjadi tentunya ada yang bermakna sangat dalam bagi manusia, tetapi sebagian lagi sangat boleh jadi tidak demikian. Kebermaknaan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kedekatan,

hubungan, kepentingan atau dampak suatu perubahan terhadap manusia tertentu. Perubahan-perubahan tertentu yang menjadi momentum sejarah tertentu bahkan sangat mungkin mengubah kehidupan banyak orang. Perubahan dari rejim kolonial ke nasional telah banyak mengubah nasib dan pola hidup masyarakat bekas jajahan. Perubahan dari pemerintahan demokrasi ke otoriter atau sebaliknya terbukti banyak mengubah nasib dan jalan hidup sekelompok manusia di suatu daerah atau negara. Dalam catatan sejarah, fenomena semacam ini dapat dicermati pada peristiwa kemenangan revolusi komunis di berbagai negara. Selain diwarnai dengan berbagai tindak kekerasan, penyiksaan bahkan pembunuhan, masa-masa selama pemerintahan komunis menyebabkan masyarakat dituntut untuk mengubah pola hidup, pola pikir, bahkan orientasi hidupnya. Demikian halnya pada saat rejim komunis tumbang di banyak negara, pola hidup dan pola hubungan dalam masyarakat dengan sendirinya juga berubah total.

Dari paparan di atas dapat dinyatakan bahwa bagian terpenting dari sejarah adalah adanya peristiwa yang terjadi di masa lalu. Hanya saja, tidak semua peristiwa di masa lalu dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Hal ini dikarenakan peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah harus memenuhi beberapa kriteria, yakni (a) peristiwa unik, tidak biasa, atau terjadi secara fenomenal atau bahkan monumental, (b) peristiwa perubahan, (c) proses yang bersifat kausalistik, bukan kebetulan, (d) memiliki arti penting dalam kehidupan, dan (e) subjektif dalam hal penulisan ataupun penafsiran fakta objektif.

## **G. Konsep Dasar Psikologi Sosial**

### **1. Pengertian Psikologi Sosial**

Psikologi merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda “*psychologie*” atau dari bahasa Inggris “*psychology*”. Ditinjau dari sudut asal katanya, kata *psychologie* atau *psychology* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua buah kata, yaitu “*psyche*” dan “*logos*” yang berarti jiwa dan ilmu (Walgito, 2002: 1). Berdasarkan kedua pengertian itu, maka orang dengan mudah memberikan batasan atau pengertian psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau sering disebut dengan ilmu jiwa.

Menurut Shaw dan Costanzo dalam Soeparno dan Sandra (2011: 16), psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individual sebagai fungsi stimulus-stimulus sosial. Senada dengan pendapat ini, Sherif dan Muzfer (2011: 17), mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu tentang pengalaman dan perilaku individu dalam kaitannya dengan situasi stimulus sosial.

Berikut ini adalah kutipan beberapa pendapat tokoh tentang pengertian psikologi sosial yang dirangkum oleh Ahmadi (2002), sebagai berikut:

- a. Kamus Paedagogik menyatakan bahwa : “Psikologi sosial ialah ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala psikis pada massa, bangsa, golongan, masyarakat dan sebagainya. Lawannya : Psikologi individu (orang-orang).”
- b. Hubert Bonner dalam bukunya “*Social Psychology*” menyatakan “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia. “Definisi ini menunjukkan bahwa Bonner lebih menitikberatkan pada tingkah laku individu, bukan tingkah laku sosial. Tingkah laku inilah

yang menjadi pokok atau sasaran utama dalam mempelajari psikologi sosial.

- c. A.M. Chorus dalam bukunya “Gronslagen der sociale Psychologie” merumuskan bahwa: “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu manusia sebagai anggota suatu masyarakat.” Chorus memberikan definisi tersebut dengan kesadaran bahwa setiap manusia yang normal akan hidup dan berhubungan bersama dengan masyarakat.
- d. Sherif & Sherif dalam bukunya “An Outline of Social Psychology” memberikan definisi sebagai berikut: “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku individu manusia dalam kaitannya dengan situasi-situasi perangsang sosial”. Dalam definisi ini, tingkah laku telah dihubungkan dengan situasi-situasi perangsang sosial.
- e. Roueck and Warren dalam bukunya “Sociology” memberikan batasan bahwa : “Psikologi sosial ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari segi-segi psikologis daripada tingkah laku manusia, yang dipengaruhi oleh interaksi sosial.” Dalam definisi ini telah dinyatakan bahwa interaksi manusia telah nyata pengaruhnya pada tingkah laku manusia.
- f. Boring, Langveld, and Weld dalam bukunya “ Foundations of Psychology” berpendapat bahwa : “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari individu manusia dalam kelompoknya dan hubungan antara manusia dengan manusia.”
- g. Kimball Young (1956) menyatakan bahwa : “Psikologi sosial adalah studi tentang proses interaksi individu manusia.”
- h. Krech, Crutchfield, dan Ballachey (1962) menyatakan bahwa:

“Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu di dalam masyarakat.”

- i. Joseph E. Mc. Grath (1965) menyatakan bahwa : “Psikologi sosial adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku manusia sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran, keyakinan, tindakan, dan lambing-lambang dari orang lain.

Pendapat-pendapat di atas satu sama lain saling melengkapi dan menyempurnakan dan tidak ada pertentangan diantaranya. Sehingga dapat disimpulkan Psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. “Dengan demikian membicarakan psikologi sosial tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan individu yang berhubungan dengan situasi-situasi sosial.

## **2. Objek dan Ruang Lingkup Psikologi Sosial**

Psikologi sosial memiliki ketertarikan dengan cakupan yang luas. Walaupun demikian, fokus utama psikologi sosial yakni memahami bagaimana dan mengapa individu berperilaku, berpikir, dan memiliki perasaan tertentu dalam konteks situasi sosial. Situasi sosial yang dimaksud ialah kehadiran orang lain secara nyata maupun seara imajinatif.

Menurut Mahmudah (2011: 9), dilihat dari segi perkembangannya, psikologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) psikologi yang bersifat kefilosofatan, dan (2) psikologi yang bersifat empirik, yaitu psikologi yang berdasarkan atas pengalaman-pengalaman. Dalam domain psikologi inilah muncul dua model psikologi, yaitu: *Pertama*, Psikologi umum, yang menyelidiki dan mempelajari aktivitas-aktivitas kejiwaan atau psikis manusia pada umumnya, baik yang terdapat pada manusia dewasa, normal, maupun yang berbudaya;

di samping itu juga memandang manusia terlepas dari hubungannya dengan manusia yang lainnya. Psikologi umum mencari dalil-dalil yang bersifat umum dari kegiatan psikis yang kemudian menjadi teori-teori psikologi. *Kedua*, Psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari hal-hal yang bersifat umum dipelajari dalam lapangan psikologi.

Menurut Gerungan (1988: 29), Pokok-pokok yang menjadi materi psikologi sosial ialah mengenai kehidupan manusia. Maka, objek material psikologi sosial ialah fakta-fakta dan kejadian-kejadian dalam kehidupan sosial manusia di masyarakatnya, atau dengan kata lain gejala-gejala sosial. Sedangkan objek formal psikologi sosial ialah pengalaman dan tingkah laku individu yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mengamati orang lain, bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain, dan secara umum bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial.

Sedangkan Ahmadi (2005) menjelaskan bahwa yang menjadi obyek studi psikologi sosial adalah segala gerak-gerik atau tingkah laku yang timbul dalam konteks sosial atau lingkungan sosialnya. Oleh karenanya masalah pokok yang dipelajari adalah pengaruh sosial atau perangsang sosial. Hal ini terjadi karena pengaruh sosial inilah yang mempengaruhi tingkah laku individu. Berdasarkan inilah psikologi sosial membatasi diri dengan mempelajari dan menyelidiki tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi perangsang sosial.

Obyek pembahasan dari psikologi sosial tidaklah berbeda dengan psikologi secara umumnya. Hal ini bisa dipahami karena psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu dari psikologi. Bila obyek pembahasan psikologi adalah manusia dan kegiatannya, maka psikologi sosial adalah kegiatan-kegiatan sosialnya. Masalah yang

dikupas dalam psikologi umum adalah gejala-gejala jiwa seperti perasaan, kemauan, dan berfikir yang terlepas dari alam sekitar. Sedangkan dalam psikologi sosial masalah yang dikupas adalah manusia sebagai anggota masyarakat, seperti hubungan individu dengan individu yang lain dalam kelompoknya.

### **3. Tujuan Psikologi Sosial**

Menurut Hanurawan (2010: 2), psikologi sosial sebagai salah satu cabang psikologi yang paling penting memiliki beberapa tujuan keilmuwan. Beberapa tujuan keilmuwan dari psikologi sosial itu adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi kehadiran orang lain.

Menurut Sarwono (2008: 4), menjelaskan bahwa psikologi sosial bertujuan untuk mengerti suatu gejala atau fenomena. Dengan mengerti suatu fenomena, kita dapat membuat peramalan-peramalan tentang kapan akan terjadinya fenomena tersebut dan bagaimana hal itu akan terjadi. Selanjutnya, dengan pengertian dan kemampuan peramalan itu, kita dapat mengendalikan fenomena itu sampai batas-batas tertentu.

Tujuan psikologi sosial dalam pembelajaran IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya meliputi lima tujuan berikut.

- a. Membekali peserta didik dengan pengetahuan Psikologi sosial sehingga tidak terpengaruh, tersugesti, atau terpengaruh oleh situasi sosial yang tidak selamanya bernilai baik.
- b. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun alternatif pemecahan masalah-masalah sosial secara tepat dan sistematis mengenai proses kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan bersama.

- c. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat sehingga memudahkan dalam melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan dan pengarahannya kepada tujuan dengan sebaik-baiknya.
- d. Membekali peserta didik dengan kesadaran terhadap lingkungan sosial sehingga mampu merubah sifat dan sikap sosialnya.
- e. Membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan Psikologi sosial sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu, dan perkembangan teknologi.

Kelima tujuan di atas, menjadi tanggung jawab yang harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum Psikologi sosial di berbagai lembaga pendidikan. Tentu dengan keluasaan, kedalaman dan bobot yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.

#### **4. Konsep Dasar Psikologi Sosial pada IPS**

Konsep dasar psikologi sosial berpusat pada manusia yang memiliki potensi untuk selalu mengalami proses perkembangan setelah individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya.

Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki kecerdasan, kesadaran, dan kemauan yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Kelebihan inilah yang mendorong manusia mampu menguasai alam, menaklukkan makhluk yang lebih kuat, dan menciptakan segala sesuatu yang dapat menyempurnakan dirinya. Hal ini bisa tercapai karena dalam diri manusia terdapat potensi yang selalu mengalami proses perkembangan setelah individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya.

Psikologi sosial memberikan pemecahan persoalannya dengan

upaya pendidikan keagamaan. Perangsang sosial yang berupa pendidikan keagamaan dan lingkungan sosial yang penuh dengan kekeluargaan diharapkan mampu merubah perilaku individu menjadi lebih baik, sehingga secara bertahap persoalan mendasar dari pengaruh buruk lingkungan akan terkikis dan tergantikan dengan pengaruh yang baik dari pendidikan keagamaan.



# **PENGEMBANGAN MATERI AJAR IPS**





# BAB VII

## PENGEMBANGAN MATERI AJAR IPS

### A. Materi IPS

Materi pendidikan ialah apa yang dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa IPS berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial, sehingga materi pada IPS berasal dari ilmu sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan dst. yang berkaitan dengan materi pendidikan. Dalam materi ini terdapat substansi dan proses yang berasal dari ilmu-ilmu sosial.

Materi pendidikan yang diajarkan kepada siswa bertujuan untuk mengembangkan nilai, sikap dan moral siswa, oleh karena itu realitas kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara hendaknya dijadikan materi dasar dalam materi IPS dan dikembangkan untuk berbagai aspek.

Menurut Fatimah (2015: 48), materi IPS terdiri dari: 1) materi substansi, materi proses, dan sikap, nilai, dan moral. Untuk lebih jelas, akan dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Materi Substansi

Substansi ilmu-ilmu sosial terdiri dari pandangan, tema, topik,

fenomena, fakta, peristiwa, prosedur, konsep, generalisasi dan teori, secara tradisional disebut kurikulum. Sedangkan pengertian kurikulum secara baru ialah proses, prosedur, dan langkah-langkah yang harus ditempuh siswa dalam mempelajari substansi tersebut. Materi kurikulum yang dikembangkan dari disiplin ilmu dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan yang akan dicapai. Semakin kuat keterkaitannya, maka semakin besar kemungkinan materi itu akan dipilih sebagai materi kurikulum. Untuk PIPS setiap disiplin ilmu akan memberikan kontribusinya terhadap pengembangan materi kurikulum. Kontribusi itu tergantung dari pendekatan pengembangan kurikulum yang dipakai. Apakah memakai pendekatan pengembangan disiplin mandiri/terpisah atau korelatif/ Integratif.

## **2. Materi Proses**

Proses adalah berbagai prosedur, cara kerja, metode kerja tertentu dalam materi kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial yang harus dilaksanakan siswa di dalam kelas, dalam ruang tertentu, atau bahkan di luar lingkungan sekolah. Proses sangat berguna untuk mengembangkan wawasan, keterampilan, dan berbagai kemampuan berpikir. Dengan kemampuan, wawasan, keterampilan berpikir dan pelaksanaan teknis, apa yang dipelajari siswa bukan hanya sekedar mengetahui dan memahami saja tetapi melatih siswa bekerja berdasarkan apa yang dikemukakan dalam materi tersebut.

Menurut Hamid Hasan materi proses dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan mencari informasi, merumuskan informasi, mengolah informasi, mengembangkan informasi baru berdasarkan apa yang sudah dimilikinya, memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan. Dalam hal ini siswa harus terlibat aktif dalam proses yang dipelajarinya. Ini artinya siswa

harus belajar mengenai cara dan startegi dalam mengumpulkan informasi, sehingga siswa menjadi terampil dalam melakukannya. Hamid Hasan mengemukakan bahwa materi untuk proses belajar sebagian besar dikembangkan dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Materi proses yang dikembangkan meliputi berbagai keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan atau melalui berbagai perantara alat komunikasi yang tersedia di masyarakat.

### **3. Sikap, Nilai, dan Moral**

Sikap adalah kecenderungan psikologis seseorang terhadap benda, sifat, keadaan, pekerjaan, pendapat dan sebagainya. Sikap itu akan muncul setelah ia mengenal benda, sifat, keadaan, pekerjaan, pendapat tersebut. Sikap tersebut muncul bisa muncul dalam bentuk pernyataan setuju, tidak setuju, senang atau tidak senang, dan lain-lain. Nilai ialah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat, atau hasil kerja itu baik/positif atau jelek/negatif. Pendidikan IPS perlu mengembangkan aspek sikap, nilai dan moral, karena:

- a. Dalam setiap disiplin ilmu ketiga unsur itu ada, tidak ada disiplin ilmu yang bebas dari ketiga unsur tadi.
- b. Berhubungan dengan pendidikan IPS sebagai wahana untuk menarik perhatian generasi muda sehingga mereka mau belajar dan melanjutkan pendidikannya di jejang yang lebih tinggi dalam ilmu-ilmu sosial.
- c. IPS memiliki tugas mengembangkan kepribadian siswayang utuh dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga nilai dan moral yang ada di masyarakat menjadi bagian dari diri siswa.

Sikap, nilai dan moral yang dapat dikembangkan IPS yaitu:

- a. Pengetahuan dan pemahaman nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat seperti:
  - 1) Religiusitas
  - 2) Penghormatan terhadap keteladanan
  - 3) Prestasi
  - 4) Sifat kepedulian sosial
  - 5) Menghormati orang tua
  - 6) Kepedulian terhadap tetangga
- b. Toleransi
- c. Kerjasama/ gotong royong
- d. Hak azasi manusia

Hamid Hasan mengemukakan bahwa materi untuk pendidikan IPS yang memiliki wahana pengembangan sikap, nilai, dan moral dapat dikembangkan dari materi disiplin ilmu-ilmu sosial atau berdasarkan nilai, sikap, dan moral yang berlaku di masyarakat. Suatu konsep memiliki materi dan materi itu dikembangkan dari kenyataan hidup dalam masyarakat. Untuk nilai, norma, dan moral yang ditentukan keberlakuannya dalam masyarakat. masyarakatlah yang menentukan apakah suatu isi suatu nilai, norma dan moral dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari atautkah tidak ada kesesuaian dengan apa yang berlaku di masyarakat. jika ia tidak sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat maka apakah ketidaksesuaian itu dianggap sebagai pengembangan nilai, norma atau moral yang berlaku atau sesuatu yang membahayakan.

Nilai dan moral menurut Hamid Hasan ialah nilai dan moral yang diterima oleh masyarakat, etnis atau bangsa tertentu. Dalam hal ini, pendidikan IPS harus berhati-hati, jangan sampai mengulang secara tidak perlu materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Materi yang berasal dari pendidikan seperti nilai 36 butir dari Ekaprasetya Pancakarsa tidak dapat dijadikan materi pendidikan

pancasila. Meskipun demikian, untuk kepentingan pendidikan berbagai materi tersebut dapat diambil untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial. Untuk memilih materi apa yang dikembangkan, maka tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan materi disiplin ilmu-ilmu sosial dapat digunakan sebagai pegangan. Misalnya materi sosiologi dan antropologi yang berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan bangsa Indonesia. dalam kebudayaan dikenal adanya berbagai etnis yang berbeda satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, materi yang sifatnya demikian memungkinkan pembahasan sikap hormat-menghormati antar etnis tersebut. Demikian pula pembahasan mengenai nilai yang harus dikembangkan berhubungan dengan adanya berbagai etnis tersebut di mana setiap kelompok etnis memiliki nilai sosial dan budaya yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Contoh lainnya yaitu berhubungan dengan rasa cinta tanah air.

Materi yang sesuai untuk mengembangkan sikap bahkan menjadikannya sebagai nilai hidup seorang peserta didik untuk hal demikian adalah materi disiplin sejarah. Untuk mengembangkan sikap, dan cinta tanah air guru dapat pula dengan melalui kajian mengenai pergerakan kebangsaan yang dialami bangsa Indonesia. Cara pengembangan materi disiplin ilmu-ilmu sosial harus dibedakan dengan pengembangan materi yang dilakukan dalam PKn. Dalam IPS materi tersebut harus dikembangkan berdasarkan pemikiran logis dan tidak dogmatis. Dari pemikiran logis itu siswa harus dapat diyakinkan atas pentingnya sikap, nilai dan moral . jadi, bukan berdasarkan pertimbangan keputusan atau produk hukum resmi yang mengharuskan pengembangan materi yang demikian.

Dalam kenyataan kurikulum materi yang bersifat sikap, nilai dan moral tidak tercantum secara tersurat. Guru IPS harus mampu mengidentifikasi (menemu-tunjukkan) sikap, nilai, dan bahkan moral

yang dapat dikembangkan.

## **B. Pengorganisasi Materi IPS**

Menurut Fatimah (2015: 64-66), pengorganisasi materi ialah membahas mengenai bagaimana materi yang ada diatur sehingga ia merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh.

### **1. Pengorganisasi Terpisah**

Setiap disiplin ilmu sosial diajarkan secara terpisah. Disiplin ilmu sosial yang diajarkan membawa karakteristiknya masing-masing. Contohnya: sejarah diajarkan terlepas dari geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi atau politik. Keuntungannya ialah pertama, Siswa belajar bisa fokus pada satu disiplin ilmu sosial. Contoh: jika siswa belajar sejarah maka konsep, masalah dan solusi dari permasalahan terfokus pada ilmu sejarah saja; kedua, Pengembangan tujuan dan materi menjadi lebih mudah bagi guru. Guru yang mendalami bidang sejarah hanya akan memikirkan tujuan dan materi sejarah bagi kelas yang mejadi tanggung jawabnya. Kelemahannya yaitu pertama, Dikarenakan terpisahnya pengorganisasian materi, masing-masing disiplin ilmu hanya memikirkan bagiannya saja dan faktor anak didik dan kenyataan kehidupan riil tidak menjadi pertimbangan; kedua, Siswa tidak diajak untuk melihat masalah sosial yang menjadi objek kajian disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai satu kesatuan utuh, akibatnya fenomena itu dapat dikaji dengan baik secara akademik, tetapi tidak cukup kuat sebagai dasar untuk memecahkan masalah sosial. Idealnya pengorganisasian materi seperti ini untuk jenjang perguruan tinggi.

### **2. Pengorganisasi Korelatif**

Pengorganisasian ini tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu

yang bersangkutan. Pengorganisasian ini hanya mencoba mencari keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Melalui keterkaitan itu siswa belajar mengenai satu pokok bahasan dari suatu disiplin ilmu berhubungan dengan pokok bahasan lain dari disiplin ilmu lainnya. Pokok bahasan yang dibicarakan pada hari yang sama memang berbeda, tapi memperlihatkan hubungan yang jelas. Dalam pengorganisasian ini, pengembangan materi disiplin ilmu lebih sulit. Tim yang mengembangkan materi kurikulum maupun materi pengajaran harus kompak: mereka harus membicarakan apa yang telah mereka kembangkan dan bagaimana keterhubungan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Contoh: Sejarah membicarakan peristiwa Rengasdengklok, maka geografi membahas mengenai provinsi Jawa Barat, antropologi membahas nilai yang berlaku dalam hubungan antara orang yang dianggap tua dan muda, sehingga siswa akan memahami bagaimana hubungan antara tokoh Soekarno Hatta yang dianggap tua dengan golongan muda pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan.

Pendekatan yang digunakan dalam struktur materi IPS dapat menggunakan pendekatan antar disiplin dan pendekatan berbagai disiplin. Kedua pendekatan ini menggunakan lebih dari satu disiplin ilmu tetapi dalam pendekatan antardisiplin, ada satu disiplin ilmu yang dijadikan sumber materi utama sedangkan disiplin ilmu lainnya dijadikan sebagai sumber untuk menambah kedalaman dan keluasan materi tadi. Misalkan dari geografi dikembangkan materi kajian utama mengenai kependudukan, sedangkan materi disiplin ilmu sosial lainnya sebagai materi perluasan dan pendalaman, misalnya dari sejarah dibicarakan perkembangan penduduk dari masa sebelumnya, dari sosiologi dibicarakan pertambahan penduduk berdasarkan status sosialnya, sedangkan dari ekonomi dibahas mengenai konsekuensi dari pertambahan penduduk yang dihubungkan dengan penyediaan lapangan kerja, produksi, konsumsi serta pendapatan nasional.

Pokok bahasan dari disiplin penunjang dikembangkan berdasarkan keperluan materi pokok bahasan tertentu. Sekuensi materi pokok bahasan tidak berdasarkan tata urutan keilmuannya, tetapi ia mengikuti tata urutan materi disiplin utama.

Materi disiplin lain dikembangkan sebagai dukungan pendalaman terhadap materi utama. Kedudukan disiplin geografi dalam contoh diatas adalah sebagai disiplin utama. Disiplin lain bersifat membantu dan kedudukannya adalah menyumbang terhadap apa yang diperlukan disiplin utama. Kedudukan yang dibicarakan disini adalah kedudukan disiplin ilmu yang bersangkutan terhadap masalah. Suatu disiplin dikatakan memiliki kedudukan utama jika ia langsung berhubungan dengan masalah dibahas sedangkan dalam kedudukan yang menyumbang, maka suatu disiplin tidak langsung berkaitan dengan masalah tetapi ia menjadi penyumbang bagi disiplin utama dalam melakukan kajian terhadap masalah.

Pembahasan yang menggunakan pendekatan antardisiplin memang akan memberikan kedalaman pengetahuan dan wawasan siswa yang belajar PIPS. Berbagai dimensi dari persoalan penduduk dibahas secara seksama sehingga siswa dapat menemukan persoalan dasar dari masalah kependudukan.

Pendekatan yang demikian meminta kemampuan siswa untuk berfikir meluas dan mendalam. Oleh karena itu, pendekatan semacam ini memerlukan ketekunan dan penguasaan materi yang sangat baik serta kelincahan berfikir pada waktu beralih dari suatu pandangan disiplin ilmu tertentu ke pandangan disiplin ilmu lainnya.

Dalam pendekatan antar disiplin, guru IPS dapat meminta bantuan temannya yang memiliki latar belakang pendidikan dalam suatu disiplin ilmu lain untuk membantu membahas pokok permasalahan penduduk itu. Karena tidak semua guru menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dengan baik. Dalam mengembangkan

pendekatan antardisiplin ini, perencanaan pengajaran sudah harus dilakukan sejak awal atau awal catur wulan. Pada waktu itu sudah harus ditentukan pokok bahasan mana yang akan diajarkan secara antardisiplin. Setelah itu harus dibicarakan dengan teman sejawat mengenai sumbangan dari disiplin ilmunya terhadap pokok permasalahan yang sudah diidentifikasi.

Kelemahan pendekatan interdisiplin ini ialah sulit mengatur waktu jika sewaktu-waktu guru IPS memerlukan bantuan dari guru lainnya. Selain itu pendekatan ini menuntut kemampuan berfikir yang tinggi dari siswa. Siswa diminta untuk beralih dalam berfikir dari satu disiplin ke disiplin lainnya dalam waktu yang bersamaan.

Pendekatan multidisiplin dalam perencanaannya pendekatan ini lebih rumit dibandingkan pendekatan interdisiplin, tetapi pengajarannya lebih mudah. Dalam pendekatan ini, kedudukan setiap disiplin ilmu itu sejajar dan pengajaran dapat dilakukan dalam waktu yang terpisah, tidak perlu dalam jam yang sama asalkan dalam minggu yang sama. Dalam pendekatan ini materi pelajaran untuk satu kali pertemuan dikembangkan sedemikian rupa sehingga siswa belajar satu pokok bahasan dalam berbagai disiplin ilmu.

Perbedaannya dari pendekatan antardisiplin ialah dalam pendekatan multidisiplin pokok bahasan utama tidak ada dan disiplin utama untuk pokok bahasan juga tidak ada. Setiap disiplin ilmu memiliki kedudukan sejajar dan pokok bahasan yang dibicarakan ialah pokok bahasan utama.

Ada dua cara yang dapat dikembangkan dalam penerapan pendekatan multidisiplin. Pertama, dengan cara mencari pokok bahasan atau konsep yang sama untuk setiap disiplin. Konsep ruang dan waktu dapat dibahas bersama sejarah dan geografi. Konsep distribusi dapat dibahas bersama antara geografi dengan ekonomi, dan sebagainya.

Pada awal semester guru-guru yang mengajar disiplin ilmu-ilmu sosial pada kelas yang sama dapat melakukan identifikasi pokok-pokok bahasan yang sama atau memiliki atau memiliki kesamaan seperti yang dikemukakan dalam pembicaraan mengenai kesamaan nama konsep. Guru-guru tersebut dapat menentukan minggu bersama yang akan digunakan membahas pokok-pokok bahasan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang akan dibicarakan pun sudah dapat dikembangkan pada saat perencanaan tersebut.

### **3. Pengorganisasi Fusi**

Ciri dalam disiplin ilmu sudah tidak nampak, sehingga dalam materi tidak bisa dikatakan bahwa ini bahasan geografi, ekonomi atau sosiologi. Seolah-olah ada kesan muncul sesuatu yang baru dari disiplin yang ada. Peleburan dilakukan untuk kepentingan pendidikan (kepentingan siswa) bukan untuk pertimbangan keilmuan.

Materi yang dikembangkan tidak diidentifikasi dari suatu disiplin ilmu, tapi materi yang menjadi pokok bahasan dikembangkan dari fenomena sosial yang ada atau mengidentifikasi berbagai teori, generalisasi, konsep, prosedur yang berlaku untuk berbagai disiplin ilmu yang ada. Konsep sering kali kaku dan keberlakuannya terbatas pada satu disiplin ilmu tertentu.

Pengorganisasi materi dengan fusi ini meminta disiplin ilmu untuk tidak menonjolkan dirinya. Sebagai contoh apabila pokok bahasan yang diidentifikasi dan akan diajarkan adalah penduduk, maka konsep-konsep penting digunakan untuk membahas pokok bahasan tersebut tanpa mengidentifikasi disiplin ilmu asal konsep tersebut. Oleh karena itu, konsep distribusi penduduk dilihat dari distribusi geografis, distribusi sosiologis ataupun distribusi antropologis.

Pengorganisasi ini banyak menghilangkan karakteristik disiplin ilmu. Siswa dapat berpikir dalam alur berpikir logis yang sifatnya umum dan tidak terbatas pada logika keilmuan disiplin tertentu. Dalam kenyataan kurikulum yang ada di sekolah sekarang, kurikulum IPS SD dan SMP dimaksudkan sebagai organisasi fusi sedangkan pengembangan materi pendidikan ilmu sosial di SMA menggunakan pendekatan terpisah.

### **C. Struktur IPS**

Struktur Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terdiri dari fakta, konsep, generalisasi dan teori. Pemanfaatan fakta, konsep, generalisasi dan teori dalam pengajaran IPS bukanlah suatu hal yang baru. Namun dalam proses belajar mengajar sering kali penggunaan istilah ini kurang tepat bahkan para siswa sering bingung apa yang dimaksud dengan fakta, konsep, generalisasi dan teori tersebut. Hal ini disebabkan pengetahuan tentang fakta, konsep, generalisasi tersebut bersifat abstrak, oleh sebab itu bagian ini akan membahas struktur IPS IPS yang terdiri dari fakta, konsep, generalisasi dan teori tersebut.

Jacob Bronowski dalam Supardi (2011:13), menjelaskan bahwa ilmu adalah aktivitas menyusun fakta-fakta yang diketahui dalam kelompok-kelompok di bawah konsep-konsep umum, dan konsep-konsep itu dinilai berdasarkan pernyataan dari tindakan-tindakan yang kita dasarkan padanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batang tubuh ilmu strukturnya, mencakup fakta, konsep, generalisasi dan teori.



Struktur Ilmu Pengetahuan Sosial

## 1. Fakta

Fakta ialah suatu objek, peristiwa, atau kejadian yang pernah terjadi pada saat ini, atau suatu jejak-jejak peristiwa yang pernah terjadi atau pernah ada pada masa lalu. Fakta dihasilkan dari data yang diperoleh di lapangan atau tempat penelitian dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran, kemudian data diolah dengan prosedur tertentu, sehingga dihasilkanlah fakta.

Fakta adalah kejadian atau suatu hal yang sifatnya berdiri sendiri yang berkaitan dengan manusia, misalnya banjir, tradisi budaya, dan orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Di sekitar kita ada jutaan fakta. Fakta-fakta tersebut perlu diketahui dan dipahami sebagai bahan untuk melakukan analisis. Fakta yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, karena setiap manusia memiliki persepsi sendiri. Fakta disiplin ilmu sejarah: nama pelaku, tempat peristiwa, tanggal, bulan, dan tahun kejadian. Fakta geografi: nama daerah, letak daerah, pantai, datar atau daerah pegunungan, bagaimana tingkat kesuburan tanahnya, dan lain-lain.

Untuk itu, perlu disadari oleh guru bahwa pembahasan tentang fakta tersebut harus diseleksi sehingga betul-betul relevan dengan kemampuan yang akan dikembangkan. Terlalu banyak fakta akan menyita waktu belajar (Saidiharjo: 2007, 27).

Oleh karena itu, sebelum diajarkan perlu dipertanyakan hal-hal sebagai berikut. 1) Mengapa fakta perlu dipelajari?, 2) Apakah pemahaman tentang fakta membantu siswa dan siswi dalam mencapai tujuan pendidikan? 3) Apakah fakta mendukung konsep yang diajarkan? 4) Apakah fakta membantu siswa dan siswi dalam mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang kehidupan manusia dan aspek- aspek yang terkait? 5) Apakah fakta relevan dengan keterampilan yang dikembangkan? 6) Bagaimana hubungan fakta dengan ilmu pengetahuan sosial?

Fakta yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, karena setiap manusia memiliki persepsi sendiri. Fakta disiplin ilmu sejarah: nama pelaku, tempat peristiwa, tanggal, bulan, dan tahun kejadian. Fakta geografi: nama daerah, letak daerah, pantai, datar atau daerah pegunungan, bagaimana tingkat kesuburan tanahnya, dan lain-lain. Fakta diperlukan untuk menentukan mana yang masuk atribut, dari atribut-atribut tersebut akan membentuk konsep.

## **2. Konsep**

Konsep menunjuk pada suatu abstraksi, penggambaran dari sesuatu yang konkret maupun abstrak dapat berbentuk pengertian, definisi ataupun gambaran mental, atribut esensial dari suatu kategori yang memiliki ciri-ciri esensial yang relatif sama. Hasil dari pengabstraksian itu kita sederhanakan dengan cara menyebutnya dengan memberi nama “nama konsep”. Konsep dirangkai dalam suatu hipotesis, dikembangkan menjadi generalisasi.

Tanwif (2009: 12) menjelaskan bahwa konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep “kebutuhan manusia”, yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Konsep juga dapat diartikan simbol atau ide

yang diciptakan oleh siswa untuk memahami pengalaman yang terjadi berulang kali.

Pemahaman suatu konsep tidak terlepas dari pengalaman dan latar belakang budaya yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap berbagai konsep, guru perlu mempertimbangkan latar belakang pengalaman yang beragam di antara mereka. Misalnya siswa yang sehari-hari hidup di kota besar mungkin memiliki pengalaman yang terbatas tentang lingkungan yang alami pedesaan, sebaliknya siswa dan siswi yang terbiasa tinggal di lingkungan pegunungan yang terpencil memiliki pengalaman terbatas tentang situasi perkotaan.

Dengan demikian, konsep ilmu pengetahuan sosial mengandung pengertian; 1) ilmu pengetahuan sosial merupakan disiplin ilmu dari disiplin ilmu-ilmu sosial, 2) disiplin ilmu itu diajarkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan pendidikan tinggi, 3) meskipun disiplin ilmu dari dasar-dasar ilmu sosial berdiri sendiri, namun dapat ditarik benang merah pada aspek-aspek nilai yang dikembangkan tiap-tiap ilmu dengan disiplin ilmu lainnya pada kajian-kajian tertentu yang relevan.

Konsep merupakan abstraksi atau pengertian abstrak, karena merupakan ide tentang sesuatu (benda, peristiwa, hal hal) yang ada dalam pikiran. Ia mengandung pengertian dan penafsiran (bukan berwujud fakta kongkrit). Konsep membantu kita dalam mengadakan pembedaan, penggolongan atau penggabungan fakta di sekeliling kita. Misalnya, kita mengenal banyak data perang seperti perang Diponegoro, perang Paderi, perang Aceh, perang Dunia, dan sebagainya. Istilah perang yang bersifat umum tidak terikat oleh ruang dan waktu (ide yang abstrak yang ada dalam pikiran yang mengandung pengertian, penilaian dan penafsiran). Hal ini dikarenakan seluruh data-data tentang perang memiliki kesamaan

ciri-ciri essensial. Dengan demikian pengertian “perang” merupakan konsep.

Suatu konsep memiliki atribut (karakteristik yang dimiliki suatu konsep). Gabungan beberapa atribut akan merupakan suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya. Contoh: meja memiliki atribut ukuran, bentuk. Ukuran meja bisa kecil atau besar, bentuknya bisa persegi, oval, persegi panjang, atau persegi empat. Untuk membedakan danau dari kolam renang digunakan atribut bentuk, ukuran dan juga letak. Tapi untuk membedakan danau, laut, dan kolam maka atribut ukuran lebih mengena.

Hal di atas sebagaimana yang diterangkan oleh Quillen and Lianna (1961) *Concept is a general idem, usually expressed by a word, wich represent a class of group of things or actions-having certain characteristics in common*” Dalam perumusan yang sederhana, konsep dapat dijelaskan sebagai abstraksi dari sejumlah (sekelompok atau semua) benda-benda (fakta-fakta) yang memiliki ciri-ciri esensial yang sama yang tidak dibatasi oleh pengertian ruang dan waktu.

Jumlah atribut yang dimiliki setiap kosep berbeda. Ada yang memiliki satu atribut ada juga yang lima, enam bahkan lebih. Semakin banyak jumlah atribut berarti semakin banyak kesamaan yang dituntut kepada sebuah benda atau sifat yang menjadi anggota konsep.

Dengan demikian, ia semakin membatasi jumlah benda atau sifat yang menjadi anggotanya. Hal ini disebabkan karena semakin banyak atribut semakin sulit untuk memenuhi apa yang dituntut atribut ini. Contoh: untuk konsep kambing lebih bayak dibandingkan dengan atribut untuk konsep binatang. Atribut untuk konsep kambing terdiri atas bentuk, bau, cara hidup, ekor, janggut kaki, kuku. Atas dasar itu seekor binatang dinamakan kambing dan yang lainnya tidak. Sedangkan untuk kosep binatang dimana kambing, gajah, ular

dan sebagainya menjadi anggota yang diperlukan hanyalah atribut bentuk dan cara hidup.

Untuk lebih rincinya, berikut dijelaskan pembagian konsep, yaitu:

- a. Konsep konjungtif: Konsep yang paling rendah. Benda atau sifat yang mejadi anggota konsep memiliki persamaan yang tinggi dalam nilai atributnya. Biasanya memiliki jumlah atribut yang banyak. Contoh: kalau orang bicara tentang buku ilmiah dengan atribut isi buku, warna sampul, ketebalan buku, serta pembaca buku, maka apabila ada sejumlah buku yang memiliki isi, semuanya mengenai ekonomi makro, warna sampulnya merah, ketebalan buku semuanya berkisar sekitar 300 halaman, serta semua buku ditulis untuk mahasiswa yang baru belajar ilmu ekonomi. Buku tadi yang dinamakan ekonomi mikro membentuk suatu konsep yang konjungtif.
- b. Konsep disjungtif: konsep yang anggota atriubutnya memiliki nilai yang beragam. Contohnya: alat kantor.
- c. Konsep relasional: kebersamaan antara anggotanya dalam suatu atribut hanyalah berdasarkan kriteria yang abstrak dan selalu dalam hubungan kriteria tertentu. Contoh: konsep jarak yang dikembangkan berdasarkan dua titik.

Sedangkan konsep-konsep yang ada pada ilmu sosial yang telah terangkum pula dalam IPS, yaitu:

- a. Konsep-konsep ilmu sejarah mengenal beberapa konsep seperti migrasi, feodalisme, imperialisme, rasionalisme, sosialisme, perang, liberalisme, perdamaian, perjanjian, persetujuan, persekutuan, candi, area, uang kuno, perdagangan, pahlawan, dan sebagainya.
- b. Konsep-konsep ilmu ekonomi mengenal beberapa konsep

- seperti tukar-menukar, uang, pasar, bursa, liberalisme, kapitalisme, imperialisme, koperasi, pajak, cukai, untung, rugi, harga, industri, produksi, distribusi, konsumen, pabrik, pengusaha, pendapatan, kerja, tenaga, jasa, dan sebagainya.
- c. Konsep-konsep ilmu geografi mengenal beberapa konsep seperti tanah, air, udara, sungai, gunung, antariksa, flora, fauna, laut, gempa, sumber alat, kependudukan, desa, kota, dan sebagainya.
  - d. Konsep-konsep antropologi mengenal beberapa konsep seperti kebudayaan, peradaban, kepercayaan, folklore, survival, adat, tradisi, induk bangsa (ras), bahasa, sistem kekerabatan, sistem mata pencaharian, kesenian, magis, upacara, religi, dan sebagainya.
  - e. Konsep-konsep sosiologi mengenal beberapa konsep seperti norma sosial, kerja sama sosial, kelompok sosial, organisasi sosial, status sosial, desa kota, urbanisasi, persaingan, kerja sama, dan sebagainya.
  - f. Konsep-konsep psikologi sosial mengenal beberapa konsep seperti norma perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku politik, budaya masyarakat, perilaku menyimpang dan sebagainya.

### **3. Generalisasi**

Generalisasi ialah pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep dan berfungsi untuk membantu dalam memudahkan pemahaman suatu maksud pernyataan itu, berfungsi mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya, bahkan dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang ada dalam generalisasi tersebut. Bentuk pernyataan generalisasi ini dapat berupa prinsip, hukum, dalil, dan pendapat. Konsep

generalisasi dapat berkembang menjadi suatu teori.

Secara sederhana konsep dirangkai dalam suatu hipotesis, dikembangkan menjadi generalisasi. Generalisasi ialah suatu pernyataan yang dibentuk dari perpaduan atau gabungan dua konsep atau lebih.

Tanwif (2009: 18) menegaskan bahwa generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual (khusus) menuju simpulan umum yang mengikat seutuh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki.

Generalisasi dalam IPS merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep, misalnya hubungan antara konsep “uang, kebutuhan, dan keinginan”. Ketiga konsep tersebut dihubungkan untuk menggeneralisasi bahwa “kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan”.

Generalisasi tersebut juga menunjukkan hubungan sebab-akibat dan ide abstrak. Rumusan generalisasi ini mungkin saja sederhana, seperti “dimana ada hutan, di situ ada manusia menggunakan kayu sebagai sumber daya utama” atau “pengangguran di Indonesia meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah”.

Dalam rumpun ilmu sosial terdapat sejumlah keterampilan yang dapat diklasifikasi menjadi keterampilan berfikir, keterampilan teknis, dan keterampilan sosial. Sejumlah keterampilan berfikir yang penting dalam ilmu sosial diantaranya adalah menarik kesimpulan, membuat generalisasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Beberapa keterampilan dikategorikan sebagai keterampilan tingkat tinggi, yakni ketika siswa menggunakan konsep dan membuat generalisasi. Yang termasuk keterampilan berfikir tingkat rendah adalah menggambarkan, menjelaskan, menggolongkan, membandingkan, meramalkan, dan melihat hubungan sebab-akibat.

Keterampilan teknis yang berhubungan dengan generalisasi

dapat pula diwujudkan melalui penggunaan berbagai media dan alat bantu dalam mencari dan menyajikan informasi. Termasuk ke dalam jenis keterampilan teknis ini adalah ketrampilan membuat tabel, diagram, gambar, peta, denah, melakukan wawancara, observasi, membuat model, mencatat hal-hal penting, membuat resensi, membuat laporan, dan melaporkannya.

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan hubungan antar manusia, misalnya bekerja sama dalam satu tim, berinteraksi dan berkomunikasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup tertentu. Dalam kaitan ini, siswa harus dilatih untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam kondisi lingkungan dan budaya yang berbeda-beda dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal yang perlu disadari sebagai dasar untuk membentuk hubungan yang harmonis adalah interaksi yang didasarkan atas saling menghormati dan saling menguntungkan.

Terdapat 2 (dua) macam generalisasi yang dijelaskan Tanwifi (2009:20) yaitu:

- a. Generalisasi sempurna, yakni generalisasi yang menempatkan seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Misalnya, setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan pada tahun Masehi kemudian menyimpulkan bahwa: Semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31 hari. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena, yaitu jumlah hari pada setiap bulan, kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Generalisasi semacam ini memberikan simpulan yang kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tidak praktis dan tidak ekonomis.
- b. Generalisasi tidak sempurna, yakni generalisasi berdasarkan sebagian fenomena yang dilakukan untuk mendapatkan

simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia kita menemukan bahwa mereka adalah manusia yang suka bergotong-royong. Atas dasar temuan ini, kita menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong-royong. Penyimpulan ini termasuk ke dalam jenis generalisasi tidak sempurna. Demikian gambaran singkat fakta, konsep, dan generalisasi yang saling bertalian dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

#### **4. Teori**

Teori yaitu prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah dan sebagainya. Teori merupakan rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi, serta perkiraan tentang implikasi (akibat) dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi tersebut yang satu sama lainnya sangat berhubungan. Kekuatan teori terletak pada kemampuannya menerangkan dan meramalkan fenomena.

Teori ialah komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah proposisi atau generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Keterhubungan antara preposisi atau generalisasi tersebut sudah diuji kebenarannya secara empirik dan dianggap berlaku secara universal. Melalui teori para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena sosial yang ada. Dengan menggunakan teori dalam materi kurikulum, maka siswa akan diajak untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sedemikian rupa sehingga terjadi *transfer of training* belajar sesuatu yang lain berdasarkan apa yang sudah diketahui atau dikuasai.

Menurut Skager dan Weinberg, makin bersemangat lapangan *inquiry* makin mendekati kenyataan teori-teori tersebut (Husein

Achmad, 1982:9). Proposisi yang menghubungkan fakta merupakan teori yang lebih mudah dari pada proposisi yang menghubungkan konsep. Selanjutnya proposisi yang menghubungkan konsep, lebih mudah dari proposisi yang menghubungkan generalisasi. Sedangkan teori yang lebih tinggi akan mengembangkan bentuk konsep yang lebih umum.

Pengertian teori dalam ilmu sosial adalah model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Teori berfungsi memberikan prediksi-prediksi berkenaan saling terlibatnya aspek-aspek.

Menurut Goetz dan Le Compte, teori dapat dibagi menjadi:

- a. *Grand Theory*: sistem yang secara ketat mengkaitkan preposisi-preposisi dan konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat digunakan, menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena besar secara non-probabilitas. Contoh: teori Challenge dan *response* oleh Toynbee menjelaskan bahwa peradaban manusia melalui empat masa yaitu kelahiran, pertumbuhan, kemunduran dan kehancuran peradaban.
- b. *Theoretical models*: keterhubungan yang longgar (tidak ketat) antara sejumlah asumsi, konsep, dan preposisi yang membentuk pandangan ilmuwan tentang dunia. Teori ini dipakai sebagai pendekatan dalam melihat, mengembangkan, dan memecahkan berbagai masalah yang diungkapkan, selain itu teori ini digunakan bukan saja untuk menjelaskan tetapi secara operasional dipakai dalam mengembangkan berbagai aktivitas ilmiah.

- c. Formal dan *Middle-range theory*: teori formal dan tingkat menengah yaitu sebagai preposisi yang berhubungan yang dikembangkan untuk menjelaskan beberapa kelompok tingkah laku manusia yang abstrak. Teori ini terbatas ruang lingkupnya dibandingkan yang kedua di atas. Generalisasi yang dijadikan dasar untuk mengembangkan teori sudah bersifat universal tetapi keterikatannya dengan data empirik masih sangat kuat. Para ilmuwan sosial mengembangkan tentang mobilitas sosial yang memiliki tingkat generalisasi yang luas. Tetapi bagaimanapun universalitas generalisasi yang dijadikan dasar masih terbatas dibandingkan dengan rekonstruksionisme sejarah atau fungsionalisme.

# **IPS DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA**





## **BAB VIII**

# **IPS DALAM MEMBANGUN KARAKTER**

### **A. IPS dan Karakter**

Secara umum dapat dirumuskan tujuan pembelajaran IPS sebagaimana diungkapkan oleh Sardiman (2006), antara lain untuk mengantarkan, membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik agar : (1) menjadi warga negara (dan juga warga dunia) yang baik; (2) mengembangkan pemahaman mengenai pengetahuan dasar keekonomian, kesejarahan, kegeografian, kesosiologian, kewarganegaraan, dan kemasyarakatan, secara terpadu (3) mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan penuh kearifan dan keterampilan inkuiri untuk dapat memahami, menyikapi, dan mengambil langkah-langkah untuk ikut memecahkan masalah sosial kebangsaan, (4) membangun komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai serta ikut mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya Indonesia, dan (5) mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, baik lokal, regional maupun internasional.

Apa kriteria dan siapa yang dikatakan sebagai warga negara yang baik? yang mampu berpikir kritis dan arif terhadap masalah sosial? memiliki kemampuan berkomunikasi dan keterampilan inkuiri? serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pengembangan budaya bangsa itu?

Menjawab pertanyaan di atas yang diungkapkan oleh (Sardiman, 2006: 6), warga negara yang baik adalah warga negara (dan warga dunia) yang: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME., setia kepada dasar falsafah dan ideologi negara Pancasila; disiplin mentaati semua peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku; memenuhi kewajibannya sebagai warga negara; menghormati dan dapat bekerja sama dengan anggota warga Negara, ikut menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan; demokratis dan bertanggung jawab, memiliki kemandirian, tenggang rasa, toleransi, dan memahami perasaan semua warga, bangsa, agama dan kebudayaan; menggunakan hak-haknya secara tepat dan proporsional. Mereka dilatih untuk bersikap arif, santun dan tidak emosional dalam memahami, menyikapi dan ikut serta dalam memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Mereka diharapkan memiliki kepekaan sosial dan rasa empati. Peserta didik dilatih untuk terampil mengambil keputusan yang membawa kemantapan dan stabilitas sosial.

Haruslah diyakini oleh seluruh komponen bangsa bahwa pembangunan budaya dan karakter bangsa itu merupakan hal yang sangat penting. Bung Karno sebagai presiden pertama RI pernah berpesan kepada kita, bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (Soedarsono, 2009).

Pendidikan IPS sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti (Darmiyati Zuchdi, 2008: 5) itu memiliki arah dan tujuan yang sama dengan tujuan pembelajaran IPS, yakni sama-sama bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik. Bahkan secara tegas Gross menyatakan bahwa *Values Education as*

*social studies “to prepare students to be well-functioning citizens in democratic society”* (Darmadi, 2007: 8).

Pendidikan karakter adalah proses pemberian bimbingan dan fasilitasi kepada peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya, manusia yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Ketiga substansi dan proses psikologis tersebut bermuara pada kehidupan moral dan kematangan pada setiap diri peserta didik, sehingga memahami kebaikan, mau berbuat baik dan berperilaku baik sebagai manifestasi dari pribadi yang baik (Warsono, 2010: 35).

Pendidikan karakter, pendidikan moral, atau pendidikan budi pekerti itu dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar menjadi warga bangsa yang baik, warga bangsa yang percaya diri, tahan uji dan bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab.. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemanusiaan. Pendidikan karakter akan mengantarkan warga belajar dengan potensi yang dimilikinya dapat menjadi insan-insan yang beradab, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehambaan dan kekhalfahan.

Dalam mendesain kurikulum pendidikan IPS, termasuk dalam proses pembelajarannya, harus juga berangkat dari hakikat dan karakter peserta didik, bukan berorientasi pada materi semata. Pendekatan esensialisme sudah saatnya untuk dimodifikasi dengan teori rekonstruksi sosial yang mengacu pada teori pendidikan interaksional (Sukmadinata, 1996: 6).

Sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat, pembelajaran IPS harus dikembalikan sesuai dengan khittah konseptualnya yang bersifat terpadu yang menekankan pada interdisipliner dan trasdisipliner, dengan pembelajaran yang

kontekstual dan transformatif, aktif dan partisipatif dalam perpektif nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, pembelajaran IPS harus memfokuskan perannya pada upaya mengembangkan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungannya.

Pembelajaran IPS diarahkan untuk melahirkan pelaku-pelaku sosial yang berdimensi personal (misalnya, berbudi luhur, disiplin, kerja keras, mandiri), dimensi sosiokultural (misalnya, cinta tanah air, menghargai dan melestarikan karya budaya sendiri, mengembangkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, kepedulian terhadap lingkungan), dimensi spiritual (misalnya, iman dan taqwa, menyadari bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta), dan dimensi intelektual (misalnya, cendekia, terampil, semangat untuk maju). Terkait dengan ini Wayan Lasmawan (2009:2-3) menjelaskan adanya tiga kompetensi dalam pembelajaran IPS, yakni kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi intelektual.

## **B. Pengertian Nilai, Norma, Moral dan Karakter**

Menurut Setiawan (2015:51-59), bahwa nilai, norma dan moral sangat penting dalam pembelajaran IPS. Pada dasarnya, Pendidikan Nilai dapat dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan nilai. Ketika dua istilah itu disatukan, arti keduanya menyatu dalam definisi Pendidikan Nilai. Namun, karena arti pendidikan dan arti nilai dimaksud dapat dimaknai berbeda, definisi Pendidikan Nilai-pun dapat beragam bergantung pada tekanan dan rumusan yang diberikan pada kedua istilah itu. Sastrapratedja (Kaswardi, 1993) menyebutkan bahwa Pendidikan Nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang.

Mardiatmadja (1986) mendefinisikan Pendidikan Nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan Nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan.

Hakam (2000: 05) mengungkapkan bahwa Pendidikan Nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut moral dan sudut pandang non moral, meliputi estetika, yakni menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, dan etika yaitu menilai benar atau salahnya dalam hubungan antar pribadi. Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan dan keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi serta di kejar dan merasakan kepuasan dan dan menjadi manusia paling benar.

Dari tiga definisi di atas, dapat dimaknai bahwa Pendidikan Nilai adalah proses bimbingan melalui suritauladan, pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara.

Untuk dapat memahami secara mendalam, berikut dijelaskan pengertian nilai, norma, moral dan hubungannya ketiganya.

## **1. Pengertian nilai**

Nilai ialah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada ada sifat dan kualitas

yang melekat pada objek tersebut. Nilai ialah harga atau kualitas sesuatu. Artinya sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik memang berharga. Dengan demikian, nilai ialah suatu bobot atau kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, bermutu, berguna, memiliki kualitas dan manfaat bagi manusia. Dalam pembelajaran di sekolah materi pembelajaran nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup.

Notonogoro dalam Setiawan (2015: 54), membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Nilai material ialah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia dan kebutuhan material ragawi manusia.
- b. Nilai vital ialah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau beraktivitas .
- c. Nilai kerohanian ialah segala sesuatu yang berguna bagi kerohanian manusia yang dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
  - Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, dan cipta) manusia
  - Nilai keindahan yang bersumber pada perasaan manusia.
  - Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak manusia.
  - Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

## **2. Jenis-jenis Nilai**

Menurut Spranger dalam Setiawan (2015: 62-62), jenis-jenis nilai terdiri dari:

- a. Nilai teoritik ialah nilai yang melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan sesuatu dan memiliki pertimbangan benar-salah menurut pertimbangan akal.
- b. Nilai ekonomi ialah nilai yang terkait dengan kadar untung rugi.
- c. Nilai estetik ialah nilai tertingginya teletak pada bentuk dan keharmonisan yaitu indah atau tidak indah.
- d. Nilai sosial ialah nilai yang tertinggi pada nilai ini ialah kasih sayang antar manusia.
- e. Nilai politik ialah kekuasaan dengan kadar nilainya yang bergerak dari instensitas pengaruh yang rendah sampai pengaruh yang tinggi.
- f. Nilai agama ialah nilai yang memiliki dasar yang kuat dari nilai-nilai sebelumnya karena bersumber dari Tuhan.

### **3. Macam-macam Nilai**

Menurut Setiawan (2015:69), menurut macam-macamnya nilai dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Nilai dasar

Meskipun nilai ini bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia, namun dalam kenyataannya nilai ini berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nilai dasar bersifat universal, contohnya tentang hakikat Tuhan, manusia dan makhluk hidup lainnya.

- b. Nilai instrumental

Berkaitan dengan organisasi suatu negara, maka nilai instrumental ini berkaitan dengan arahan kebijakan, atau strategi yang bersumber dari nilai dasar. Dalam kehidupan

bangsa Indonesia nilai-nilai instrumental ditemukan dalam undang-undang dasar berupa pasal-pasal penjabaran dari Pancasila.

c. Nilai praktis

Nilai praktis merupakan penjabaran dari nilai instrumental yang lebih nyata atau pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental.

#### **4. Fungsi Nilai bagi Kehidupan Warga Negara**

Menurut Setiawan (2015: 83), ada tiga fungsi nilai bagi kehidupan warga negara, yaitu:

a. Sebagai faktor pendorong

Tinggi rendahnya individu dan satuan manusia dalam masyarakat bergantung pada tinggi rendahnya nilai-nilai yang menjiwai mereka. Apabila nilai-nilai dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat, maka harapan ke arah kemajuan bangsa bisa terencana. Hal ini merupakan cita-cita untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan beradab

b. Sebagai petunjuk arah

Nilai-nilai dalam masyarakat juga memberikan petunjuk bagi setiap warganya untuk menentukan pilihan terhadap jabatan dan peranan yang akan diambil. Misalnya setiap pendatang baru harus dapat menyesuaikan diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat yang didatanginya agar tidak menyebabkan pandangan masyarakat menjadi kurang simpati terhadap dirinya. Dengan demikian, pendatang baru dapat menghindari hal yang dilarang atau tidak disenangi masyarakat dan mengikuti pola pikir serta pola tindakan yang diinginkan

c. Sebagai benteng perlindungan

Pengertian benteng di sini berarti tempat yang kokoh karena nilai-nilai merupakan tempat perlindungan yang kuat dan aman terhadap rongrongan dari luar sehingga masyarakat akan senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai sosialnya. Misalnya nilai-nilai keagamaan dan keadilan untuk membentengi diri dari nilai-nilai barat yang sekuler, individualis dan egoisme.

## **5. Hakikat Pendidikan Nilai**

Menurut Setiawan (2015: 70) bahwa pada dasarnya pendidikan nilai dapat dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan nilai. Pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik.

Dalam proses pendidikan nilai, tindakan-tindakan pendidikan yang lebih spesifik dimaksudkan untuk mencapai pendidikan yang lebih khusus bahwa pendidikan nilai secara khusus ditujukan untuk:

- a. Menerapkan pembentukan nilai kepada peserta didik
- b. Menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan
- c. Membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut dengan demikian pendidikan nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyederhanaan nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai.

Pendidikan nilai membentuk peserta didik dengan melibatkan

proses-proses sebagai berikut:

- a. Adanya proses identifikasi nilai personal dan nilai sosial terhadap stimulasi yang diterima
- b. Adanya penyelidikan secara rasional dan filosofis terhadap inti nilai-nilai dari stimulus yang diterima
- c. Respon afektif dan emotif terhadap inti nilai tersebut
- d. Pengambilan keputusan berupa nilai-nilai dan perilaku terhadap stimulus berdasarkan penyelidikan terhadap nilai-nilai yang ada dalam dirinya.

Sasaran yang hendak dituju dalam pendidikan nilai ialah penanaman nilai-nilai luhur ke dalam diri peserta didik. Pendidikan nilai seyogianya dikembangkan pada diri dan bersifat umum untuk setiap orang. Pendidikan nilai merupakan proses membina makna-makna yang esensial karena hakikatnya manusia ialah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menghayati makna esensial, makna yang esensial sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan nilai membina pribadi yang utuh, terampil berbicara, menggunakan lambang dan isyarat yang secara faktual diinformasikan dengan baik, manusia berkreasi dan menghargai estetika dijunjung oleh kehidupan yang kaya dan penuh disiplin.

Disimpulkan bahwa pendidikan nilai yang mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten.

## **6. Pengertian Norma**

Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat,

dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Norma juga merupakan suatu yang mengikat masyarakat atau disebut juga norma sosial.

Dapat disimpulkan norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi.

Jenis-jenis norma yang ada di masyarakat antara lain:

- a. Norma agama ialah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran. Pelanggar norma agama mendapat sanksi yang tidak langsung berupa siksaan di neraka.
- b. Norma kesusilaan ialah norma yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan. Sanksi yang tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya yakni merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya.
- c. Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia yang ada di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari oleh masyarakat itu. Norma kesopanan ini berbeda menurut tempat, lingkungan dan waktu. Sanksi yang diberikan juga tidak tegas berupa hinaan, celaan, atau dikucilkan dari pergaulan.
- d. Norma hukum ialah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara, lembaga politik, masyarakat dan bangsa. Bagi yang melanggarnya ditindak tegas oleh penegak hukum seperti pidana penjara, kurungan, denda, dan lain-lain.

## **7. Pengertian Moral**

Moral ialah ajaran mengenai baik-buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap kewajiban, dan sebagainya. Moral ialah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang diterima umum tentang tindakan manusia mana yang baik dan mana yang buruk.

Moral berasal dari kata Latin yaitu “mores” yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik-buruk yang ditentukan bagi individu nilainilai sosial budaya dimana individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan (Ali dan Asrori, 2012: 136).

Mengenai perilaku, kesopanan, bersikap baik merupakan beberapa sikap dari moral yang dipandang masyarakat. Moral dapat memandang masyarakatnya memiliki nilai sosial yang baik atau buruk. Kepribadian seseorang sangat erat kaitannya dalam kegiatan sehari-hari, moral diperlukan demi kehidupan yang damai dan harmonis sesuai dengan aturan. Dapat dipahami bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Karena moral merupakan pengatur perilaku individu dalam bersosialisasi dengan kelompok masyarakat. Dengan adanya moral baik yang tumbuh dalam masyarakat, kehidupan bersosialisasi di dalamnya akan terasa damai. Hal tersebut harus dipatuhi, karena moral memiliki fungsi dalam mengatur, menjaga

ketertiban, dan menjaga keharmonisan antar masyarakat yang ada dalam suatu pranata sosial.

Moral merupakan nilai perilaku yang harus dipatuhi, karena moral merupakan norma yang mengatur baik-buruk individu dalam suatu masyarakat. Kepribadian seseorang sangat erat kaitannya dalam kegiatan sehari-hari, moral diperlukan demi kehidupan yang damai dan harmonis sesuai dengan aturan.

### **8. Faktor yang Mempengaruhi Moral**

Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan moral pada diri individu dengan adanya interaksi aktifitas dari dalam dan luar individu. Seorang anak belum memiliki nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tentang apa yang dianggap baik dan buruk oleh kalangan sosialnya.

Pengajaran moral kepada anak tidak dapat diajarkan secara teori saja, melainkan diperlukan sebuah praktek. Anak akan dapat cepat memahami sebuah ilmu baru dengan cara diberikan contoh langsung, karena cara berpikir anak adalah meniru. Jika seorang anak diajari mengenai moral baik, maka ajaklah ia ke lingkungan sosialisasi yang baik.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali dan Asrori, 2012: 146) bahwa nilai moral adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai moral.

Jika suatu individu berada di lingkungan yang pergaulannya baik, sopan, menghormati, maka karakter yang terbentuk pada individu tersebut akan baik pula. Namun jika lingkungannya jahat, kasar, tidak memiliki sopan santun, maka karakter yang terbentuk akan seperti itu.

Lingkungan pembentukan karakter pada anak, tidak hanya di lingkungan tempatnya bermain. Namun keluarga dan sekolah pun memiliki andil dalam pembentukan karakter anak. Justru keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak. Karena nilai moral dan sikap individu tumbuh dan berkembang di dalamnya.

## **9. Pengertian Karakter**

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang arti dalam bahasa Inggrisnya adalah “*to mark*” yaitu menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya juga harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk

menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai *insan kamil*. Pada pendidikan karakter, yang mau dibangun adalah karakter-budaya yang menumbuhkan kepenasaranan intelektual (*intellectual curiosity*) sebagai modal untuk mengembangkan kreativitas dan daya inovatif yang dijiwai dengan nilai kejujuran dan dibingkai dengan kesopanan dan kesantunan (Dirjen Dikdas: 2011).

Menurut Wibowo Pendidikan Karakter untuk Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, Pendidikan Karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup, seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian dan lain-lainnya. Dan itu adalah pilihan dari masing-masing individu yang perlu dikembangkan dan perlu di bina, sejak usia dini (idealnya).

Disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk membangun nilai-nilai moral dan karakter sehingga tidak hanya aspek kognitifnya atau pengetahuannya saja yang diprioritaskan tetapi juga afektif dan psikomotor sebagai pengamalannya.

Menurut Buchori (2007) pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata.

Di sekolah, anak mengalami perubahan dalam tingkah lakunya. Proses perubahan tingkah laku dalam diri anak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang tertuang dalam kurikulum. Kurikulum pendidikan yang dilaksanakan oleh guru, salah satunya berfungsi untuk membentuk tingkah laku menuju kepribadian yang dewasa secara optimal.

Di sekolah, berlangsung proses transformasi nilai-nilai luhur

melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan kata kunci dari proses transformasi nilai-nilai luhur di sekolah. Guru menjadi transformer nilai-nilai luhur kepada peserta didik untuk menjadi bagian dari masyarakat yang berbudaya.

Wiyani dan Ardy (2012) fungsi transformasi nilai-nilai luhur yang dilaksanakan oleh sekolah mencakup lima dimensi, yaitu:

1. Pendidikan tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan semata tetapi juga sikap, nilai, dan kepekaan pribadi.
2. Peran seleksi sosial (mencakup tidak hanya pemberian sertifikat, tetapi juga melakukan seleksi terhadap peluang kerja).
3. Fungsi indoktrinasi.
4. Fungsi pemeliharaan anak.
5. Aktivitas kemasyarakatan.

Sekolah sebagai wahana transformasi nilai-nilai luhur dan pengetahuan anak akan menentukan corak berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan norma-norma yang diyakini dan dimiliki masyarakat. Pada gilirannya, kepribadian anak akan terbentuk sesuai dengan akar budayanya dengan kemampuan merespons perubahan di masyarakat.

## **10. Pentingnya Pendidikan Karakter**

Dasar pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Jika seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik selanjutnya. Namun, banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak ketimbang pendidikan karakter. Banyak orang tua gagal dalam mendidik karakter anak-anaknya karena kesibukan atau justru karena lebih mementingkan aspek kognitif saja.

Untuk itulah perlunya pendidikan karakter di sekolah.

Namun masalahnya, kebijakan pendidikan di Indonesia juga lebih mementingkan aspek kecerdasan otak, dan belum lama ini pentingnya pendidikan karakter menjadi perbincangan pusat di dalam dunia pendidikan.

Kurikulum pendidikan di Indonesia dibuat hanya cocok untuk diberikan pada 10-20% otak-otak terbaik. Artinya, sebagian besar anak sekolah (80-90 persen) tidak dapat mengikuti kurikulum pelajaran di sekolah. Akibatnya, sejak usia dini, sebagian besar anak-anak akan merasa bodoh karena kesulitan dalam menyesuaikan dengan kurikulum yang ada.

Ditambah dengan adanya sistem ranking yang telah mengecap anak-anak yang tidak masuk dalam peringkat 10 besar sebagai anak yang kurang pandai. Sistem seperti ini tentunya dapat membunuh rasa percaya diri seorang anak yang akan berdampak tidak baik terhadap perkembangan karakter anak.

Rasa percaya diri yang muncul pada anak akan membuat anak mengalami stres yang berkelanjutan. Pada usia remaja, biasanya keadaan ini akan mendorong untuk berperilaku negative. Maka, tidak heran kita lihat perilaku remaja kita yang senang tawuran, terlibat kriminalitas, membolos, putus sekolah yang kemudian itu semua telah membuat menurunnya mutu lulusan SMP dan SMA. Jadi, pendidikan karakter atau budi pekerti lebih adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kalau kita peduli untuk meningkatkan mutu lulusan SD, SMP, dan SMA, maka tanpa pendidikan karakter adalah usaha yang sia-sia.

### **C. Hubungan Nilai, Norma, Moral dan Karakter**

Norma selalu berjalan seiring dengan nilai dan moral, jika nilai ada sebuah penghargaan terhadap sesuatu, maka norma adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam

masyarakat. Moral adalah ajaran baik-buruk, dan benar dan salah. Dari norma tersebut kita mengatur moral seseorang apakah hal yang dilakukan oleh seseorang itu hal yang baik atau tidak, benar atau salah dengan berpatokan dengan norma. Dengan patuh dan taat pada norma yang berlaku, sudah pasti bermoral baik, dengan moral yang baik tentu akan mendapat nilai yang baik dalam pandangan masyarakat dalam kehidupan baik secara pribadi maupun bermasyarakat. Sehingga ketika nilai, norma, moral dijalankan dengan baik dan benar, maka akan terbentuklah karakter yang unggul. Karena karakter itu merupakan hasil dari tindakan baik yang secara terus menerus.

Nilai, norma, moral dan karakter tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain, ketiganya saling berhubungan dan mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk mewujudkan ketiga hal di atas diperlukan pendidikan sejak anak berusia muda. Sekarang ini sedang digalakkan pendidikan karakter untuk membangun moral bangsa, dan hal itu sudah menjadi salah satu tujuan pendidikan khususnya di Indonesia.

Dengan pendidikan nilai, norma, dan moral, karakter kita berharap manusia akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menghargai kemampuan dan karya orang lain lebih bertanggungjawab, adil, santun, penuh toleran dalam bersikap dan bertindak sehingga dapat mengembangkan diri dalam bidangnya.

Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter merupakan program pendidikan yang diberikan kepada setiap orang, dengan memberikan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan makna esensial, serta keterampilan yang diperlukan oleh setiap manusia dalam upaya membina peserta didik menjadi manusia yang baik, yang berkepribadian menyeluruh terpadu.

Dalam perspektif Indonesia Pendidikan Nilai, Moral dan

Karakter adalah pendidikan harmonis yang mengembangkan aspek kognitif (pengetahuan, pengertian, pemahaman dan sebagainya), aspek afektif (nilai, moral, sikap dan sebagainya), dan psikomotor (keterampilan). Namun dari ketiga aspek tersebut, penekanannya lebih besar pada aspek afektif.

Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter, yaitu membina warga negara Indonesia yang memiliki kepribadian yang baik, terpadu, dan terdidik, membentuk manusia seutuhnya. Sejalan dengan hal itu, maka Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter bernuansakan dan bermisikan pada pembentukan kepribadian, watak, jati diri manusia, kehidupan substansi dan potensinya memuat sarat nilai, moral, dan karakter, serta memiliki visi dan misi memanusiakan (*humanizing*), pembudayaan (*civilizeing*), pemberdayaan (*empowering*) dan sosialisasi (*socializing*) untuk kehidupan bersama manusia dan kehidupannya secara pribadi.

Sebagai pendidikan yang bernuansakan dan bermisikan pembentukan kepribadian, maka dalam upaya pembentukan kepribadian tersebut, tentulah tidak bisa lepas dari muatan nilai, moral dan karakter yang dicita-citakan dan dipandang luhur. Karena nilai, moral dan karakter itulah yang hendaknya disosialisasikan, dan dinternalisasikan, sehingga menjadi personalisasi, mempribadi dalam sosok kepribadian yang diinginkan. Artinya Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter menjadikan nilai dan moral sebagai “spirit” dari karakter, karena sosok kepribadian yang dicita-citakan oleh Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter, hendaknya diberikan “ruh” berupa muatan nilai, moral dan karakter luhur yang mempribadi dalam sosok kepribadian yang diharapkan oleh Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter.

Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter, mengacu kepada Rena (2006: 3) adalah tidak hanya sebagai hati dari pendidikan (*heart of*

*education*), tetapi juga sebagai pendidikan hati (*education of heart*). Pendidikan, Nilai, Moral dan Karakter adalah komponen yang diperlukan bagi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran secara holistik. Karenanya mendidik dan mengajar nilai-nilai, moral dan karakter, tidak hanya mengajar bagaimana menilai, bermoral dan berkarakter, tapi juga bagaimana memberikan pengetahuan dalam tingkat pemahaman dan wawasan yang lebih dalam. Pengalaman belajar secara holistik bertujuan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai, moral dan karakter, kemudian oleh peserta didik diwujudkan ke dalam perilakunya.

Internalisasi dan pewujudan nilai-nilai, moral dan karakter ke dalam perilaku pastilah berbasis fitrah dasar manusia yang menuju kepada pribadi manusia yang diharapkan. Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan fitrah dasar manusia secara utuh menuju terbentuknya insan berakhlakul karimah.

Secara tegas pelaksanaan Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter perspektif Indonesia sebagai upaya penanaman dan pengembangan nilai, moral dan karakter pada diri pribadi, berupa pemberian bantuan agar peserta didik dapat menyadari dan mengalami nilai-nilai, moral dan karakter, sehingga mampu menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya, dalam menuju terbentuknya insan berakhlakul karimah.

Pelaksanaan Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter perspektif Indonesia demikian tentulah tidak terpisahkan dari visi Pendidikan Nasional yang sarat dengan muatan nilai, misi dan tujuan mengenai sosok pribadi manusia Indonesia yang utuh, padu dan menyeluruh. Pendidikan Nilai, Moral maupun Karakter dapat dikatakan mempunyai visi dan misi dalam lapangan pendidikan.

Visi Pendidikan Nilai, Moral dan Karakter adalah Manusia Indonesia yang memiliki akhlakul karimah, berkepribadian mulia, sebagai manusia yang kaffah (utuh) baik sebagai individu, makhluk sosial serta sebagai insan ciptaan Tuhan (makhluk religius).

Sementara Misi Pendidikan Nilai, Moral maupun Karakter, yang diinspirasi oleh Maftuh (2007: 70-71) adalah:

- a. Membina peserta didik agar memahami dan menyadari nilai-nilai, moral dan karakter dirinya dan nilai-nilai, moral dan karakter orang lain (termasuk nilai, moral dan karakter individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia) serta sumber-sumber nilai, moral dan karakter (agama, sosial budaya, adat, hukum, metafisik, ilmu) dan muatan nilai, moral dan karakter (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama).
- b. Membina peserta didik agar mampu mengaktualisasikan diri (mengapresiasi dan melakonkan) sebagai pribadi yang memiliki akhlakul karimah dan berkepribadian mulia dalam hubungan di antara manusia (keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia), dalam hubungannya dengan alam sekitar (ruang, waktu dan budaya) serta hubungannya dengan pencipta, yakni ibadah pada Allah *Subhanahu wata'ala* dalam menata hidup hari ini, esok dan hari kemudian.
- c. Membina peserta didik agar mampu melakukan proses pembelajaran pendidikan nilai, moral, dan karakter (dalam pendidikan formal maupun non/in formal) dalam bentuk *cognitive moral*, *affective moral* (pendekatan *qolbiyah*), *behavior moral*, pendekatan metafisis, pendekatan kultural, serta pendekatan holistik.

Sejalan dengan nilai, moral dan karakter demokratis yang hendaknya dibentuk dan dibina dalam dunia pendidikan nasional, maka Berkowitz dan Simmons (2003:119) mengkaitkannya antara masyarakat demokratis dan sekolah. Untuk berfungsinya masyarakat yang modern, demokratis dan teknologis, para warga negara (para guru dan kepala sekolah), dan warga negara masa depan (para siswa), harus tidak hanya memahami nilai-nilai, moral dan karakter atas nama masyarakat demokratis yang dibangun, tetapi juga mempraktikkan kondisi-kondisi nilai, moral dan karakter yang dibolehkan dari demokrasi. Karena demokrasi didasarkan atas nilai, moral dan karakter dari para warga negara dan institusi-institusi publik, seperti sekolahsekolah.

Dapat dikatakan bahwa nilai, moral dan karakter warga negara yang demokratis amat tergantung pada nilai, moral dan karakter peserta didik yang dihasilkan oleh sekolah.

Dalam prinsip-prinsip untuk pendidikan nilai, moral dan karakter, maka salah satu prinsipnya adalah prinsip disiplin diri (*self discipline*), yang terdiri dari nilai, moral dan karakter kebulatan tekad (*determination*), kepatuhan (*obedience*), dan pengendalian (*restraint*), "When we have the determination to restraint our lower desires, the door is opened for us to fulfill our highest aspirations. Through obedience to our higher self, we develop an inner control and greater confidence on ourselves". ([www.teachingvalues.com](http://www.teachingvalues.com)).

Tekad seseorang untuk mengendalikan hasrat-hasrat yang lebih rendah, akan terbuka bagi pemenuhan aspirasi-aspirasinya yang tertinggi. Salah satunya adalah melalui nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap diri yang lebih tinggi, mengembangkan kontrol diri dan kepercayaan yang lebih besar terhadap diri sendiri. Untuk mengembangkan kontrol diri dan kepercayaan, lebih dulu perlu dibentuk dan dibina nilai, moral dan karakter kepatuhan.

Dapat ditegaskan bahwa kepatuhan sebagai nilai, moral dan karakter adalah landasan untuk mengembangkan kontrol diri (*self-discipline*) dan kepercayaan terhadap diri (*self-belief*), maka sebelum kontrol diri dikembangkan, hendaklah dibentuk dan dibina kepatuhan sebagai nilai, moral dan karakter terlebih dahulu, agar menjadi perilaku peserta didik. Karena dari 9 pilar nilai, moral dan karakter yang perlu diajarkan kepada anak-anak, menurut Indonesia Heritage Foundation, salah satunya adalah kepatuhan, sebagaimana dikutip dari Megawangi (2004: 95), yaitu; Hormat (*respect*), Santun (*courtesy*), dan Patuh (*obedience*). Selain itu dilihat dari indikator nilai, moral dan karakter warga negara, Sparks (1991: 182) memasukkan kepatuhan kepada otoritas yang sah (*obedience to legitimate authority*) ke dalam salah satu indikator dari nilai, moral dan karakter Hormat (*Respectful*).

#### **D. PERBEDAAN KEPRIBADIAN DENGAN KARAKTER**

Kepribadian adalah hadiah dari Tuhan Sang Pencipta saat manusia dilahirkan dan setiap orang yang memiliki kepribadian pasti ada kelemahannya dan kelebihanannya di aspek kehidupan sosial dan masing-masing pribadi. Kepribadian manusia secara umum ada 4, yaitu:

- Koleris : tipe ini bercirikan pribadi yang suka kemandirian, tegas, berapi-api, suka tantangan, bos atas dirinya sendiri.
- Sanguinis : tipe ini bercirikan suka dengan hal praktis, happy dan ceria selalu, suka kejutan, suka sekali dengan kegiatan social dan bersenang-senang.
- Phlegmatis : tipe ini bercirikan suka bekerjasama, menghindari konflik, tidak suka perubahan mendadak, teman bicara yang enak, menyukai hal yang pasti.

Melankolis : tipe ini bercirikan suka dengan hal detail, menyimpan kemarahan, Perfection, suka instruksi yang jelas, kegiatan rutin sangat disukai.

Saat setiap manusia belajar untuk mengatasi dan memperbaiki kelemahannya, serta memunculkan kebiasaan positif yang baru, inilah yang disebut dengan karakter. Misalnya, seorang dengan kepribadian Sanguin yang sangat suka bercanda dan terkesan tidak serius, lalu sadar dan belajar sehingga mampu membawa dirinya untuk bersikap serius dalam situasi yang membutuhkan ketenangan dan perhatian fokus, itulah karakter. Pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup, seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian dan lain-lainnya. Hal tersebut adalah pilihan dari masing-masing individu yang perlu dikembangkan dan perlu di bina, sejak usia dini (idealnya). Karakter tidak bisa diwariskan, karakter tidak bisa diberli dan karakter tidak bisa ditukar.

Karakter harus dibangun dan dikembangkan secara sadar dari hari kehari melalui proses yang tidak instan. Karakter bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari.

Kecenderung kalau diperhatikan bahwa orang-orang dengan karakter buruk cenderung mempersalahkan keadaan mereka. Mereka sering menyatakan bahwa cara mereka dibesarkan dengan cara yang salah, kesulitan keuangan, perlakuan orang lain atau kondisi lainnya yang menjadikan mereka seperti sekarang ini. Memang benar bahwa dalam kehidupan, kita harus menghadapi banyak hal di luar kendali kita, namun karakter tidaklah demikian. Karakter selalu merupakan hasil pilihan kita sendiri.

Setiap manusia pada dasarnya mempunyai potensi untuk menjadi seorang pribadi yang berkarakter. Karakter, lebih dari apapun dan

akan menjadikan Anda seorang pribadi yang memiliki nilai tambah. Karakter akan melindungi segala sesuatu yang Anda hargai dalam kehidupan ini. Setiap orang bertanggung jawab atas karakternya. Anda memiliki kontrol penuh atas karakter Anda, artinya Anda tidak dapat menyalahkan orang lain atas karakter Anda yang buruk karena Anda yang bertanggung jawab penuh. Mengembangkan karakter adalah tanggung jawab pribadi Anda.

Kepribadian bukanlah karakter. Setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian merupakan hal yang bisa dikatakan permanen dan merupakan anugerah dari lahir yang sulit untuk dirubah karena merupakan tanda unik dari masing-masing orang sedangkan karakter dapat dibangun dan menurut para ahli psikolog, ada beberapa nilai karakter dasar manusia yaitu cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan.

Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Walaupun manusia memiliki karakter dasar yang baik, tetapi manusia tidak bisa begitu saja memiliki karakter-karakter tersebut. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa karakter itu perlu dibangun tidak seperti kepribadian yang merupakan anugerah sejak lahir seperti quotation word Helen Keller bahwa “Karakter tidak dapat dibentuk dengan cara mudah dan murah. Dengan mengalami ujian dan penderitaan jiwa karakter dikuatkan, visi dijernihkan, dan sukses diraih.”



# **PERMASALAHAN PADA IPS DAN SOLUSINYA**





## BAB IX

# PERMASALAHAN PADA IPS DAN SOLUSINYA

### A. Permasalahan Pada Kurikulum IPS

#### 1. Masalah pada Kurikulum SD/MI

Pengembangan kurikulum IPS untuk sekolah dasar telah cukup lama dikembangkan. Format sistemnya lebih matang dibandingkan kurikulum IPS untuk tingkat SMP. Hanya saja masih terdapat beberapa permasalahan kurikulum IPS di SD/MI, di antaranya ialah:

- a. Bahwa pendekatan proses yang menjadi salah satu acuan kurikulum IPS di SD/MI masih belum maksimal. Terutama untuk SD/MI. SD/MI yang masih jauh komunikasinya dengan sekolah-sekolah lainnya, pelaksanaan kurikulum kadang stagnan (jalan di tempat). Hal ini mengingat besarnya jumlah SD/MI yang jauh dari jangkauan komunikasi ideal.
- b. Masih banyak persepsi bahwa IPS sebagai pelajaran yang tidak terlalu penting, atau kadang disepelekan karena terlalu mudah dan cuma cukup dihafal saja, menggiring pelajaran IPS hanya menekankan aspek kognitif. Aspek afektif dan psikomotorik jarang dijadikan parameter secara lebih tegas.
- c. Bahwa pembelajaran IPS pada tingkat SD/MI belum begitu besar peranannya secara realita sebagai *problem solving* dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Masalah pada Kurikulum SMP/Sederajat

Untuk waktu ke depan, terdapat karakteristik yang membedakan IPS pada siswa SMP dan SMA. Pada masa sebelumnya, bahwa di SMP mata pelajaran IPS masih bersifat monodisipliner, di mana terdapat mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Ekonomi, seperti halnya di SMA. Sejak dikembangkannya kurikulum uji coba tahun 2004 (KBK) dan kurikulum tahun 2006 (KTSP) IPS untuk SMP telah menyatukan seluruh ilmu-ilmu sosial dalam mata pelajaran IPS.

Kurikulum berbasis kompetensi telah menyusun mata pelajaran IPS SMP dalam satu bidang studi. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan konsep dan implementasi kurikulum IPS untuk SMP, yaitu:

- a. Bahwa walaupun kurikulum IPS tersusun secara integral, tetapi belum menonjolkan sebagai sebuah pendekatan inter dan transdisiplin. Fenomena ini kadang terjadi penerjemahan yang berbeda antar guru.
- b. Sulitnya membuat kelas berkolaborasi, terutama koordinasi waktu dan tenaga, sehingga guru akan memilih pembelajaran *saparated*, sesuai dengan bidang studinya sendiri-sendiri.
- c. Bahwa pendekatan trans-interdisiplin PIPS di SMP dikhawatirkan hanya sebagai formalitas kurikulum, yang hanya terlihat dalam pelaporan dan penilaian akhir yang menggabungkan tiga bidang studi.
- d. Rendahnya motivasi guru untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam pengajaran, sehingga mereka cenderung monoton melakukan yang biasanya mereka lakukan. Implikasinya bahwa IPS menjadi mata pelajaran yang kurang diminati, atau disukai karena terkesan sebagai mata pelajaran hapalan.

### 3. Masalah pada Kurikulum di SMA/Sederajat

Kurikulum PIPS di SMA telah menerapkan konsep kurikulum monodisiplin, kecuali PKn. Untuk sekolah yang melakukan penjurusan IPA dan IPS, bahkan telah memasukkan beberapa mata pelajaran seperti ilmu politik, hukum, dan tata negara. Kurikulum IPS untuk SMA memang sudah mempersiapkan siswa untuk menjadi akademisi. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan kurikulum IPS di SMA, yaitu:

1. Terjadinya perbedaan antara SMA-SMA umum dan SMK, sementara belum terdapat konsep IPS yang komprehensi dan mudah dipahami oleh siswa.
2. Bahwa IPS di SMA dan SMK masih mengedepankan aspek kognitif, fenomena ini berangkat dari munculnya pragmatisme pendidikan.
3. Munculnya penjurusan IPA dan IPS di SMA ternyata tidak berpengaruh signifikan dalam pembelajaran IPS di perguruan tinggi. Bahkan sering lulusan IPA mempunyai kelebihan-kelebihan di perguruan tinggi ketika mereka masuk jurusan ilmu-ilmu sosial.
4. IPS di SMA/SMK belum mampu secara signifikan menjadi pegangan *problem solver* para siswa.

Berkaitan dengan berbagai permasalahan kurikulum PIPS pada Dikdasmen, maka perlu diperhatikan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan kurikulum, yaitu:

- a. Bahwa kurikulum PIPS harus mengacu pada kebutuhan saat ini dan jauh yang akan datang. Siswa harus diajak untuk menjadi *problem solver* masalah-masalah masa kini, dan antisipatif pada permasalahan-permasalahan mendatang. Seperti dalam bukunya Jamus A Beane *Curriculum Planning*

*and Development*, yang menekankan perlunya membuat estimasi fenomena yang akan datang, dengan berpijak pada fenomena masa lalu dan saat ini.

- b. Bahwa eksistensi IPS Dikdasmen tidak terlepas dari perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu perlu membuat jaringan yang sinergis guna membangun kurikulum yang fleksibel. Optimalisasi kurikulum IPS berbasis sekolah perlu dikembangkan sebagai salah satu jawaban fenomena IPS ini.
- c. Perubahan kurikulum IPS tidak dilakukan secara tambal sulam, melainkan lebih bersifat holistik interdisipliner, dan berorientasi pada *functional knowledge* dan aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai agama.

Sedangkan menurut Karima dan Ramadhani (2018:45) menggambarkan secara rinci tentang masalah yang dihadapi dalam membelajarkan IPS di sekolah, yaitu:

- a. IPS diajarkan di sekolah juga belum maksimal dalam melaksanakan dan membiasakan pengalaman nilai-nilai kehidupan demokratis, sosial kemasyarakatan dengan melibatkan siswa dan komunitas sekolah dalam berbagai aktivitas kelas dan sekolah.
- b. IPS diajarkan hanya menekankan pada informasi, fakta, dan hafalan, lebih mementingkan isi dari proses, kurang diarahkan pada proses berfikir dan kurang diarahkan pada pembelajaran bermakna dan berfungsi bagi kehidupannya, maka pembelajaran IPS tidak akan mampu membantu peserta didiknya untuk dapat hidup secara efektif dan produktif dalam kehidupan masa yang akan datang..
- c. Akibat dari pengaruh budaya pada masa lalu terhadap mata pelajaran IPS, dimana menganggap IPS cenderung

kurang menarik, pendekatan indoktrinatif, *second class*, dianggap sepele, membosankan, dan bermacam-macam kesan negatif lainnya telah menyebabkan mata pelajaran tersebut menghadapi dilema.

Ditambahkan bahwa IPS yang diajarkan secara terpadu akan menyulitkan bagi guru, karena guru yang tersedia umumnya merupakan guru dengan disiplin ilmu yang terpisah-pisah. Sehingga guru membutuhkan untuk beradaptasi dalam pengintegrasian disiplin ilmu sosial tersebut.

Walaupun masalah yang dihadapi berasal dari berbagai aspek, akan tetapi hal ini tergantung kepada pendidik yang profesional sehingga masalah tersebut dapat diminimalisir. Untuk itu, berikut dijelaskan solusi dari masalah-masalah tersebut di atas.

## **B. Solusi atas Masalah pada IPS**

Sebagaimana yang diungkapkan di atas, bahwa guru adalah kunci dari penyelesaian masalah pembelajaran IPS, dimana Keberhasilan guru dalam menjalankan tugas kependidikannya tergantung pada:

1. Asumsi sukses guru tergantung pada kepribadiannya.
2. Asumsi sukses guru tergantung pada penguasaan metode.
3. Asumsi sukses guru tergantung pada frekuensi dan intensitas aktivitas guru dengan siswa.
4. Penampilan gurulah yang terpenting sebagai tanda memiliki wawasan, ada indikator menguasai materi, ada indikator menguasai strategi belajar mengajar, dan lain sebagainya. Asumsi yang keempat ini memang lebih komprehensif, sehingga dijadikan titik tolak dalam pengembangan guru, yang biasa disebut dengan PTKBK (Pendidikan Tenaga

Kependidikan Berbasis Kompetensi).

Dalam rangka reorientasi peran guru dalam meningkatkan pembelajaran IPS tersebut diatas, maka dibutuhkan model pengembangan profesionalisme guru pendidikan IPS sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan secara berkesinambungan. Model pengembangan profesionalisme guru meliputi:

1. *Preservice education and training*, pembinaan ini secara formal dilakukan pada Fakultas/Jurusan IPS yang memfokuskan pada penyiapan kebutuhan guru di lembaga-lembaga pendidikan IPS.
2. *Inservice training*, Pola pengembangan guru ini dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan khusus seperti P4TK dan IPS. Lembaga ini dimaksudkan untuk *meng-up grade* tenaga kependidikan IPS di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat kemampuan guru pendidikan IPS tidak dapat hanya mengandalkan dari apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan guru sebagai lembaga *preservice education and training*.
3. *On the job training*, Pola pembinaan guru *on the job training* adalah proses pembinaan guru yang diprogramkan atau dilaksanakan secara langsung oleh pimpinan lembaga pendidikan di mana guru itu bekerja. Berbagai bentuk pembinaan tersebut antara lain: *Pertama*, pengarahan dari pimpinan lembaga pendidikan tentang berbagai kebijakan pendidikan. *Kedua*, kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. *Ketiga*, pemberian pengalaman dalam pelaksanaan tugas selama proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, dalam rangka peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan, baik secara individual

maupun kelompok. *Keempat*, pemberian tugas baik terkait dengan teknis edukatif maupun dalam bidang administratif yang diberikan kepada guru.

Dengan dilakukannya pengembangan profesionalisme guru, maka bisa didapat calon guru IPS yang memiliki kualitas serta dedikasi yang tinggi terhadap pembelajaran IPS. Karena hakikatnya, guru memiliki peranan yang penting, guna melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan demokratis melalui pendidikan IPS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1975. *Pengantar Sosiologi*. Solo: Ramadhani.
- , 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Astawa, Ida Bagus Made. 2017. *Pengantar Ilmu Sosial*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Barr, Robert., James L. Barth dan Samuel Shermis. 1978. *Konsep Dasar Studi Sosial*. Bandung: Sinar Baru.
- Cheppy HC. tt. *Strategi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Surabaya: Karya Anda.
- Cikusin, Yaqub. 2005. *Strategi Politik Kepemimpinan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Darmadi, Hamid. 2007. *Konsep Dasar Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta.
- Dimock and Dimock. 1983. *Administrasi Negara*. Jakarta: Aksara Baru.
- Fatimah, Siti. 2015. *Pembelajaran IPS*. Padang: UNP
- Gunawan, Ary H., 2010. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono dan Arnicum Aziz. 1990. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayati, Sri. 2007. *Geografi Politik*. Bandung: P T. Rafika Aditama.
- Henslin, James. M. 2002. *Essential of Sociology: A Down to Earth Approach*, Fourth Edition. Boston: Allyn and Bacon.

- Johnson, D.P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1 & 2 (terj.) Jakarta: Gramedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua. 1996. Jakarta: Rajawali Press.
- Karima, Muhammad Kaulan dan Ramadhani. 2018. Permasalahan Pembelajaran IPS dan Strategi Jitu Pemecahannya. *Ittihad Jurnal Pendidikan*. Vol.II No. 1, 43-53. (Tersedia: [www.ejournal-ittihad.alittihadiahsumut.or.id](http://www.ejournal-ittihad.alittihadiahsumut.or.id))
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maftuh, Bunyamin. 2009. *Bunga Rampai Pendidikan Umum dan Pendidikan Nilai*. Bandung: Program Studi Pendidikan Umum/ Nilai SPS UPI Bandung.
- Maryani, Enok dan Nunung Farida. 1997. *Antropologi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Mukmina, dkk. 2002. *Diktat Dasar-dasar IPS*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mukmina. 2008. *IPS Terpadu*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priyono, Titi. 2006. *Sosiologi sebagai Ilmu tentang Perilaku Sosial dalam masyarakat*.
- Rena, Ravinder. 2006. *Value-based Education for Human Development. Eritrean Perspective*.
- Saidiharjo. 2007. *Pengembangan Materi IPS Terpadu*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sardiman AM.. 2006. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPS di Indonesia: Sebuah Alternatif*. Makalah, Disampaikan pada

- Seminar Internasional HISPISI dengan tema: *Komparasi Pendidikan IPS Antarbangsa*, di Semarang, 7-8 Januari 2006.
- Setiadi, Elly M. 2013. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan, Deny. 2015. *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Medan: Larispa.
- Soedarsono, Soemarno. 2009. *Karakter Mengantarkan Bangsa dari Gelap Menuju Terang*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Somantri, Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- Sparks, Jr, Richard.K. *Character Development at Fort Washington Elementary School*. Part 3 in Benninga, Jacquea, S. Ed. (1991). *Moral, Character, and Civic Education in the Elementary School*. New York: Teacher College Press
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 1996. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dalam Era Globalisasi: Suatu Kajian*, Makalah, disajikan dalam Seminar tentang Sistem Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Menyongsong Era Global oleh Pusbangkurandik-Balitbangdikbud. Jakarta: Balitbang Dikbud.
- Sumaatmadja, Nursid. 1986. *Pengantar Studi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Supardan, Dadang. 2009. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendektan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supardi. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Sosial*. Ombak: Yogyakarta.
- Susanto, Phil. Astrid S. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Putra A. Bardin.

William T., Lowe,. 1969. *Structure and The Social Studies*. London:  
Itacha.

Wiyani, Novan Ardy. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Yogyakarta:  
Pedagogia.

[www.teachingvalues.com](http://www.teachingvalues.com)

## RIWAYAT PENULIS



**Muhammad Kaulan Karima, M.Pd.** lahir di Desa Gelam, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai pada 23 Juli 1988, anak bungsu dari enam orang bersaudara dari pasangan Bapak H. Abd. Rahman dan Hj. Latifah Hanim. Mengawali pendidikan di SDN. 102072 Bandar Khalipah dan sekaligus MDTA Al Washliyah Bandar Khalipah tamat tahun 2000. Setelah itu melanjutkan pendidikan MTs dan MA Swasta di Pondok Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung tahun 2000-2006.

Pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN-SU Medan tahun 2006 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan lulus sebagai Wisudawan Terbaik sekaligus mewakili seluruh wisudawan menyampaikan sambutan pada November 2010, selama mengikuti perkuliahan juga aktif berorganisasi di HMI Komisariat Tarbiyah pada tahun 2007-2008. Tahun 2011 Melanjutkan Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana UNIMED Prodi Pendidikan Dasar konsentrasi IPS tamat tahun 2013. Melanjutkan Strata Tiga (S3) tahun 2014-sekarang pada PPs UNIMED Prodi Pendidikan Dasar.

Menikah dengan Ramadhani, M.Pd. tanggal 05 April 2015 saat ini dianugerahi dua orang anak, Pranaja Muazzam Karim (3 tahun) dan Tsania Hilya Karim (7 bulan). Mulai tahun 2011-sekarang aktif sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan. Saat ini diamanahkan sebagai Ketua I di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ittihadiyah Labuhanbatu Utara (STIT-AILU). Serta sebagai Ketua Umum DPW Barisan Muda Al Ittihadiyah Sumatera Utara periode 2017-2022.

Karya ilmiah Buku dan Jurnal yang telah dihasilkan antara lain: (1) Buku “Sosiologi Pendidikan” (Perdana Publishing: 2016) ISBN: 978-602-6462-10-7. (2) Bagian Buku Prosiding: Peningkatan Kontribusi Manajemen Pendidikan (Perdana Publishing: 2015), judul “Manajemen Pendidikan Karakter dalam Meningkatkan Mutu Lulusan”, ISBN: 978-602-6970-66-8, (3) Bagian Buku Prosiding “Kontribusi Ormas Islam: Dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan di Abad ke 21 (Perdana Publishing, 2015) Judul “Sejarah Perkembangan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Al-Ittihadiyah” ISBN 978-602-8935-94-4. (4) Jurnal Tematik Prodi Pendidikan Dasar PPs UNIMED: Vol. 001 No. 10 tahun 2013. ISSN: 1970-0833: “Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa”. (5) Jurnal Al-Irsyad Jurusan Bimbingan Konseling Islam FITK UIN SU: Volume. V, No. 1, 2015. ISSN: 2088-8341. “Problematika Pendidikan di Indonesia Serta Alternatif Pemecahannya”. (6) Jurnal Ijtima’iyah Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN SU: “Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Yang Bermartabat”. Volume 1, No. 1, 2017. (7) Ittihad Jurnal Pendidikan, Vol. II No. 1, 2018. *Permasalahan Pembelajaran IPS dan Strategi Jitu Pemecahannya*. ISSN: 2549-9238, E-ISSN:2580-4441.



**Toni Nasution, M.Pd.** Lahir 12 Maret 1991 di Palopat Mari, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Sekolah Dasar diselesaikan tahun 2004, Madrasah Tsanawiyah Tahun 2007, Madrasah Aliyah Tahun 2010 di Padangsidempuan-Tapanuli Selatan, kemudian menyelesaikan Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Prodi Pendidikan Guru Madrasah tahun 2015, Melanjutkan Strata Dua (S.2) PPs Universitas Negeri Padang Prodi Pendidikan IPS

meraih gelar Magister tahun 2017.

Semasa mahasiswa pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selaku Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah UIN SU Medan periode 2014-2015, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PGMI, Ketua Ikatan Alumni Pesantren Baharuddin, Ketua Umum Perhimpunan Pemerhati Pendidikan Sumatera Utara (P3SU), Sekretaris Umum DPP PEMAPASID, Ketua Umum Persatuan Pendidikan IPS Indonesia, Pengurus Pemuda Al-Ittihadiyah DPW Provinsi Sumatera Utara. Selain mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan juga sebagai Kepala Sekolah di SMP Islam Terpadu Al-Afkari Desa Baru dusun III Kec. Batang Kuis.



**Ramadhani, M.Pd.** Lahir di Helvetia 01 April 1992, tiga bersaudara anak ke dua dari Bapak Alimun dan Ibu Leginah. Menyelesaikan Sekolah Dasar tahun 2004 di SD Negeri 106805, MTs di MTs Swasta PAB 1 Helvetia tamat 2007, Madrasah Aliyah Swasta PAB 2 Helvetia tamat 2010. Kemudian menyelesaikan Strata Satu (S1) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan tahun 2014. Strata Dua (S2) di Pascasarjana UNIMED prodi Pendidikan Dasar tamat tahun 2016.

Pada masa kuliah penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Fakultas Tarbiyah tahun 2012-2013, disinilah penulis bertemu dengan Muhammad Kaulan Karima, M.Pd yang akhirnya sebagai Suami pada tahun 2015. Saat ini diaunegerahi dua oran anak 1) Pranaja Muazzam Karim (3 tahun) dan 2) Tsania Hilya Karim (7 bulan).

Pernah bekerja di di Yayasan Pendidikan Ikhwanul Muslimin II Tembung tahun 2015. Mulai tahun 2016-sekarang menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sumatera Utara.

Karya Ilmiah yang pernah diterbitkan (1) Jurnal Ijtima'iyah Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN SU: "Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Yang Bermartabat". Volume 1, No. 1, 2017. (2) Ittihad Jurnal Pendidikan, Vol. II No. 1, 2018. *Permasalahan Pembelajaran IPS dan Strategi Jitu Pemecahannya*. ISSN: 2549-9238, E-ISSN:2580-4441.

## TENTANG EDITOR



Dr. Deny Setiawan, M.Si, lahir di Bandung 8 Maret 1968 adalah dosen Universitas Negeri Medan, saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I FIS UNIMED. Mata kuliah yang diampu adalah 1. Civic 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Pendidikan Demokrasi 4. Studi Masyarakat Indonesia 5. Difusi Inovasi Pendidikan Dasar.

Menyelesaikan S-1 Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan dari IKIP Bandung, S-2 Ketahanan Nasional dari Universitas Gadjah Mada, dan S-3 Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Telah menulis beberapa judul buku, yaitu: Pengembangan Materi IPS, Studi Masyarakat Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kewarganegaraan, Integrasi dan Identitas Kebangsaan.

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain adalah: Pengembangan Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Mahasiswa FIS Unimed, Pengembangan Penilaian Autentik Berbasis Karakter di Sekolah Dasar, Pemanfaatan Identitas Etnis dalam PEMILUKADA di Sumatera Utara Tahun 2013, Model Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Karakter Kebangsaan, Model Pembangunan Masyarakat Multikultural Melalui Rekonseptualisasi Integrasi dan Rekonstruksi Identitas Bangsa (Kajian Naturalistik Terhadap Tokoh Etnis Tionghoa di Kota Medan), Penerapan Model *Controversial Issues* dalam Pembelajaran Studi Masyarakat Indonesia, Integrasi dalam Proses Pembentukan Identitas Bangsa untuk Menumbuhkan Budaya Kewarganegaraan.

Beberapa artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam Berkala Ilmiah maupun Proceeding Internasional Conference, antara lain adalah: *Integration in the Process of National Identity Formation for Growing Citizenship Culture of Chinese Ethnic in Medan City*, Implementasi Pendidikan Karakter di Era Global, Membangun Pemahaman Multikultural dan Multi agama Guna Menangkal Radikalisme di Aceh Singkil, *The Development of Authentic Assessment Based on Character at Primary School*, *The Real Development of Authentic Assessment Based on Character of Primary Students*, *Model Of Multicultural Society Development Based On Natinality Character In Medan City*, Urgensi Tuntutan Profesionalisma dan Harapan Menjadi Guru Berkarakter (StudiKasus: Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Batubara), *The Enthnic Identity Usage (Region/District) At The Governor Election In North Sumatera, Indonesia*, *Authentic Assessment Model in Social Studies Learning to Improve The Social Skills*, *Inhibiting Factor of Primary School Teacher Competence in Indonesia: Pedagogic and Profesionalism*

